Vol. 18 No. 2
TRIWULANAN
Januari-Maret 2022
(Terbit Mei 2022)
Triwulan I 2022
ISSN 2656-8217

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG

Tim Penyusun

Penanggung Jawab
Budiyono

Koordinator Penyusun
Irfan Farulian

Editor
Tri Setyoningsih

Tim Penulis
Tri Setyoningsih
Pratyaksa Candraditya
Bagus Maulana
Triani Susanti
Teuku Muhammad Rafi Ihsan
Claresta Islamey

Kontributor
Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi
Tim Implementasi KEKDA Provinsi
Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Produksi dan Distribusi
Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan
Jl.Hasanuddin No.38
Bandar Lampung – Lampung, 35225
Tel. (0721) 486-355
Fax. (0721) 481-131

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku "Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Periode Februari 2022" akhirnya dapat diselesaikan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan yang difokuskan pada pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia secara periodik melakukan asesmen terhadap perkembangan ekonomi di daerah, sumber-sumber tekanan inflasi, risiko dan prospeknya serta rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah.

Seiring dengan penerapan otonomi daerah sejak 1999, asesmen ekonomi regional semakin berperan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional dan upaya untuk menstabilkan harga. Perhatian terhadap perkembangan ekonomi daerah semakin kuat di era pemerintahan saat ini yang menghendaki aktivitas ekonomi tidak lagi terpusat pada daerah tertentu, melainkan tersebar di berbagai daerah, sehingga disparitas ekonomi antar daerah berkurang. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung melakukan kajian serta memberikan asesmen terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan regional Lampung secara menyeluruh dan dituangkan dalam publikasi "Laporan Perekonomian Provinsi Lampung". Analisis dalam buku ini mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan inflasi, perbankan dan sistem pembayaran,

Dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, PLN Wilayah Lampung, Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Ladeo Provinsi Lampung, Ditjen Bea Cukai, dan semua penyedia data yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kami menyadari bahwa hasil kajian ekonomi yang disajikan dalam buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran serta masukan dari semua pihak yang berkepentingan dengan buku ini. Kami juga mengharapkan kiranya kerjasama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, Mei 2022
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG

Budiyono
Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **2**
DAFTAR TABEL **4**
DAFTAR GRAFIK **5**
TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI LAMPUNG **12**
RINGKASAN EKSEKUTIF **14**
1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH **19**
1.1 Analisis PDRB Sisi Pengeluaran 20
1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga 22
1.1.2. Konsumsi Pemerintah 23
1.1.3. Investasi 23
1.1.4. Ekspor dan Impor 24
1.2 Analisis PDRB Sisi Lapangan Usaha 29
1.2.1 LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 30
1.2.2 LU Industri Pengolahan 31
1.2.3 LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 32
1.2.4 LU Konstruksi 33
1.2.5 Lapangan Usaha Lainnya 34
2. KEUANGAN DAERAH **38**
2.1 APBD Provinsi Lampung 39
2.1.1 Anggaran Pendapatan Provinsi Lampung 40
2.1.2 Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung 42
2.1.3 Anggaran Belanja Provinsi Lampung 43
2.1.4 Realisasi Belanja Provinsi Lampung 45
2.2 Belanja APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 45
2.3 Penerimaan dan Belanja Negara di Provinsi Lampung 46
2.3.1 Penerimaan 46
2.3.2 Belanja 47
3. PERKEMBANGAN INFLASI **49**
3.1. Inflasi Umum Provinsi Lampung 50
3.1.1. Inflasi Bulanan 50
3.1.2. Inflasi Tahunan 53
3.1.3 Ekspektasi Inflasi 57
3.1.4 Pengendalian Inflasi 58
3.2. Inflasi Kota-Kota di Provinsi Lampung 60
3.2.1. Inflasi Kota Bandar Lampung 60

3.2.2. Inflasi Kota Metro 61
3.3. Inflasi Kota-Kota di Sumatera 62
3.4. Arah Perkembangan Inflasi Triwulan II 2022 62
4. PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN UMKM 67
4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga 68
4.1.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga 69
4.1.2 Kinerja Keuangan Rumah Tangga 70
4.1.3 Dana Pihak Ketiga Perseorangan di Perbankan 70
4.1.4 Eksposur Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga 71
4.2 Asesmen Sektor Korporasi 72
4.2.1 Kinerja Korporasi 72
4.2.2 Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi 74
4.3 Asesmen Institusi Keuangan 75
4.3.1 Bank Umum 75
4.3.3 Bank Syariah 77
4.4 Perkembangan Kredit UMKM 79
4.5 Peningkatan Akses Keuangan UMKM 80
5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 81
5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran Tunai 82
5.1.1. Perkembangan Aliran Uang Kartal 82
5.1.2. Penyediaan Uang Layak Edar 83
5.1.3. Perkembangan Temuan Uang Palsu 85
5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Bank Indonesia 85
5.3. Perkembangan Transaksi APMK dan Uang Elektronik 87
5.5. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) 91
6. KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN 93
6.1 Ketenagakerjaan 94
6.2 Nilai Tukar Petani 98
6.3 Kemiskinan 100
7. PROSPEK PEREKONOMIAN 105
7.1 Pertumbuhan Ekonomi 106
7.2 Inflasi 111
7.3 Rekomendasi 112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Pengeluaran 21
Tabel 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Lapangan Usaha (% yoy)..... 29
Tabel 1. 3 Kebijakan Pemerintah Terkait Penjualan dan Pengetatan Ekspor CPO dan Turunannya 31
Tabel 2. 1 Struktur APBD Provinsi Lampung 40
Tabel 2. 2 Struktur Pendapatan APBD Provinsi Lampung..... 41
Tabel 2. 3 Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Lampung 42
Tabel 2. 4 Struktur Belanja APBD Provinsi Lampung..... 44
Tabel 2. 5 Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung TW I-Tahun 2022 45
Tabel 2. 6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah Negara 47
Tabel 2. 7 Laporan Arus Kas Keluar di Provinsi Lampung..... 48
Tabel 3. 1 5 Komoditas Inflasi & Deflasi Januari 2022 51
Tabel 3. 2 5 Komoditas Inflasi & Deflasi Februari 22..... 52
Tabel 3. 3 5 Komoditas Inflasi & Deflasi Maret 22..... 53
Tabel 3. 4 Inflasi Bulanan Menurut Kelompok (% mtm)..... 53
Tabel 3. 5 Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok (% yoy) 54
Tabel 3. 6 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Makanan, Minuman Non Alkohol & Tembakau (% yoy)..... 54
Tabel 3. 7 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Pendidikan (% yoy) 55
Tabel 3. 8 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran (% yoy)..... 56
Tabel 3. 9 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)..... 56
Tabel 3. 10 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Transportasi (% yoy) 56
Tabel 3. 11 Sumbangan Inflasi & Deflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Komunikasi..... 57
Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Bank Umum Provinsi Lampung..... 75
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Bank Syariah Provinsi Lampung 78
Tabel 6. 1 Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung . 95
Tabel 6. 2 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung 97
Tabel 6. 3 Penduduk yang terdampak COVID-19 di Provinsi Lampung Triwulan I - 2022 98
Tabel 6. 4 Daftar Komoditi yang Memberi Pengaruh pada GK September 2021 101
Tabel 6. 5 Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I 2022.....103
Tabel 6. 6 Penyaluran Program Sembako Posisi Triwulan I 2021 103
Tabel 6. 7 Penyerapan Program Sembako Posisi Triwulan I 2021 104
Tabel 7. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia 106
Tabel 7. 2 Tendensi Arah Inflasi dan Faktor 112

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 PDRB Provinsi Lampung 20
Grafik 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera, dan Lampung 20
Grafik 1. 3 Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi Lampung 21
Grafik 1. 4 Mobilitas Masyarakat Lampung 22
Grafik 1. 5 Perkembangan Program Vaksinasi 22
Grafik 1. 6 Indeks Keyakinan Konsumen 22
Grafik 1. 7 Kredit Konsumsi 23
Grafik 1. 8 Nilai Tukar Petani 23
Grafik 1. 9 Perkembangan Investasi Hasil Laison 24
Grafik 1. 10 Perkembangan Investasi Hasil SKDU 24
Grafik 1. 11 Perkembangan Ekspor Luar Negeri 25
Grafik 1. 12 Perkembangan Ekspor Bahan Bakar Mineral 25
Grafik 1. 13 Perkembangan Harga Batu Bara Internasional 25
Grafik 1. 14 Perkembangan Ekspor Kopi, Teh, dan Rempah-rempah 26
Grafik 1. 15 Perkembangan Harga Kopi Robusta Internasional 26
Grafik 1. 16 Perkembangan Ekspor Olahan Buah-buahan/Sayuran 26
Grafik 1. 17 Perkembangan Harga Lada Internasional 26
Grafik 1. 18 Perkembangan Ekspor Lemak dan Minyak Hewan/Nabati 26
Grafik 1. 19 Perkembangan Harga *Crude Palm Oil* Internasional 26
Grafik 1. 20 Pangsa Kelompok Ekspor Non-Migas 27
Grafik 1. 21 Negara Tujuan Ekspor 27
Grafik 1. 22 Perkembangan Impor Luar Negeri 28
Grafik 1. 23 Perkembangan Impor Bahan Baku Penolong 28
Grafik 1. 24 Perkembangan Impor Barang Konsumsi 28
Grafik 1. 25 Perkembangan Impor Barang Modal 28
Grafik 1. 26 Pangsa Impor Provinsi Lampung 28
Grafik 1. 27 Negara Asal Impor 28
Grafik 1. 28 Pangsa PDRB Lapangan Usaha 30
Grafik 1. 29 Harga Pupuk Internasional 30
Grafik 1. 30 Perkembangan Nilai Tukar Petani per Subsektor 31
Grafik 1. 31 Kredit Pertanian 31
Grafik 1. 32 Penjualan Listrik Industri 31
Grafik 1. 33 Impor Gula dan Kembang Gula 32
Grafik 1. 34 SBT Realisasi Tenaga Kerja LU Industri Pengolahan 32
Grafik 1. 35 Kredit LU Perdagangan 33
Grafik 1. 36 Realisasi Tenaga Kerja LU Perdagangan 33
Grafik 1. 37 Perkembangan Omset Pelaku Usaha 33
Grafik 1. 38 Pertumbuhan Penjualan Kendaraan 33
Grafik 1. 39 Kredit LU Konstruksi 34
Grafik 1. 40 Pengadaan Semen 34
Grafik 1. 41 Perkembangan Volume Impor Besi dan Baja 34
Grafik 1. 42 Kredit LU Pertambangan dan Penggalian 34
Grafik 1. 43 Perkembangan Arus Penumpang Provinsi Lampung 35
Grafik 1. 44 Perkembangan Arus Barang Menggunakan Kereta Api 35

Grafik 1. 45 Kegiatan Dunia Usaha Sektor Pengangkutan 35
Grafik 1. 46 Kredit LU Informasi dan Komunikasi 36
Grafik 2. 1 Perkembangan APBD Provinsi Lampung 39
Grafik 2. 2 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Lampung 41
Grafik 2. 3 Realisasi dan Target Pendapatan APBD Provinsi Lampung 43
Grafik 2. 4 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Provinsi Lampung 43
Grafik 2. 5 Perbandingan Pangsa Komponen Anggaran Belanja Provinsi Lampung 44
Grafik 2. 6 Proporsi Anggaran Belanja Provinsi Lampung 44
Grafik 2. 7 Pangsa Anggaran Belanja Kab/Kota 46
Grafik 2. 8 Struktur Belanja APBD Kab/Kota 46
Grafik 2. 9 Realisasi Belanja per Kab/Kota Triwulan I 2022 46
Grafik 3. 1 Inflasi Lampung dan Nasional 50
Grafik 3. 2 Sumbangan Inflasi Bulanan Jan, Feb, Mar 2022 50
Grafik 3. 3 Sumbangan Inflasi Bulanan Jan 2022 51
Grafik 3. 4 Sumbangan Inflasi Bulanan Feb 2022 52
Grafik 3. 5 Sumbangan Inflasi Bulanan Mar 2022 53
Grafik 3. 6 Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional 53
Grafik 3. 7 Perkembangan Harga Beras 55
Grafik 3. 8 Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan 55
Grafik 3. 9 Perkembangan Harga Daging dan Telur 55
Grafik 3. 10 Perkembangan Harga Sayur Sayuran 55
Grafik 3. 11 Perkembangan Harga Rokok 55
Grafik 3. 12 Perkembangan Harga Bensin 57
Grafik 3. 13 Ekspektasi Perubahan Harga 3 & 6 Bulan ke Depan 58
Grafik 3. 14 Inflasi Bulanan Kota Bandar Lampung 60
Grafik 3. 15 Inflasi Tahunan Kota Bandar Lampung 60
Grafik 3. 16 Inflasi Bulanan Kota Metro 61
Grafik 3. 17 Inflasi Tahunan Kota Metro 61
Grafik 3. 18 Inflasi tahunan Kota-Kota Sumatera 62
Grafik 3. 19 Realisasi Inflasi vs Nilai Historis Inflasi 3 Tahun Terakhir 63
Grafik 3. 20 Realisasi Inflasi Februari 2022 63
Grafik 4. 1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga 68
Grafik 4. 2 Data Konfirmasi COVID-19 Provinsi Lampung 68
Grafik 4. 3 Indeks Keyakinan Konsumen 68
Grafik 4. 4 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini 69
Grafik 4. 5 Kredit Perseorangan Lampung 69
Grafik 4. 6 Indeks Ekspektasi Konsumen 6 Bulan Mendatang 69
Grafik 4. 7 LS Tingkat Upah & Tenaga Kerja 70
Grafik 4. 8 Pertumbuhan DPK Perbankan 70
Grafik 4. 9 Komposisi DPK Perbankan 70
Grafik 4. 10 Pertumbuhan DPK Perseorangan 71
Grafik 4. 11 Pertumbuhan Kredit Perseorangan 72
Grafik 4. 12 Pertumbuhan Kredit Konsumsi Perseorangan 72
Grafik 4. 13 Komposisi Kredit Konsumsi Perseorangan 72
Grafik 4. 14 Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial 72
Grafik 4. 15 LS Penjualan Domestik 73
Grafik 4. 16 Survei Kegiatan Dunia Usaha 73
Grafik 4. 17 Perkembangan Ekspor 73
Grafik 4. 18 Biaya Kontainer 74

Grafik 4. 19 Peta Iklim 74
Grafik 4. 20 Pertumbuhan Kredit Korporasi 74
Grafik 4. 21 Komposisi Penyaluran Kredit Korporasi 74
Grafik 4. 22 Rata-rata Suku Bunga Kredit Bank Umum 75
Grafik 4. 23 Perkembangan NPL Kredit Korporasi 75
Grafik 4. 24 Pertumbuhan Kredit Bank Umum 76
Grafik 4. 25 Pertumbuhan Kredit Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan 76
Grafik 4. 26 *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Umum di Provinsi Lampung 76
Grafik 4. 27 Pertumbuhan Aset Bank Umum di Provinsi Lampung 76
Grafik 4. 28 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum 77
Grafik 4. 29 *Likert Scale* Biaya 77
Grafik 4. 30 Pertumbuhan Aset, DPK & Pembiayaan Bank Syariah 78
Grafik 4. 31 Pertumbuhan DPK Bank Syariah 77
Grafik 4. 32 Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan 79
Grafik 4. 33 Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Sektoral 79
Grafik 4. 34 Perkembangan Kredit UMKM 79
Grafik 4. 35 NPL Kredit UMKM 79
Grafik 4. 36 Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi 80
Grafik 4. 37 Penyaluran KUR Berdasarkan berdasarkan skema 80
Grafik 5. 1 Perkembangan Aliran Uang Kartal Triwulanan 82
Grafik 5. 2 Mobilitas Masyarakat di Provinsi Lampung 82
Grafik 5. 3 Aliran Uang Kartal *Inflow* 83
Grafik 5. 4 Aliran Uang Kartal *Outflow* 83
Grafik 5. 5 Pertumbuhan Kredit Bank Umum Provinsi Lampung 83
Grafik 5. 6 Penukaran Uang Melalui BI 84
Grafik 5. 7 Kas Keliling 84
Grafik 5. 8 Kas Titipan 84
Grafik 5. 9 Perkembangan Pemusnahan UTLE 84
Grafik 5. 10 Temuan Uang Palsu 85
Grafik 5. 11 Pecahan Uang Palsu Tw I-2022 85
Grafik 5. 12 Perkembangan Transaksi Kliring 86
Grafik 5. 13 Perkembangan Transaksi RTGS 86
Grafik 5. 14 Perkembangan Transaksi Kartu ATM/Debit 87
Grafik 5. 15 Indeks Pengeluaran Konsumsi Barang Tahan Lama 87
Grafik 5. 16 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit 88
Grafik 5. 17 Pertumbuhan Kartu Kredit Per Jenis Transaksi (% yoy) 88
Grafik 5. 18 Pangsa Penghasilan untuk Pembayaran Cicilan (Hasil SK) 88
Grafik 5. 19 Perkembangan Dana *Float* UE 89
Grafik 5. 20 Perkembangan Transaksi UE Per Jenis Transaksi 89
Grafik 5. 21 Pangsa Transaksi UE Triwulan I 2022 89
Grafik 5. 22 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 89
Grafik 5. 23 Perkembangan Jumlah *Merchant* QRIS 90
Grafik 5. 24 Pertumbuhan *Merchant* QRIS Triwulanan 90
Grafik 5. 25 Pangsa *Merchant* QRIS di Sumatera 90
Grafik 5. 26 Perkembangan Pengguna QRIS 90
Grafik 5. 27 Target Pengguna QRIS 90
Grafik 5. 28 Transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung 92
Grafik 5. 29 Transaksi KUPVA BB Per Jenis Mata Uang 92
Grafik 5. 30 Pergerakan Kurs Nilai Tukar USD-IDR 92
Grafik 6. 1 Perkembangan Upah Minimum Lampung 95

Grafik 6. 2 Porsi Penduduk Bekerja 96
Grafik 6. 3 TPAK Menurut Tingkat Pendidikan 96
Grafik 6. 4 *Share* Tenaga Kerja 97
Grafik 6. 5 Hasil SKDU Realisasi Kegiatan Usaha Berdasarkan Sektor 97
Grafik 6. 6 NTP Provinsi Lampung dan Komponen Penyusunnya 99
Grafik 6. 7 NTP Per Sub Sektor 99
Grafik 6. 8 Indeks yang Dibayar per Sub Sektor 99
Grafik 6. 9 Indeks yang Diterima per Sub Sektor 99
Grafik 6. 10 NTP Kota-Kota di Sumatera 99
Grafik 6. 11 Pertumbuhan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) per Subsektor 99
Grafik 6. 12 Persentase Penduduk Miskin di Sumatera dibandingkan Nasional 100
Grafik 6. 13 Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Pedesaan di Lampung 100
Grafik 6. 14 Indeks Kedalaman Kemiskinan 101
Grafik 6. 15 Indeks Keparahan Kemiskinan 101
Grafik 6. 16 Koefisien Gini Lampung dan Nasional 101
Grafik 7. 1 Perkembangan Vaksinasi di Provinsi Lampung 107
Grafik 7. 2 Perkembangan Ekspektasi Konsumen 108
Grafik 7. 3 Perkembangan Ekspektasi Pelaku Usaha Terhadap Harga Jual Produk Utama 108

(Halaman Sengaja Dikosongkan)

INFOGRAFIS LAPORAN PEREKONOMIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TW I 2022

PERTUMBUHAN EKONOMI

Tw IV 2021 **5,15** %(yoy)

Tw I 2022 **2,96** %(yoy)

KONSUMSI RUMAH TANGGA
Tw IV 2021 **3,70** %(yoy)

KONSUMSI RUMAH TANGGA
Tw I 2022 **4,05** %(yoy)

Perekonomian Lampung tumbuh sebesar 2,96% (yoy) pada triwulan I 2022, melambat jika dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang tumbuh sebesar 5,15% (yoy). Pertumbuhan positif tersebut didorong oleh kinerja komponen Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh dengan kuat (4,05%; yoy).

PERKEMBANGAN INFLASI

INFLASI TAHUNAN KELOMPOK BAHAN MAKANAN
Tw IV 2021 **5,37** %(yoy)

INFLASI TAHUNAN KELOMPOK BAHAN MAKANAN
Tw I 2022 **3,74** %(yoy)

Tw IV 2021 **2,19** %(yoy)

Adapun inflasi Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 tercatat berada pada rentang sasaran Inflasi yaitu sebesar 2.43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 2,19% (yoy).

Tw I 2022 **2,43** %(yoy)

KEUANGAN PEMERINTAH

% REALISASI PENDAPATAN

TW I 2021	TW I 2022
APBD Provinsi Lampung	
13,79% ↑	18,87%

% REALISASI BELANJA

TW I 2021	TW I 2022
APBD Provinsi Lampung	
11,32% ↓	7,24%

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

INFOGRAFIS LAPORAN PEREKONOMIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TW I 2022

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

TUNAI

TW IV 2021		TW I 2022
Inflow		Inflow
3,51	(Rp Triliun)	3,40
Outflow		Outflow
3,89	(Rp Triliun)	1,46
Net Flow		Net Flow
-0,39	(Rp Triliun)	1,94

NON-TUNAI

TW IV 2021		TW I 2022
Nominal Kliring (Debet+Kredit)		
7,74	(Rp Triliun)	6,59
Volume Kliring (Debet+Kredit)		
140,19	(Ribu Lembar)	116,18
Nominal RTGS		
27,37	(Rp Triliun)	18,15
Volume RTGS		
19,56	(Ribu Lembar)	32,55

STABILITAS KEUANGAN DAERAH

PERTUMBUHAN KREDIT PERSEORANGAN

TW IV '21	TW I '22
8,55 %(yoy)	9,44 %(yoy)

*) Lokasi Bank

PERTUMBUHAN KREDIT KORPORASI

TW IV '21	TW I '22
1,13 %(yoy)	0.70 %(yoy)

*) Lokasi Bank

PERTUMBUHAN KREDIT UMKM

TW IV '21	TW I '22
17,67 %(yoy)	23,73 %(yoy)

*) Lokasi Bank

Berdasarkan Lokasi Bank

	PERTUMBUHAN KREDIT	PERTUMBUHAN KREDIT MODAL KERJA	PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI	PERTUMBUHAN KREDIT KONSUMSI
TW IV '21	6,03 (%,yoy)	10,67 (%,yoy)	-0,51 (%,yoy)	2,59 (%,yoy)
TW I '22	5,66 (%,yoy)	8,61 (%,yoy)	2,79 (%,yoy)	2,70 (%,yoy)

	PERTUMBUHAN DPK	PERTUMBUHAN ASET (Aset Bersih)	NPL (gross)	LDR
TW IV '21	9,98 (%,yoy)	10,17 (%,yoy)	5,00 (%)	119,58 (%)
TW I '22	9,87 (%,yoy)	11,27 (%,yoy)	4,70 (%)	118,34 (%)

Berdasarkan Lokasi Proyek

	PERTUMBUHAN KREDIT	PERTUMBUHAN KREDIT MODAL KERJA	PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI	PERTUMBUHAN KREDIT KONSUMSI
TW IV '21	6,09 (%,yoy)	6,73 (%,yoy)	9,37 (%,yoy)	1,51 (%,yoy)
TW I '22	9,27 (%,yoy)	11,01 (%,yoy)	11,73 (%,yoy)	3,66 (%,yoy)

	NPL
TW IV '21	3,16 (%)
TW I '22	2,93 (%)

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

ANGKATAN KERJA (Juta Orang)

Februari 2021	Agustus 2021	Februari 2022
4,62	4,50	4,97

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (Persen)

Februari 2021	Agustus 2021	Februari 2022
4,54	4,69	4,31

KEMISKINAN (Persen)

September 2020	Maret 2021	September 2021
12,76	12,62	11,67

TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI LAMPUNG

Inflasi dan PDRB

Indikator	2019				2019	2020				2020	2021				2021	2022
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
Indeks Harga Konsumen (IHK)																
Bandar Lampung	135.49	138.40	139.30	139.92		105.25	104.81	105.32	106.36		107.14	107.26	106.92	108.63		109.61
Metro	139.80	141.89	142.64	143.58		105.36	105.02	105.30	106.31		106.83	107.43	107.29	109.22		110.54
Gabungan	136.12	138.91	139.79	140.46		105.26	104.83	105.32	106.36		107.11	107.28	106.96	108.69		109.71
Laju Inflasi (yoy)																
Bandar Lampung	1.57	2.81	3.68	3.53		3.13	1.29	1.24	1.93		1.80	2.34	1.52	2.13		2.30
Metro	1.06	2.49	3.07	2.97		3.96	2.51	2.25	2.53		1.40	2.30	1.89	2.73		3.47
Gabungan	1.48	2.76	3.59	3.45		3.22	1.42	1.35	2.00		1.75	2.34	1.56	2.19		2.43
Pertumbuhan PDRB (yoy)	5.18	5.57	5.14	5.05	5.24	1.71	(3.59)	(2.41)	(2.25)	(1.67)	(1.19)	5.12	3.00	5.15	2.79	2.96
PDRB - Harga Konstan (Miliar Rp)	59,344.06	62,255.70	64,088.64	58,689.90	244,378.31	60,356.54	60,019.97	62,546.38	57,370.69	240,293.59	59,157.54	63,094.75	64,425.54	60,323.84	247,001.67	60,905.95
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	17,395.71	18,195.08	18,258.36	14,012.58	67,860.65	16,909.86	18,495.96	18,836.39	14,482.09	68,285.20	16,631.74	18,557.69	18,524.57	14,323.69	68,037.70	16,631.74
Pertambangan & Penggalian	3,528.38	3,499.92	3,510.53	3,514.89	14,053.72	3,475.42	3,422.49	3,468.26	3,232.22	13,561.77	3,220.30	3,251.41	3,152.25	3,193.01	12,816.98	3,220.30
Industri Pengolahan	10,739.01	11,770.39	12,624.67	11,669.56	46,803.31	10,890.62	10,295.86	11,352.44	12,613.71	44,324.68	10,960.04	11,122.28	12,165.10	12,090.23	46,337.64	10,960.04
Pengadaan Listrik, Gas	106.90	107.86	110.09	110.64	435.49	110.59	105.74	111.41	113.35	432.00	96.15	94.87	105.03	106.57	402.62	96.15
Pengadaan Air	59.25	60.49	61,427.17	61,713.11	242.88	62.10	62.98	65.19	69.07	255.16	64.80	67.09	69.90	71.09	272.88	64.80
Konstruksi	5,665.18	5,819.08	6,269.08	6,415.78	24,169.12	5,900.25	5,688.38	5,894.00	6,357.30	23,673.61	6,215.46	6,188.08	6,360.62	6,554.63	25,318.79	6,215.46
Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil & Sepeda	7,372.76	7,659.37	7,809.89	7,452.22	30,294.24	7,570.33	6,868.78	7,122.36	7,238.87	28,273.12	7,125.24	7,781.44	7,855.28	7,850.63	30,612.59	7,125.24
Transportasi & Pergudangan	3,068.05	3,329.57	3,201.56	3,299.36	12,898.54	3,292.32	2,889.32	3,119.02	3,000.00	12,174.48	2,813.76	3,176.67	3,163.96	3,296.56	12,450.95	2,813.76
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	856.12	907.70	949.22	950.36	3,663.40	940.63	842.89	870.50	835.75	3,479.86	821.38	863.73	846.75	894.28	3,426.13	821.38
Informasi & Komunikasi	2,855.75	2,991.19	3,137.72	3,039.55	12,024.21	3,045.53	3,321.19	3,324.64	3,511.00	12,988.46	3,293.66	3,593.31	3,617.80	3,284.47	13,789.24	3,293.66
Jasa Keuangan	1,184.31	1,190.99	1,271.27	1,274.23	4,920.80	1,263.76	1,216.11	1,293.49	1,383.92	5,105.27	1,282.23	1,302.31	1,309.42	1,313.49	5,207.45	1,282.23
Real Estate	1,815.27	1,837.08	1,905.53	1,901.73	7,459.61	1,919.97	1,805.38	1,804.59	1,844.36	7,330.19	1,799.59	1,808.26	1,874.80	1,943.86	7,426.51	1,799.59
Jasa Perusahaan	82.51	83.84	84,024.77	84,198.35	334.57	85.47	80.21	83.10	83.07	329.78	79.09	83.59	82.52	88.04	333.25	79.09
Administrasi Pemerintahan,Pertahanan, dan Jaminan Sosial	1,805.00	1,881.15	1,885.95	1,892.34	7,462.75	1,874.41	1,982.39	2,014.19	2,038.90	7,829.86	1,774.08	2,137.12	2,108.33	2,139.71	8,159.23	1,774.08
Jasa Pendidikan	1,694.12	1,784.27	1,814.97	1,810.58	7,103.94	1,815.69	1,863.66	1,929.73	1,909.11	7,396.83	1,786.41	1,864.23	1,942.34	1,893.91	7,486.89	1,786.41
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	583.26	589.66	611.21	617.65	2,401.79	628.27	608.17	722.36	752.44	2,664.65	646.48	669.15	731.79	720.86	2,768.28	646.48
Jasa Lainnya	550.04	572.17	591.72	593.83	2,307.76	609.33	506.70	539.13	559.79	2,201.94	547.14	533.52	515.06	558.81	2,154.52	547.14
Nilai Ekspor Non Migas (Juta USD)	730.35	654.07	743.30	799.00	2,926.72	683.69	641.92	767.99	1,055.36	3,148.95	975.23	1,021.92	1,429.21	1,414.80	4,841.16	1,249.59
Volume Ekspor (Ribu Ton)	3,591.41	2,913.58	2,821.55	2,976.73	12,303.27	2,271.06	246.26	246.50	396.06	11,159.24	2,272.85	2,874.27	4,110.07	3,836.05	13,093.24	2,509.16
Nilai Impor (Juta USD)	223.72	239.40	285.01	279.14	1,027.26	224.08	262.82	238.98	173.99	899.87	382.70	444.83	344.30	223.49	1,395.31	311.31
Volume Impor (Ribu Ton)	416.80	451.45	468.72	464.95	1,801.92	414.39	609.62	438.27	303.37	1,765.65	766.90	641.07	401.55	341.98	2,151.50	493.88

Sistem Pembayaran

Indikator Makro	2017				2018				2019				2020				2021				2022
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Inflow (Triliun Rp)	2.59	1.95	4.82	2.77	3.57	3.55	3.81	2.49	3.97	5.31	4.22	3.55	4.94	4.12	3.36	2.74	4.74	4.57	1.91	3.51	3.40
Outflow (Triliun Rp)	1.74	5.87	2.00	3.83	2.38	6.40	2.06	2.88	2.48	6.45	3.11	3.73	3.12	3.59	3.64	3.53	1.81	4.89	1.49	3.89	1.46
Pemusnahan Uang (Triliun Rp)	0.90	0.46	1.56	0.94	1.28	0.15	1.56	1.06	1.35	1.14	1.92	1.59	1.50	1.11	1.52	0.90	1.14	1.41	0.61	0.94	1.15
Nominal Transaksi RTGS (Triliun Rp)	6.16	8.22	6.76	7.25	3.90	5.74	5.94	5.32	58.14	57.59	47.43	29.09	21.14	33.77	29.46	23.11	23.64	31.15	25.23	27.37	18.15
Volume Transaksi RTGS (Lembar)	5,143	5,674	6,022	5,414	4,752	5,090	5,642	5,062	12,166	10,212	13,072	13,360	11,166	14,507	22,485	20,291	17,250	21,471	21,501	19,545	32,551
Rata-Rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Triliun Rp)	100.356	143.434	115.835	118.314	63.880	106.152	96.479	84.466	953.112	928.924	718.615	440.705	346.632	553.641	482.981	378.787	387.541	510.721	413.557	421.108	297.541
Rata-Rata Harian Volume Transaksi RTGS (Lembar)	83	98	102	87	77	93	91	80	199	165	198	202	183	238	369	333	283	352	352	301	534
Volume Kliring Kredit (Lembar)	87,669	92,509	102,248	97,573	92,838	90,732	100,766	89,924	75,536	77,239	86,063	87,628	74,441	69,549	84,391	86,255	76,428	83,062	77,742	83,506	64,283
Nominal Kliring Kredit (Triliun Rp)	4.21	4.15	4.42	4.49	4.15	4.21	4.74	4.42	3.75	3.93	4.70	5.16	4.13	3.64	4.23	4.72	4.26	4.70	4.69	5.04	4.03
Rata-Rata Harian Volume Kliring Kredit (Lembar)	1,584	1,595	1,633	1,574	1,505	1,650	1,625	1,427	1,238	1,246	1,304	1,328	1,220	1,140	1,383	1,438	1,253	1,362	1,274	1,285	1,054
Rata-Rata Harian Nominal Kliring Kredit (Miliar Rp)	67.89	71.56	74.94	72.47	66.96	76.46	76.45	70.12	61.40	63.39	71.21	78.18	67.64	59.66	69.35	78.71	69.84	76.99	76.81	77.56	66.06
Volume Kliring Debet (Lembar)	146,225	113,157	111,919	114,273	102,687	93,244	97,886	98,454	88,668	83,640	91,062	85,788	78,118	66,936	72,085	71,358	64,174	56,953	56,819	56,684	51,895
Nominal Kliring Debet (Triliun Rp)	6.10	4.55	5.03	4.63	4.25	4.06	4.46	4.32	3.89	3.91	4.12	3.64	3.31	3.14	3.13	3.02	2.88	2.77	2.79	2.70	2.56
Rata-Rata Harian Volume Kliring Debet (Lembar)	2,429	1,951	1,997	1,843	1,656	1,695	1,579	1,563	1,454	1,349	1,380	1,300	1,281	1,097	1,182	1,189	1,052	934	931	872	851
Rata-Rata Harian Nominal Kliring Debet (Miliar Rp)	98.34	78.51	85.17	74.62	68.60	73.88	71.98	68.60	63.70	63.06	62.42	55.15	54.26	51.54	51.35	50.36	47.21	45.39	45.75	41.53	41.97

Perbankan

Indikator Perbankan	2017				2018				2019				2020				2021				2022
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Bank Umum																					
Total Aset (Triliun Rp)	56.23	60.85	61.42	60.21	61.88	64.40	64.44	63.86	64.79	69.03	69.23	65.72	63.61	65.11	67.67	65.55	66.47	69.07	70.25	72.21	73.96
Pertumbuhan Total Aset (%yoy)	8.43	13.78	14.55	11.00	10.06	5.83	4.92	6.06	4.70	7.18	7.43	2.91	-1.82	-5.67	-2.25	-0.26	4.49	6.07	3.81	10.17	11.27
Pertumbuhan DPK (%yoy)	11.28	13.79	12.16	9.04	6.42	6.85	8.07	7.75	8.93	8.77	7.22	4.83	1.25	1.32	4.58	7.61	9.61	8.57	6.85	9.14	9.10
DPK (Triliun Rp)	36.2	38.26	38.18	38.04	38.52	40.88	41.26	40.99	41.96	44.47	44.24	42.97	42.49	45.06	46.27	46.24	46.57	49.28	49.67	50.89	51.23
Giro	7.49	8.04	7.6	5.61	7.73	8.49	7.99	5.97	7.89	8.72	8.45	6.51	7.80	8.94	8.56	6.60	8.21	9.16	9.23	7.88	9.30
Tabungan	19.47	20.78	21.08	23.02	21.05	22.47	22.97	24.44	22.78	24.27	24.32	25.56	23.81	25.28	26.89	28.72	27.60	29.38	29.85	32.27	30.94
Deposito	9.24	9.56	9.64	9.39	9.73	9.93	10.30	10.59	11.28	11.47	11.47	10.89	10.88	10.84	10.82	10.92	10.76	10.74	10.59	10.74	10.99
Pertumbuhan Kredit (%yoy)	9.47	11.03	9.39	9.22	9.17	5.24	6.13	4.60	4.74	5.00	5.72	1.70	2.14	-1.41	-0.24	3.01	2.87	6.63	5.77	6.03	
Kredit (Triliun Rp) - Berdasarkan Jenis Penggunaan	47.76	50.75	50.59	52.38	52.14	53.41	53.69	54.79	54.61	56.08	56.76	55.72	55.78	55.29	56.62	57.40	57.38	58.96	59.89	60.86	60.63
Modal Kerja (Triliun Rp)	24.26	25.22	24.77	25.70	25.07	26.24	26.19	26.82	26.35	27.25	27.82	27.02	26.98	26.74	27.99	28.65	28.58	30.04	30.96	31.71	31.04
Investasi (Triliun Rp)	10.49	11.84	12.12	12.13	12.06	12.21	12.22	12.13	12.17	12.39	12.02	11.51	11.38	11.24	11.15	10.99	10.86	10.86	10.83	10.94	11.16
Konsumsi (Triliun Rp)	13.01	13.70	13.68	14.54	15.00	14.97	15.28	15.84	16.08	16.44	16.92	17.19	17.42	17.31	17.48	17.76	17.94	18.06	18.10	18.22	18.43
LDR	131.95	132.64	132.48	137.71	135.35	130.65	130.11	133.66	130.14	126.12	128.29	129.69	131.28	122.72	122.38	124.12	123.22	119.64	120.58	119.58	118.34
Kredit UMKM (Triliun Rp)	17.04	15.80	15.77	16.45	16.37	16.85	17.27	17.49	17.78	18.53	18.93	19.06	19.47	19.25	19.46	19.60	19.56	20.07	20.76	23.07	24.21
Pertumbuhan Kredit UMKM (%yoy)	16.39	1.74	3.89	5.31	-3.93	6.65	9.51	6.32	8.61	9.97	9.61	8.98	9.52	3.90	2.80	2.86	0.46	4.25	6.69	17.67	23.73
Total Kredit MKM (Triliun Rp)	28.68	29.23	29.35	30.29	30.64	30.98	31.61	32.37	32.89	33.58	34.53	34.99	35.46	35.00	35.88	36.91	37.55	38.34	39.06	39.89	41.14
Pertumbuhan Kredit MKM (%yoy)	5.61	4.03	4.88	6.45	6.85	5.99	7.70	6.87	7.34	8.39	9.24	8.09	7.81	4.22	3.92	5.49	5.88	9.54	8.86	8.08	9.57
NPL (%) gross	2.74	2.69	2.43	1.96	2.33	2.36	2.44	2.32	2.67	2.69	2.25	2.82	2.94	2.79	2.75	2.49	5.52	5.49	5.36	5.00	4.70

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perekonomian Lampung tumbuh sebesar 2,96% (yoy) pada triwulan I 202, melambat jika dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang tumbuh sebesar 5,15% (yoy)...

Pemulihan ekonomi Lampung terus berlanjut pada triwulan I 2022 seiring dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19. Secara umum, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 2,96% (yoy) pada triwulan I 2022, mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 yang tumbuh sebesar 5,15% (yoy). Meskipun demikian, realisasi pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I 2020 yang terkontraksi sebesar 1,99% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Lampung ditopang oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditengah berlanjutnya kinerja ekspor yang termoderasi. Peningkatan kinerja Konsumsi RT sejalan dengan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung seiring dengan berlanjutnya akselerasi vaksinasi pada triwulan I 2022. Selanjutnya, kinerja investasi (PMTB) tumbuh 2,77% (yoy) dan turut menopang kinerja perekonomian secara keseluruhan, meski tidak sebesar periode sebelumnya yang tercatat sebesar 6,41% (yoy). Pertumbuhan positif PMTB tersebut sejalan dengan peningkatan realisasi belanja modal APBD untuk bangunan, infrastruktur jalan, dan irigasi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan kinerja Konsumsi RT dan investasi pada triwulan I 2022 terkonfirmasi dari kinerja lapangan usaha (LU) utama, yakni LU Perdagangan Besar dan Eceran (12,46% PDRB) dan Konstruksi (10,30% PDRB) yang masing-masing tumbuh sebesar 15,11% (yoy) dan 5,04% (yoy). Pertumbuhan kedua LU tersebut sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat seiring terkendalinya penyebaran COVID-19 varian Omicron, di mana rerata mobilitas masyarakat pada triwulan I 2022 tumbuh 17,85% lebih tinggi terhadap rerata Januari 2020. Sejalan dengan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran yang tetap kuat, pada triwulan I 2022, LU Transportasi dan Pergudangan juga tercatat tumbuh sebesar 17,03% (yoy). Di sisi lain, perbaikan kinerja perekonomian Provinsi Lampung dari sisi LU tertahan oleh terkontraksinya kinerja LU Pertambangan dan Penggalian, LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan.

Realisasi anggaran belanja pemerintah Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, disebabkan lebih rendahnya realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Hibah...

Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Raperda Anggaran Tahun 2022, alokasi APBD Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp6,56 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,01 triliun untuk anggaran belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan terkait relaksasi pendapatan retribusi tetap dilanjutkan sebagai upaya pemulihan di masa pandemi Covid-19. Penurunan belanja fiskal didorong oleh penurunan belanja modal dan hibah, meski di sisi lain terdapat peningkatan belanja modal pemerintah untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi untuk mendukung upaya perbaikan ekonomi yang terdampak Covid 19 selama tahun 2021.

Memasuki triwulan I 2022, realisasi penyerapan anggaran pendapatan APBD Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp1,24 triliun atau mencapai 18,87% dari target penerimaan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp6,56 triliun. Sedangkan pada sisi belanja daerah, realisasi penyerapan anggaran belanja APBD Provinsi Lampung mencapai Rp507,40 miliar atau sebesar 7,4% dari target anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp7,01 triliun. Pencapaian ini secara nominal maupun persentase lebih tinggi dari realisasi triwulan I 2021 di sisi pendapatan meski lebih rendah di sisi belanja daerah.

Dari sisi Penerimaan Negara, pada triwulan I 2022 Provinsi Lampung mencatatkan adanya kenaikan penerimaan sebesar 18,18% (yoy) atau sebesar Rp1,24 triliun yang bersumber dari penerimaan dari pendapatan asli daerah (54%) dan pendapatan transfer (48%). Sedangkan dari sisi pengeluaran, realisasi belanja sampai dengan triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp507,4 miliar, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komponen utama penyumbang realisasi belanja adalah belanja modal dan belanja operasi.

Secara bulanan (mtm), rerata indeks harga konsumen Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,31% (mtm), melambat dibandingkan rata-rata triwulan IV 2021 (0,54%; mtm). Secara umum, melambatnya tekanan inflasi disebabkan oleh normalisasi permintaan pasca momen HBKN Natal dan Tahun Baru…

Inflasi

Rata-rata indeks harga konsumen Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 secara bulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,31% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata triwulan IV 2021 yang mencatat inflasi sebesar 0,54% (mtm). Secara umum, tekanan inflasi di triwulan I 2022 didorong oleh meningkatnya permintaan menjelang masuknya bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1443 H. Pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan di tengah berlanjutnya kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) dunia menyebabkan kenaikan harga komoditi dimaksud. Selain itu, meningkatnya harga beberapa komoditas dunia turut mendorong peningkatan tekanan inflasi pada kelompok pangan bergejolak. Selain itu, belum masuknya masa panen dan tingginya curah hujan turut mengganggu ketersediaan pasokan komoditas strategis.

Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 tercatat pada rentang sasaran Inflasi yaitu sebesar 2.43% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya 2,19% (yoy). Adapun pencapaian tersebut terpantau lebih rendah jika dibandingkan

dengan inflasi tahunan Nasional dan Sumatera yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 2,64% (yoy) dan 3,11% (yoy). Tekanan Inflasi IHK Provinsi Lampung di triwulan I 2022 ini terutama di dorong oleh meningkatnya tekanan inflasi pada komoditas minyak goreng akibat peningkatan harga komoditas CPO dunia. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2022 disumbang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,31% dengan nilai inflasi 4,45% (yoy).

Menghadapi tekanan inflasi pada triwulan I 2022, TPID tetap berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan menjajaki Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbauan untuk berbelanja secara bijak.

Kinerja sektor rumah pada triwulan I 2022 mengalami peningkatan, sejalan dengan relaksasi pembatasan mobilitas penduduk, Sementara itu, kinerja korporasi Lampung pada triwulan I 2022 tetap kuat sejalan dengan peningkatan permintaan domestik...

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan UMKM

Kinerja sektor rumah tangga mengalami peningkatan pada triwulan I 2021 sejalan dengan relaksasi pembatasan mobilitas penduduk untuk mencegah varian Omicron Covid-19. Bertahannya kinerja konsumsi rumah tangga pada periode laporan terkonfirmasi dari stabilnya keyakinan konsumen terhadap perkembangan ekonomi pada triwulan berjalan yang tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE). Sementara itu, kinerja korporasi Lampung pada triwulan I 2022 tumbuh positif sejalan dengan peningkatan permintaan domestik. Peningkatan kinerja korporasi berasal dari peningkatan kinerja sektor pengolahan dan perdagangan.

Secara umum, indikator utama kinerja Bank Umum (berdasarkan lokasi bank) di Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 menunjukkan perbaikan sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi. Di sisi lain, kinerja perbankan syariah pada triwulan I 2021 melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selanjutnya, dukungan perbankan Lampung pada UMKM di triwulan I 2022 mengalami peningkatan dengan kualitas kredit yang relatif terjaga dibawah threshold 5%.

Pada triwulan I 2022, aliran uang kartal di Provinsi Lampung tercatat net inflow dengan nominal sebesar Rp1,94 triliun.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan I 2022, aliran uang kartal di Provinsi Lampung mengalami net *inflow* sebesar Rp1,94 triliun. Perkembangan

Secara umum, kondisi tersebut terpantau sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang pada triwulan I 2022 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni sebesar 2,96% (yoy)..

tersebut sejalan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi pada periode laporan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, nominal transaksi pembayaran baik melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) mencatatkan pertumbuhan yang melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Demikian halnya dengan kinerja penggunaan kartu kredit yang tumbuh positif meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan perubahan kebiasaan masyarakat dalam berbelanja masih terjadi di tengah berbagai pembatasan sosial. Di tengah pembatasan sosial selama triwulan I 2022, masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas berbelanja dengan memanfaatkan pembayaran secara online.

Sebagai upaya untuk lebih memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara digital, Bank Indonesia telah meluncurkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sejak tahun 2019 sebagai suatu inovasi yang dapat menyatukan transaksi berbagai macam QR dari berbagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Sampai dengan bulan Maret 2022, tercatat sudah sebanyak 232.227 pengguna/user QRIS, atau sebesar 20,21% dari jumlah yang ditargetkan di Provinsi Lampung dalam rangka mendukung capaian target nasional sebanyak 15 juta pengguna QRIS.

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2022 secara umum cenderung mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercermin dari kenaikan TPAK sebesar 0,78% per Februari 2022...

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2022 secara umum cenderung mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercermin dari kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,78% per Februari 2022. Kenaikan ini terutama didukung oleh bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,76 juta pekerja (7,87%), mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 0,96% (qtq) dibanding triwulan IV 2021 dan meningkat 2,96% dibanding triwulan I 2021 (yoy). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Februari 2022 tercatat terkontraksi sebesar 0,23% menjadi 4,31%. Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT nasional pada Februari 2022 yang sebesar 5,83%.

Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan I 2022 mencapai 28,19. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 42,54%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 19,21%. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga triwulan I 2022 memiliki dampak langsung terhadap ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, dimana terdapat 340,6 ribu orang penduduk yang terdampak. Jika dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya (Agustus 2021), terdapat penurunan tenaga kerja yang terdampak sebesar 99,9 ribu orang atau sebesar 22,68%.

Sementara itu, kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian relatif membaik. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 107,77; mengalami kenaikan dibanding triwulan IV 2021 (2,28).

Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (11,67%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,71%, dan berada pada posisi tertinggi ke-4 di Sumatera. Secara nominal, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 1,01 juta jiwa pada September 2021.

Secara keseluruhan tahun 2022, perekonomian Lampung diprakirakan berada pada kisaran 4,0%–4,8%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2021 yang tumbuh sebesar 2,79%...

Prospek Ekonomi

Pada tahun 2022, pemulihan ekonomi Provinsi Lampung diperkirakan terus berlanjut, yakni pada kisaran 4,0%–4,8%, meski lebih rendah jika dibandingkan prakiraan sebelumnya (4,5%–5,3%). Kinerja perekonomian ke depan akan didorong oleh daya beli masyarakat yang terus mengalami perbaikan dan mendorong peningkatan komponen permintaan domestik seiring dengan terkendalinya penyebaran COVID-19 varian Omicron. Hal tersebut didukung oleh akselerasi program vaksinasi yang terus berlanjut. Meski demikian, revisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2022 disebabkan oleh pertumbuhan produksi Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Industri Pengolahan yang diperkirakan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.

Prospek inflasi pada tahun 2022 diperkirakan masih pada kisaran target 3,0%±1% (yoy), meski dengan tendensi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021...

Prospek inflasi pada tahun 2022 diperkirakan tetap pada kisaran target 3,0%±1% (yoy), meski dengan tendensi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 sebagai dampak dari peningkatan eskalasi tensi geopolitik Rusia dan Ukraina. Pendorong tekanan inflasi di tahun 2022 diantaranya bersumber dari kelompok *Volatile Food*, yaitu tren harga pupuk, gandum, kedelai, dan jagung dunia diperkirakan akan pada level yang tinggi, sehingga berpotensi mendorong tekanan inflasi dari sisi supply. Kelompok *Administered Prices* diprakirakan akan turut meningkat dibandingkan 2021 didorong oleh kenaikan tarif cukai rokok serta peningkatan harga BBM dan LPG seiring dengan kenaikan harga energi dunia. Peningkatan permintaan yang berasal dari perbaikan demand masyarakat seiring dengan optimisme menurunnya penyebaran COVID-19 di 2022 diperkirakan juga menjadi salah satu pendorong inflasi inti 2022 terutama jika tidak diimbangi dengan kecepatan sisi supply dalam merespon kenaikan *demand*.

BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

- *Pemulihan ekonomi Lampung terus berlanjut pada triwulan I 2022 seiring dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19. Secara umum, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 2,96% (yoy) pada triwulan I 2022, mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 yang tumbuh sebesar 5,15% (yoy). Meskipun demikian, realisasi pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I 2020 yang terkontraksi sebesar 1,99% (yoy).*
- *Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Lampung ditopang oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditengah berlanjutnya kinerja ekspor yang termoderasi. Peningkatan kinerja Konsumsi RT sejalan dengan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung seiring dengan berlanjutnya akselerasi vaksinasi pada triwulan I 2022. Selanjutnya, kinerja investasi (PMTB) tumbuh 2,77% (yoy) dan turut menopang kinerja perekonomian secara keseluruhan, meski tidak sebesar periode sebelumnya yang tercatat sebesar 6,41% (yoy). Pertumbuhan positif PMTB tersebut sejalan dengan peningkatan realisasi belanja modal APBD untuk bangunan, infrastruktur jalan, dan irigasi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.*
- *Peningkatan kinerja Konsumsi RT dan investasi pada triwulan I 2022 terkonfirmasi dari kinerja lapangan usaha (LU) utama, yakni LU Perdagangan Besar dan Eceran (12,46% PDRB) dan Konstruksi (10,30% PDRB) yang masing-masing tumbuh sebesar 15,11% (yoy) dan 5,04% (yoy). Pertumbuhan kedua LU tersebut sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat seiring terkendalinya penyebaran COVID-19 varian Omicron, di mana rerata mobilitas masyarakat pada triwulan I 2022 tumbuh 17,85% lebih tinggi terhadap rerata Januari 2020. Sejalan dengan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran yang tetap kuat, pada triwulan I 2022, LU Transportasi dan Pergudangan juga tercatat tumbuh sebesar 17,03% (yoy). Di sisi lain, perbaikan kinerja perekonomian Provinsi Lampung dari sisi LU tertahan oleh terkontraksinya kinerja LU Pertambangan dan Penggalian, LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan.*

Pemulihan ekonomi Lampung terus berlanjut pada triwulan I 2022 seiring dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19. Secara umum, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 2,96% (yoy) pada triwulan I 2022, mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 yang tumbuh sebesar 5,15% (yoy) (Grafik 1.1). Meskipun demikian, realisasi pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I 2020 yang terkontraksi sebesar 1,99% (yoy).

Kinerja positif perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 terutama didorong oleh permintaan domestik yang meningkat dengan kuat di tengah berlanjutnya moderasi pertumbuhan sektor eksternal dan terkontraksinya produksi Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Industri Pengolahan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2022 tercatat lebih rendah dibandingkan realisasi di level Sumatera dan Nasional yang masing-masing tumbuh 4,03% (yoy) dan 5,01% (yoy) (Grafik 1.2). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan I 2022 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp94,79 triliun dan Rp60,91 triliun.

Grafik 1.1 PDRB Provinsi Lampung

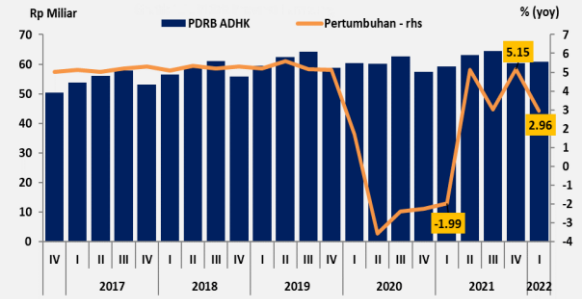

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera, dan Lampung

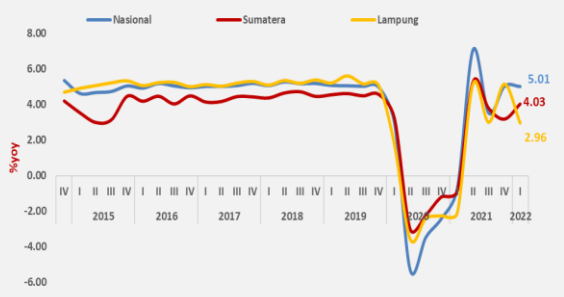

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

1.1 Analisis PDRB Sisi Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Lampung ditopang oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditengah berlanjutnya moderasi kinerja ekspor. Peningkatan kinerja Konsumsi RT sejalan dengan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung seiring dengan berlanjutnya akselerasi vaksinasi pada triwulan I 2022. Selanjutnya, kinerja investasi (PMTB) tumbuh 2,77% (yoy) dan turut menopang kinerja perekonomian secara keseluruhan, meski tidak sebesar periode sebelumnya yang tercatat sebesar 6,41% (yoy). Pertumbuhan PMTB tersebut sejalan dengan peningkatan realisasi belanja modal APBD untuk bangunan, infrastruktur jalan, dan irigasi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja ekspor pada triwulan I 2022 tetap tumbuh positif (2,80%, yoy), meski melambat jika dibandingkan dengan 4,53% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perlambatan kinerja ekspor terutama disebabkan oleh terbatasnya produksi *Crude Palm Oil* (CPO) domestik di tengah adanya implementasi kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) oleh Kementerian Perdagangan pada triwulan I 2022. Selanjutnya, Konsumsi Pemerintah juga tercatat mengalami kontraksi sebesar -3,30% (yoy), terutama disebabkan oleh penurunan realisasi belanja APBN untuk komponen belanja pegawai, barang dan jasa, dan bantuan sosial.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Pengeluaran

No.	Komponen	Tw IV 2019 (yoy)	Tw I 2020 (yoy)	Tw II 2020 (yoy)	Tw III 2020 (yoy)	Tw IV 2020 (yoy)	Tw I 2021 (yoy)	Tw II 2021 (yoy)	Tw III 2021 (yoy)	Tw IV 2021 (yoy)	TW I 2022 (yoy)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah	5.33	4.61	-4.40	-2.53	-3.97	-3.88	5.12	2.04	3.70	4.05
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.73	-1.08	-9.31	-5.02	-1.02	0.20	3.38	1.02	9.80	1.23
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.07	2.18	-5.22	-7.53	-0.15	-3.68	4.72	2.00	-1.17	-3.30
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.07	1.52	-7.32	-4.90	-8.47	1.22	4.47	3.63	6.41	2.77
5	Perubahan Inventori	-258.06	18.69	254.27	-641.55	-143.91	1.96	-1.95	-128.63	-205.87	-8.74
6	Ekspor Barang dan Jasa	27.82	-5.32	-10.66	-6.04	5.23	13.22	17.32	21.34	4.53	2.80
7	Impor Barang dan Jasa	16.32	-1.14	-14.12	-7.10	-0.74	11.92	16.68	17.98	2.16	3.18
	PDRB	**5.12**	**1.71**	**-3.59**	**-2.41**	**-2.26**	**-1.99**	**5.12**	**3.00**	**5.15**	**2.96**
		Meningkat	Menurun								

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Pada triwulan I 2022, struktur perekonomian Provinsi Lampung dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh 2 (dua) komponen permintaan domestik, yaitu Konsumsi RT dan Investasi (PMTB). Konsumsi RT tercatat memiliki kontribusi 63,14% terhadap PDRB Provinsi Lampung, kemudian diikuti oleh Investasi (PMTB) dengan kontribusi sebesar 33,88% (Grafik 1.3). Adapun komponen permintaan domestik lainnya, yaitu Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), tercatat masih memiliki kontribusi yang rendah cukup rendah terhadap PDRB, yaitu sebesar 5,38% dan 1,68%. Dari sisi komponen eksternal, ekspor memiliki kontribusi yang cukup dominan terhadap PDRB Provinsi Lampung, yaitu sebesar 49,64%. Namun demikian, Provinsi Lampung juga memiliki permintaan impor yang cukup tinggi, tercermin dari kontribusi impor yang tercatat sebesar 54,47% terhadap PDRB. Perkembangan struktur komponen eksternal PDRB Provinsi Lampung tersebut menyebabkan rendahnya kontribusi Net Ekspor terhadap perekonomian Lampung.

Grafik 1.3 Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi Lampung

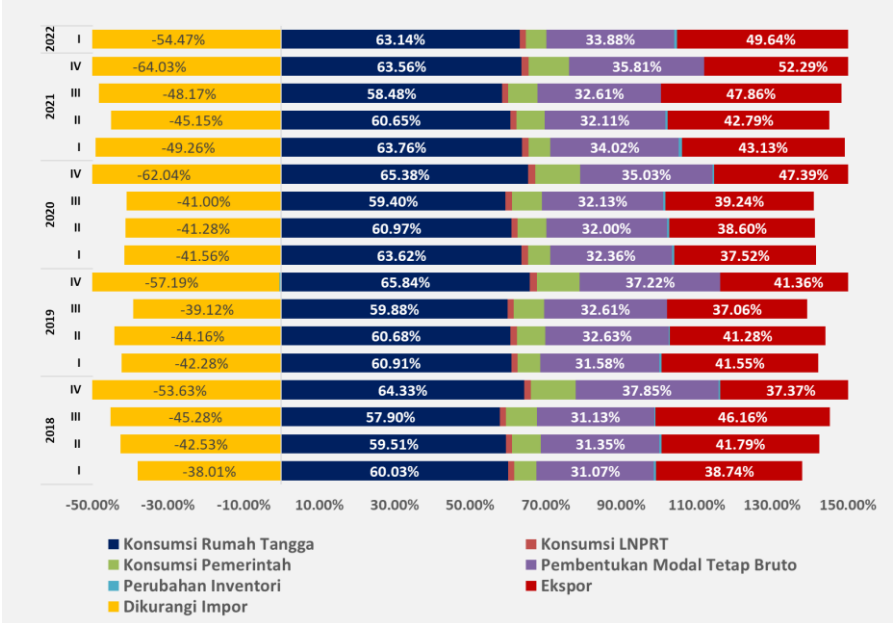

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga

Kinerja Konsumsi RT pada triwulan I 2021 tumbuh sebesar 4,05% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (3,70%; yoy). Secara umum, peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2022 sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada seluruh kategori (Grafik 1.4.) seiring dengan terkendalinya penyebaran COVID-19 varian Omicron. Perkembangan tersebut didukung oleh akselerasi program vaksinasi yang terus berlanjut di Provinsi Lampung. Jumlah masyarakat yang telah divaksin sampai dengan 31 Maret 2022 untuk dosis pertama, kedua, dan ketiga masing-masing sebanyak 5.961 ribu orang, 4.625 ribu orang, dan 362 ribu orang (Grafik 1.5). Adapun peningkatan jumlah populasi yang telah divaksin untuk dosis pertama, kedua, dan ketiga pada triwulan I 2022 di Provinsi Lampung masing-masing sejumlah 750,51 ribu orang, 1.292,62 ribu orang, dan 290,40 ribu orang. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa askelerasi program vaksiansi untuk vaksin dosis pertama telah berjalan dengan baik. Ke depan, percepatan program vaksinasi untuk vaksin dosis kedua dan ketiga akan menjadi fokus utama Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembukaan sektor potensial di Provinsi Lampung.

Grafik 1.4 Mobilitas Masyarakat Lampung

Sumber: Google Global Mobility Report

Grafik 1.5 Perkembangan Progam Vaksinasi

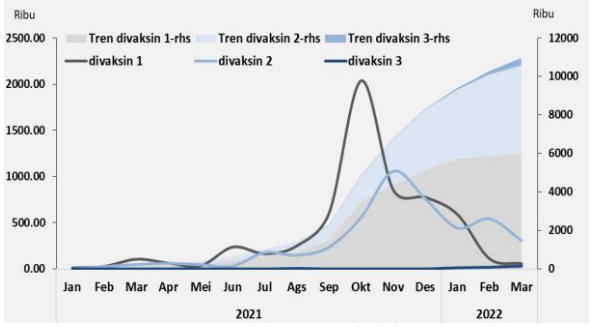

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, diolah

Grafik 1.6 Indeks Keyakinan Konsumen

Sumber: Bank Indonesia

Perbaikan mobilitas masyarakat juga berdampak kepada terjaganya ekspektasi masyarakat terhadap kondisi perekonomian di Provinsi Lampung di tengah penyebaran COVID-19 varian Omicron pada di triwulan I 2022. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tetap berada pada level optimis (lebih dari 100) atau tercatat sebesar 115,81 (Grafik 1.6). Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi tersebut diikuti oleh pengeluaran yang meningkat, ditunjukkan oleh *outstanding* kredit konsumsi (lokasi proyek) yang mengalami peningkatan atau tercatat sebesar 3,66% (yoy) pada triwulan I 2022, lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tercatat meningkat 1,51% (yoy) (Grafik 1.7). Peningkatan pengeluaran masyarakat juga ditopang oleh peningkatan pendapatan yang ditunjukkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung yang tercatat sebesar 107,8 atau mengalami peningkatan 11,04% (yoy) pada triwulan I 2022 (Grafik 1.8), lebih tinggi dari capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 105,4.

Grafik 1.7 Kredit Konsumsi

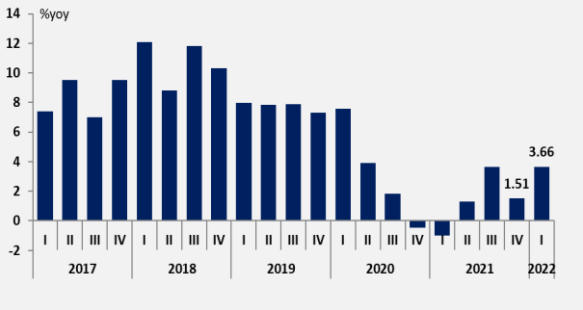

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.8 Nilai Tukar Petani

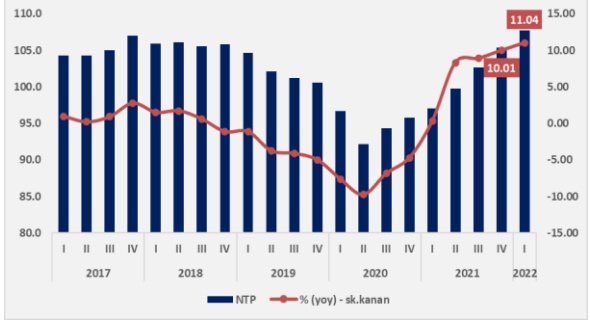

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

1.1.2. Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Pemerintah terkontraksi 3,30% (yoy) pada triwulan I 2022, lebih dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (-1,17%; yoy), sejalan dengan realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan I 2022 yang terkontraksi sebesar 40,06% (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh terkontraksinya komponen belanja pegawai (-14,34%; yoy), belanja bunga (-36,36%; yoy), serta belanja hibah (-96,76%; yoy). Sampai dengan triwulan I 2022, realisasi belanja APBD Provinsi Lampung mencapai Rp507,40 miliar atau 7,24% dari total pagu anggaran belanja tahun 2022 yang sebesar Rp7,01 triliun. Pencapaian ini baik secara nominal maupun persentase tercatat lebih rendah dari realisasi triwulan I 2021 yang sebesar Rp846,49 miliar atau 11,32% dari pagu APBD-P 2021.

Dari empat komponen pembentuk anggaran belanja, komponen dengan pangsa terbesar yakni Belanja Operasi mencatatkan realisasi sebesar 10,31% dari total pagu APBD-P 2022 atau sebesar Rp426,10 miliar. Berdasarkan persentase realisasi, capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya (9,05%), namun secara nominal capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan Rp477,87 miliar seiring dengan pagu Belanja Operasi APBD-P 2022 (Rp4,2 triliun) yang lebih rendah jika dibandingkan pagu APBD-P 2021 (Rp5,3 triliun). Secara lebih rinci, penurunan pagu anggaran Belanja Operasi APBD-P 2022 disebabkan oleh pagu Belanja Hibah pada tahun 2022 (Rp 504,46 miliar) yang jauh lebih rendah jika dibandingkan pagu anggaran tahun sebelumnya (Rp1,7 triliun. Selain itu, realisasi belanja komponen Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada triwulan I 2022 masing-masing tercatat sebesar 0,00%; dan 6,00%. Capaian Belanja Transfer tersebut lebih rendah jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya (27,26%) seiring dengan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang terpantau mengalami perlambatan realisasi, di mana *dropping* anggaran baru terealisasi cukup tinggi pada akhir Maret 2022.

1.1.3. Investasi

Kinerja investasi pada triwulan I 2022 tercatat tumbuh tetap kuat sebesar 2,77% (yoy), meski mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,41% (yoy). Pertumbuhan positif investasi didorong oleh peningkatan realisasi belanja APBD untuk belanja modal gedung dan bangunan dan jaringan jalan dan irigasi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, kinerja investasi juga didorong oleh berlangsungnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Lampung, yaitu pembukaan lahan dan pembangunan awal *Bakauheni Harbour City* (BHC), yakni pembangunan masjid, UMKM *Center*, dan *Bakauheni Park,* serta berlanjutnya pembangunan logistik kereta api Lahat – Muara Enim – Prabumulih Tarahan. Namun

demikian, realisasi pembangunan logistik kereta api dimaksud mengalami perlambatan pada triwulan I 2022, tercermin dari volume impor besi dan baja yang mengalami kontraksi sebesar 30,09% (yoy).

Perlambatan kinerja investasi pada triwulan I 2022 sejalan dengan hasil *liaison* dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDKU) Bank Indonesia. *Likert scale* perkembangan investasi pada hasil *liaison* pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 0,73 (Grafik 1.9), lebih rendah dari dari capaian triwulan sebelumnya (0,89). SKDU triwulan I 2022 juga menunjukan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) realisasi investasi pada periode laporan sebesar 3,16% (Grafik 1.10), lebih rendah jika dibandingkan triwulan sebelumnya (4,42%). Perkembangan hasil *liaison* dan SKDU tersebut menunjukkan bahwa perkembangan investasi responen (pelaku usaha) pada triwulan I 2022 relatif stabil atau mengalami peningkatan secara terbatas, meskipun dengan realisasi yang sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik 1.9 Perkembangan Investasi Hasil Laison

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.10 Perkembangan Investasi Hasil SKDU

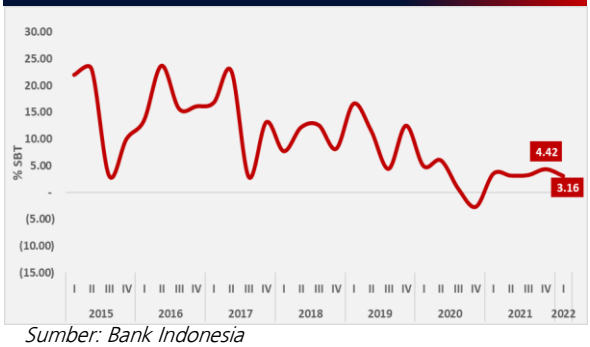

Sumber: Bank Indonesia

1.1.4. Ekspor dan Impor

Kinerja ekspor pada triwulan I 2022 tetap tumbuh positif sebesar 2,80% (yoy), meski melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,53% (yoy). Berdasarkan data Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), ekspor luar negeri Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 tercatat sebesar USD1.249,60 juta atau tumbuh 28,13% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (USD1.414,80 juta atau tumbuh 34,06%; yoy) (Grafik 1.11). Tetap tumbuhnya kinerja ekspor tersebut didorong oleh ekspor Bahan Bakar Mineral (Batu Bara[1]) yang tumbuh sebesar 317,36% (yoy) (Grafik 1.12), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (190,77%; yoy). Pada keseluruhan triwulan I 2022, ekspor Batu Bara tetap tumbuh kuat meski Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan pelarangan ekspor batu bara sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2022, yang berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekspor Batu Bara pada Januari 2022 (9,65%; yoy). Meski demikian, pasca relaksasi pelarangan ekspor batu bara pada 1 Februari 2022, ekspor Batu Bara pada Februari dan Maret 2022 masing-masing tercatat tumbuh 183,83% (yoy) dan 985,37% (yoy). Namun demikian, meningkatnya pertumbuhan nominal ekspor batu bara tersebut juga disebabkan oleh harga batu bara internasional yang mengalami peningkatan (Grafik 1.13) akibat tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina dan meningkatnya permintaan energi dari Tiongkok pada periode Hari Raya Imlek.

[1] Batu bara yang diekspor melalui Provinsi Lampung berasal dari Provinsi Sumatera Selatan

Grafik 1.11 Perkembangan Ekspor Luar Negeri

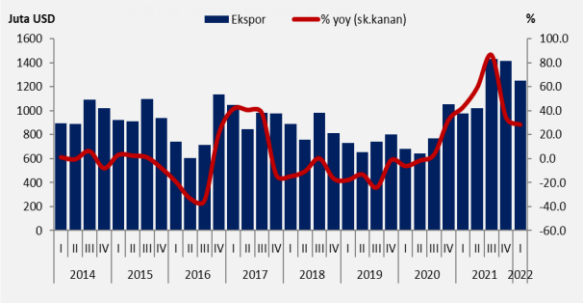

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor Bahan Bakar Mineral

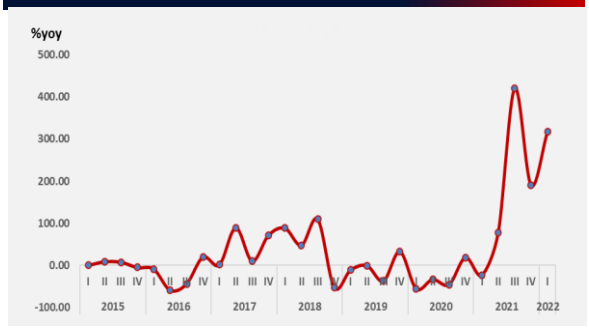

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.13 Perkembangan Harga Batu Bara Internasional

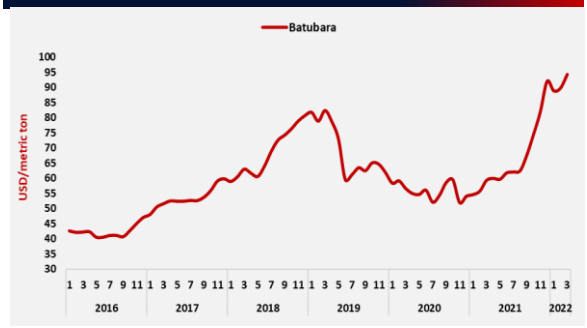

Sumber: Bloomberg

Kinerja positif ekspor Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 juga ditopang oleh meningkatnya ekspor Kopi, Teh, Rempah-rempah (Kopi Robusta) dan Olahan Buah-Buahan/Sayuran (aneka Lada). Pada triwulan I 2022, ekspor Kopi Robusta Lampung tercatat meningkat 21,80% (yoy) (Grafik 1.14), melanjutkan perbaikan yang telah terjadi pada triwulan IV 2021 (20,03%; yoy) setelah terkontraksi pada triwulan II 2021 (-5,44%; yoy) dan triwulan III 2021 (-3,07%; yoy). Perbaikan kinerja ekspor Kopi Robusta tersebut didorong oleh harga Kopi Robusta Internasional yang mengalami peningkatan sejak triwulan IV 2021 (Grafik 1.15) seiring dengan mulai terkendalinya penyebaran COVID-19 varian Delta pada skala global yang mendorong menguatnya permintaan. Selain itu, penurunan ekspor Kopi Robusta dari Brazil dan Amerika Tengah pada triwulan I 2022 yang disebabkan oleh kelangkaan peti kemas dan adanya penyakit karat daun kopi memberikan ruang yang cukup besar bagi Indonesia, termasuk Provinsi Lampung, untuk memenuhi permintaan Kopi Robusta internasional. Selanjutnya, ekspor Olahan Buah-Buahan/Sayuran (aneka Lada[2]) tercatat tumbuh 10,15% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.16), meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya (-5,03%; yoy). Peningkatan kinerja ekspor aneka lada terpantau juga sejalan dengan adanya perbaikan harga lada hitam Internasional pada Maret 2022 (Grafik 1.17) setelah terkoreksi pada November 2021. Meningkatnya harga Lada Hitam tersebut disebabkan oleh ekspor Lada Hitam Vietnam yang tumbuh melambat, sehingga memberikan ruang bagi Provinsi Lampung untuk memenuhi permintaan internasional.

[2] Jenis lada yang menjadi komoditas ekspor utama Provinsi Lampung adalah Lada Hitam (83%), meskipun Lada Putih (17%) juga merupakan salah satu komoditas yang diekspor Provinsi Lampung.

Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Kopi, Teh, dan Rempah-rempah

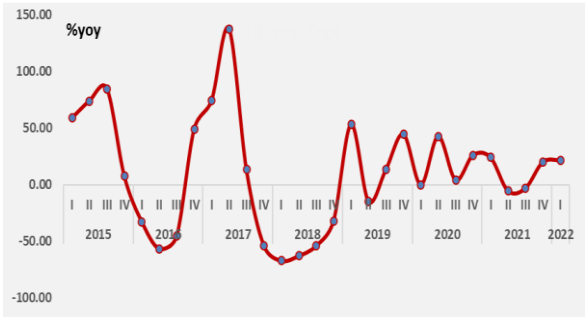

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.15 Perkembangan Harga Kopi Robusta Internasional

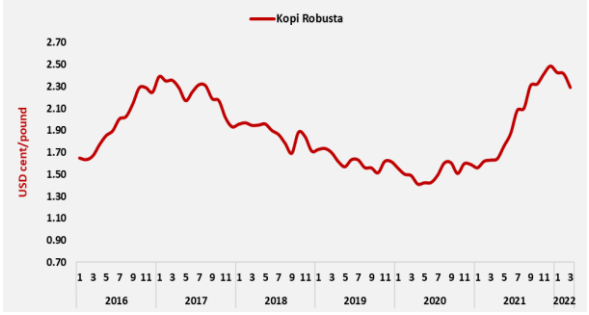

Sumber: Bloomberg

Grafik 1.16 Perkembangan Ekspor Olahan Buah-Buahan/Sayuran

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.17 Perkembangan Harga Lada Internasional

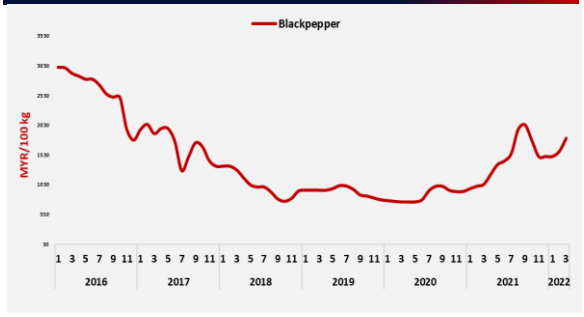

Sumber: Bloomberg

Meski demikian, melambatnya pertumbuhan ekspor Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 disebabkan oleh terhambatnya perbaikan kinerja ekspor *Crude Palm Oil* (CPO). Ekspor Lemak dan Minyak Hewan/Nabati (CPO) pada triwulan I 2022 tercatat tumbuh sebesar 25,74% (yoy) (Grafik 1.18), sedikit lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya (18,75%; yoy). Perbaikan kinerja ekspor CPO yang relatif terbatas tersebut disebabkan oleh terbatasnya produksi CPO domestik karena faktor cuaca dan pemupukan yang kurang optimal pada tahun 2020 serta diberlakukannya kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) untuk CPO dan turunannya pada triwulan I 2022. Perbaikan ekspor CPO pada triwulan laporan lebih didorong oleh kenaikan harga yang terkonfirmasi dengan volume ekspor CPO pada triwulan laporan tercatat terkontraksi 16,08% (yoy). Harga CPO Internasional pada triwulan I 2022 mencapai level tertingginya secara historis pada triwulan I 2022 (Grafik 1.19), disebabkan oleh terbatasnya produksi CPO Malaysia karena faktor keterbatasan jumlah tenaga kerja dan terjadinya banjir di beberapa perkebunan Kelapa Sawit.

Grafik 1.18 Perkembangan Ekspor Lemak dan Minyak Hewan/Nabati

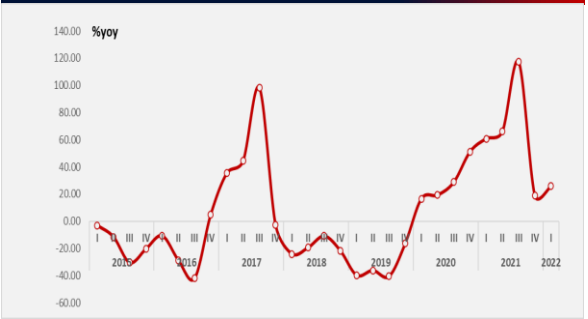

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.19 Perkembangan Harga *Crude Palm Oil* Internasional

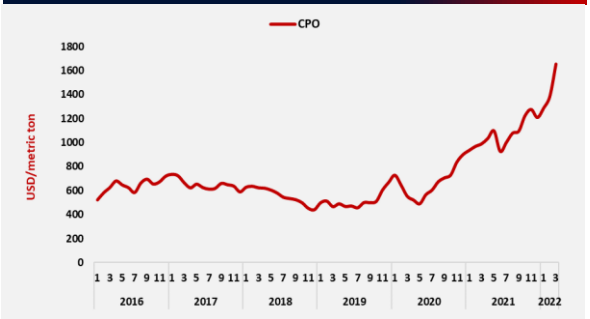

Sumber: Bloomberg

Dilihat dari kontribusinya, Lemak & Minyak Hewan / Nabati (CPO), Bahan Bakar Mineral (Batu Bara), Kopi, Teh, Rempah-rempah (Kopi Robusta), Ampas / Sisa Industri Makanan (Bungkil Inti Sawit), dan Olahan dari Buah-buahan / Sayuran (Aneka Lada) masih menjadi komoditas ekspor luar negeri utama Provinsi Lampung, dengan besarnya kontribusi masing-masing komoditas secara berurutan sebesar 39,66%, 17,02%, 10,24%, 7,25%, dan 6,67% (Grafik 1.20). Di luar komoditas-komoditas unggulan tersebut, 13,62% ekspor Provinsi Lampung pada triwulan laporan merupakan agregat dari kontribusi komoditas sektor Pertanian dan Industri Pengolahan, misalnya Bubur Kertas, Karet Remah, Udang dibekukan, Kepiting diawetkan, dan Buah/Sayur yang diawetkan. Sementara itu, negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Lampung pada triwulan laporan adalah Amerika Serikat (21,49%), Tiongkok (9,69%), Italia (9,63%), India (7,92%), dan Belanda (7,18%) (Grafik 1.21).

Grafik 1.20 Pangsa Kelompok Ekspor Non-Migas

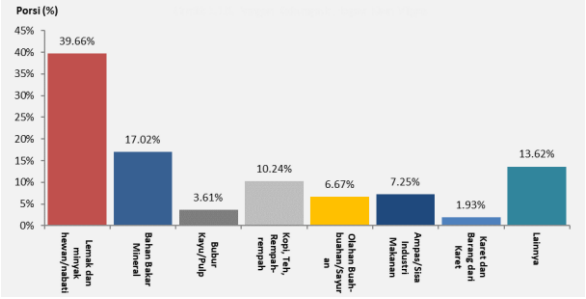

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.21 Negara Tujuan Ekspor

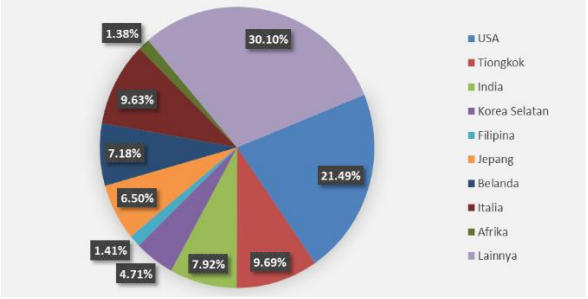

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Sejalan dengan kinerja ekspor yang tumbuh positif, impor Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 tercatat tumbuh 3,18% (yoy), meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya (2,16%; yoy). Secara umum, terakselerasinya kinerja impor pada triwulan laporan didorong oleh tingginya permintaan domestik terhadap barang konsumsi. Selain itu, impor antar daerah pada triwulan laporan terpantau tetap tinggi, ditopang oleh berlanjutnya pengiriman Batu Bara dari Provinsi Sumatera Selatan untuk kemudian diekspor melalui Provinsi Lampung.

Meski demikian, di tengah terakselerasinya kinerja total impor Provinsi Lampung, impor luar negeri Provinsi Lampung pada periode laporan tercatat sebesar USD311,32 juta atau terkontraksi 18,65% (yoy) (Grafik 1.22). Realisasi tersebut terpantau lebih rendah jika dibandingkan realisasi impor luar negeri pada triwulan IV 2021 (USD223,49 juta atau tumbuh 28,45%). Penurunan kinerja tersebut disebabkan oleh impor Bahan Baku Penolong dan Barang Modal yang masing-masing terkontraksi 11,54% (yoy) (Grafik 1.23) dan 82,69% (yoy) (Grafik 1.25). Kontraksi yang terjadi pada kelompok Bahan Baku Penolong terutama disebabkan oleh terkontraksinya impor Gula dan Kembang Gula (-13,81%; yoy) seiring dengan lambatnya penerbitan Perizinan Impor (PI) Gula Kristal dan Rafinasi pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kontraksi impor barang modal pada triwulan laporan disebabkan oleh melambatnya belanja investasi untuk gerbong kereta api Batu Bara rangkaian panjang (Babaranjang) setelah berakhirnya proyek peningkatan kapasitas angkut Batu Bara pada jalur Tanjung Enim-Dermaga Tarahan (Jalur Selatan 1) pada triwulan IV 2021. Di sisi lain, kontraksi impor luar negeri yang lebih dalam tertahan oleh impor barang konsumsi yang tumbuh 1422,91% (yoy) (Grafik 1.24), didorong oleh peningkatan impor Makanan dan Minuman (belum diolah) untuk Rumah Tangga pada triwulan laporan.

Grafik 1.22 Perkembangan Impor Luar Negeri

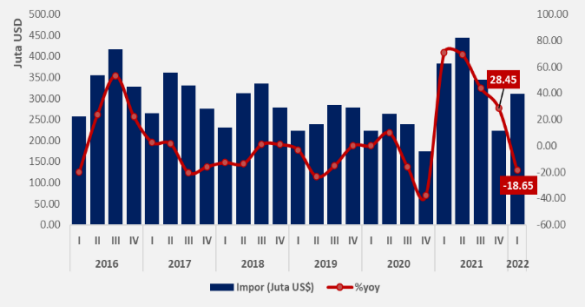

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.23 Perkembangan Impor Bahan Baku Penolong

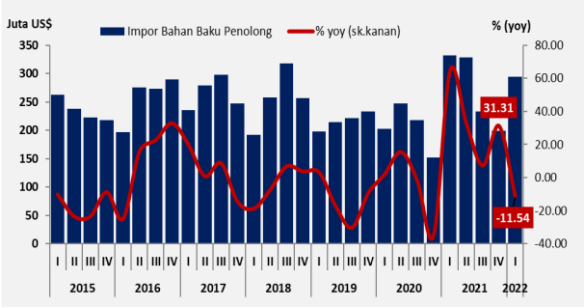

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.24 Perkembangan Impor Barang Konsumsi

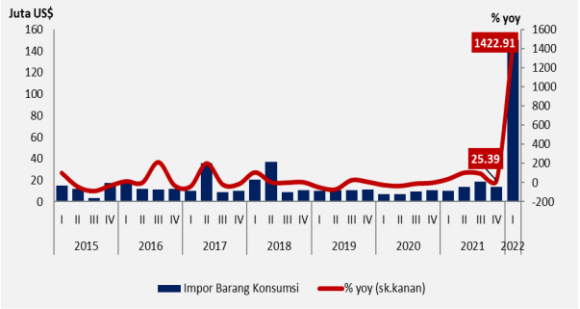

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.25 Perkembangan Impor Barang Modal

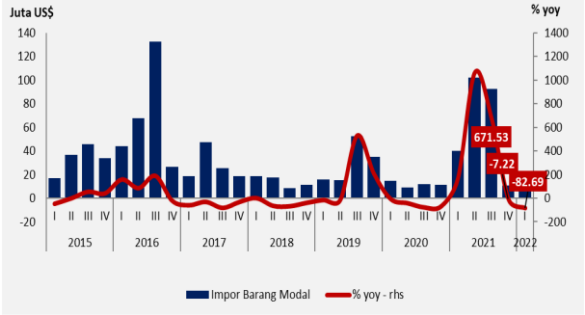

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Dilihat dari kontribusinya, berdasarkan klasifikasi HS 2-digit, Gula dan Produk Olahan Gula (Gula Kristal dan Rafinasi), Ampas/Sisa Industri Makanan (Bungkil Kedelai), Biji-bijian Berminyak, Pupuk, dan Binatang Hidup masih menjadi komoditas utama impor luar negeri utama Provinsi Lampung, dengan besarnya kontribusi masing-masing komoditas secara berurutan sebesar 39,42%, 15,56%, 12,31%, 8,68%, dan 2,58% **(Grafik 1.26)**. Sementara itu, negara asal impor terbesar Provinsi Lampung pada triwulan laporan adalah Thailand (23,23%), Australia (15,55%), Amerika Latin (11,43%), Malaysia (11,06%), dan Tiongkok (7,42%) **(Grafik 1.27)**.

Grafik 1.26 Pangsa Impor Provinsi Lampung

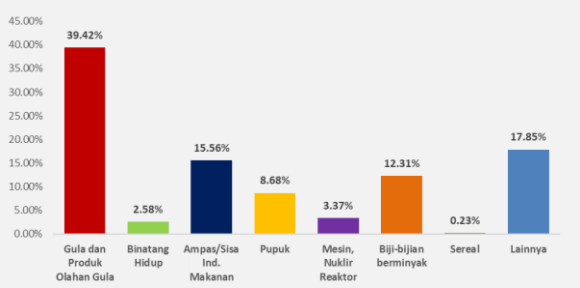

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.27 Negara Asal Impor

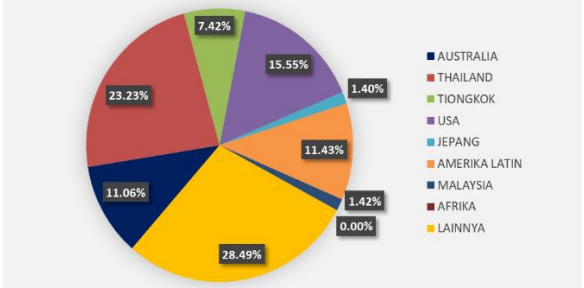

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

1.2 Analisis PDRB Sisi Lapangan Usaha

Pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung triwulan I 2022 didorong oleh kinerja positif LU Perdagangan Besar dan Eceran (12,46% PDRB) serta Transportasi dan Pergudangan (5,20% PDRB) yang masing-masing tumbuh sebesar 15,11% (yoy) dan 17,03% (yoy). Pertumbuhan kedua LU tersebut sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat seiring terkendalinya penyebaran COVID-19 varian Omicron, di mana rerata mobilitas masyarakat pada triwulan I 2022 tumbuh 17,85% lebih tinggi jika dibandingkan dengan Januari 2020. LU Konstruksi juga tercatat mengalami pertumbuhan positif (5,04%; yoy) sejalan dengan kinerja investasi yang masih tumbuh positif.

Meski demikian, perbaikan kinerja perekonomian Provinsi Lampung yang lebih jauh tertahan oleh terkontraksinya kinerja LU Pertambangan dan Penggalian, LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. LU Pertambangan dan Penggalian (6,09% PDRB) tercatat terkontraksi 4,86% (yoy), terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pada triwulan I 2022 sehingga menghambat kegiatan operasional kegiatan usaha pertambangan dan penggalian di Lampung Timur. Pertumbuhan LU Pertanian (28,19% PDRB) mengalami kontraksi sebesar 0,88% (yoy), terutama disebabkan oleh penurunan produksi tanaman pangan. Selanjutnya, LU Industri Pengolahan tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,27% (yoy), terutama disebabkan oleh terbatasnya produksi CPO domestik serta adanya kenaikan harga bahan baku seiring dengan berlanjutnya kenaikan harga komoditas bahan pangan dunia dan melonjaknya harga energi.

Tabel 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Lapangan Usaha (% yoy)

Lapangan Usaha	Tw III 2018 (yoy)	Tw IV 2018 (yoy)	Tw I 2019 (yoy)	Tw II 2019 (yoy)	Tw III 2019 (yoy)	Tw IV 2019 (yoy)	Tw I 2020 (yoy)	Tw II 2020 (yoy)	Tw III 2020 (yoy)	Tw IV 2020 (yoy)	Tw I 2021 (yoy)	Tw II 2021 (yoy)	Tw III 2021 (yoy)	Tw IV 2021 (yoy)	Tw I 2022 (yoy)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.24	5.34	1.18	0.70	0.02	4.26	-2.66	1.67	3.17	0.30	-1.73	0.30	-1.60	1.90	-0.88
Pertambangan dan Penggalian	4.30	-1.18	2.84	4.46	0.21	3.38	-2.45	-2.68	-1.31	-8.44	-6.44	-4.54	-9.02	-0.78	-4.86
Industri Pengolahan	12.42	7.41	7.42	11.74	10.14	3.74	1.41	-12.53	-10.08	1.13	0.73	8.03	7.16	2.58	-0.27
Pengadaan Listrik, Gas	4.41	1.16	5.97	16.26	6.23	9.56	3.52	-1.97	6.38	-10.17	-12.40	-10.28	-10.32	7.23	7.10
Pengadaan Air	2.09	2.14	4.17	5.22	5.93	5.80	4.80	4.11	6.13	5.16	4.36	6.52	7.22	9.55	9.82
Konstruksi	5.51	4.96	7.30	7.02	5.15	4.85	3.95	-2.45	-5.98	-3.14	5.54	9.01	7.92	5.48	5.04
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Se	5.51	4.67	8.14	5.94	9.00	5.60	2.71	-10.19	-8.77	-9.84	-5.93	13.51	10.22	16.81	15.11
Transportasi dan Pergudangan	3.33	5.48	7.28	8.12	8.67	8.20	7.25	-13.22	-2.58	-12.84	-14.49	9.95	1.44	14.63	17.03
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	11.22	11.11	10.55	5.89	9.98	10.09	9.87	-7.14	-8.29	-13.10	-12.68	2.50	-2.73	8.29	8.64
Informasi dan Komunikasi	12.72	7.37	8.67	8.26	6.68	8.35	6.65	11.03	5.96	8.47	8.15	8.19	8.82	-0.38	-2.55
Jasa Keuangan	1.92	-2.63	-1.45	-2.27	6.55	8.82	6.71	2.11	1.75	4.56	1.46	7.09	1.26	-1.41	1.65
Real Estate	3.86	4.28	5.06	6.20	6.47	5.77	5.77	-1.73	-5.30	-5.34	-6.27	0.16	3.89	7.98	2.27
Jasa Perusahaan	0.53	2.00	5.01	3.62	3.63	3.64	3.59	-4.33	-1.11	-3.80	-7.46	4.21	-0.69	8.69	15.01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosia	5.50	4.47	6.64	7.04	2.91	2.79	3.94	5.42	6.82	3.53	-5.35	7.81	4.67	9.23	-1.12
Jasa Pendidikan	11.11	9.68	9.98	8.94	7.24	7.32	7.16	4.44	6.31	-1.27	-1.61	0.03	0.65	5.94	3.45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.41	7.90	6.94	5.66	7.77	6.85	7.70	3.12	18.17	14.26	2.90	10.03	1.31	2.13	9.25
Jasa Lainnya	9.40	8.57	9.15	6.01	8.45	8.77	10.78	-11.44	-8.89	-7.92	-10.21	5.29	-4.47	2.20	6.55
	5.19	**5.31**	**5.20**	**5.57**	**5.15**	**5.12**	**1.71**	**-3.59**	**-2.41**	**-2.25**	**-1.99**	**5.12**	**3.00**	**5.15**	**2.96**

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Porsi terbesar PDRB Lampung pada triwulan laporan masih didominasi oleh tiga LU utama Provinsi Lampung yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; LU Industri Pengolahan; dan LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan porsi masing-masing sebesar 28,19%, 18,69%, dan 12,46% **(Grafik 1.28)**. Meski demikian, kontribusi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Industri Pengolahan terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (28,39% dan 19,65%). Perkembangan terebut sejalan dengan siklus ekonomi Provinsi Lampung, di mana produksi tanaman pangan pada triwulan I secara umum lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan IV seiring dengan berakhirnya musim panen Ubi Kayu dan belum masuknya masa panen raya Padi. Selanjutnya, produksi Industri Pengolahan pada triwulan I secara umum lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring dengan terjadinya normalisasi kegiatan usaha dan permintaan pasca berakhirnya momen HBKN Natal dan Tahun Baru.

Grafik 1.28 Pangsa PDRB Lapangan Usaha

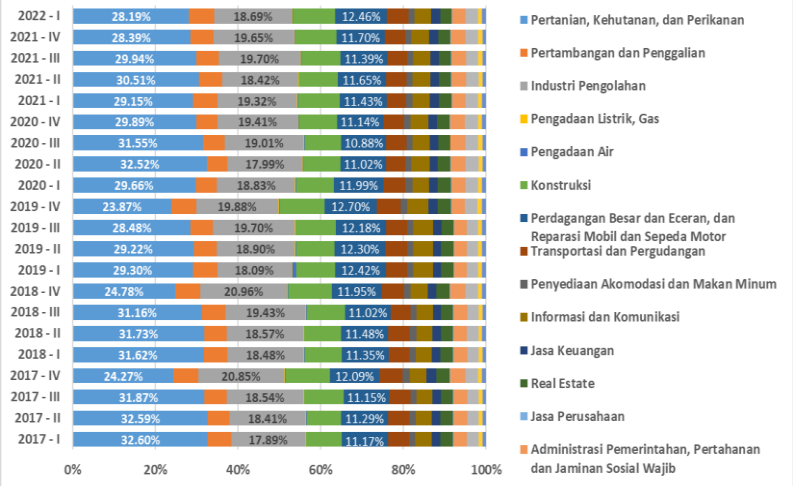

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

1.2.1 LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan I 2022 kembali terkontraksi akibat penurunan produksi tanaman pangan. Produksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan I 2022 terkontraksi 0,88% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan realisasi dengan triwulan sebelumnya (1,90%; yoy). Penurunan produksi LU Pertanian pada triwulan laporan terutama disebabkan oleh terkontraksinya produksi tanaman pangan, misalnya komoditas padi (-6,38%; yoy) dan jagung (-13,50%; yoy). Terkontraksinya produksi padi pada triwulan laporan merupakan dampak dari investasi yang dilakukan di sekitar lahan tanam, yaitu revitalisasi saluran irigasi pada triwulan IV 2021 yang berdampak pada berkurangnya luas tanam padi di bulan November dan Desember 2021 karena terganggunya proses pengairan. Selanjutnya, terkontraksinya produksi jagung sejalan dengan tingginya kebutuhan pupuk untuk tanaman jagung di tengah meningkatnya harga pupuk internasional menjadi 952 USD/*metric* ton pada Desember 2021, meski terpantau sedikit melandai pada triwulan I 2022 atau tercatat 856 USD/*metric* ton pada Maret 2022 (Grafik 1.29). Tetap tingginya harga pupuk internasional pada triwulan I 2022 disebabkan oleh tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang meningkat di tengah tertahannya perbaikan rantai pasok global.

Grafik 1.29 Harga Pupuk Internasional

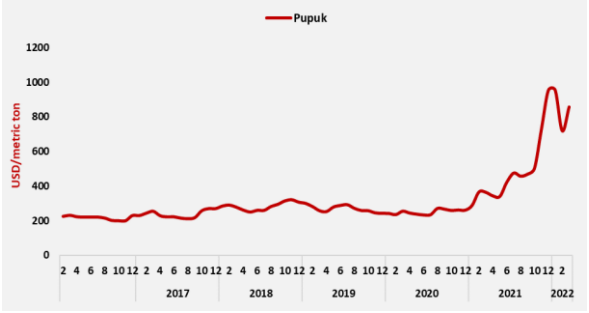

Sumber: Bloomberg

Terhambatnya produksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada periode laporan, khususnya Subsektor Tanaman Pangan, terkonfirmasi dengan adanya kenaikan harga komoditas tanaman pangan. Kenaikan harga komoditas tanaman pangan pada periode laporan tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor tanaman pangan yang tercatat sebesar 96,79 (Grafik 1.31), meningkat cukup signifikan dari posisi triwulan IV 2021 (94,44) dan triwulan I 2021 (90,90). Kenaikan NTP pada periode laporan didorong oleh disrupsi pada sisi suplai yang mendorong kenaikan harga, yakni menurunnya produksi harga Padi dan Jagung, terhambatnya produksi perikanan tangkap dan komoditas hortikultura karena faktor cuaca, serta melonjaknya harga CPO internasional yang turut mendorong kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di tingkat petani. Selain itu, kinerja Subsektor Tanaman Pangan dan Subsektor Perkebunan mengalami penurunan pada triwulan I 2022 yang tercermin dari tertahannya pertumbuhan Kredit Pertanian pada triwulan laporan (6,36%; yoy) (Grafik 1.31).

Grafik 1.30 Perkembangan Nilai Tukar Petani per Subsektor

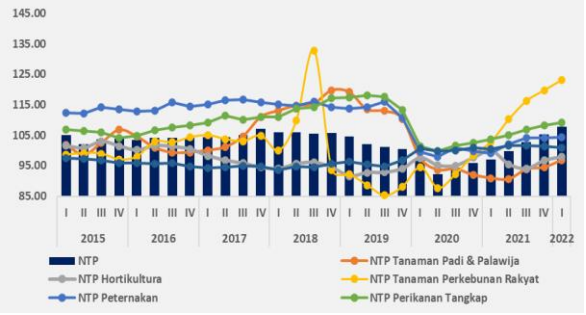

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 1.31 Kredit Pertanian

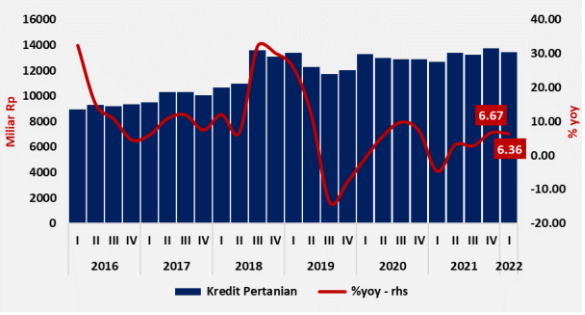

Sumber: Bank Indonesia

1.2.2 LU Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2022 mengalami kontraksi 0,27% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan triwulan sebelumnya (2,58%; yoy). Kontraksi kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan secara umum disebabkan oleh rendahnya produksi Industri Pengolahan Makanan, terutama produksi *Crude Palm Oil* (CPO) beserta turunannya. Menurunnya produksi tersebut tercermin dari pertumbuhan penjualan listrik industri yang mengalami perlambatan pada triwulan I 2022 (3,15%; yoy) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (7,91%; yoy) (Grafik 1.32), seiring dengan rendahnya kapasitas produksi terpakai pada Industri Pengolahan CPO

Grafik 1.32 Penjualan Listrik Industri

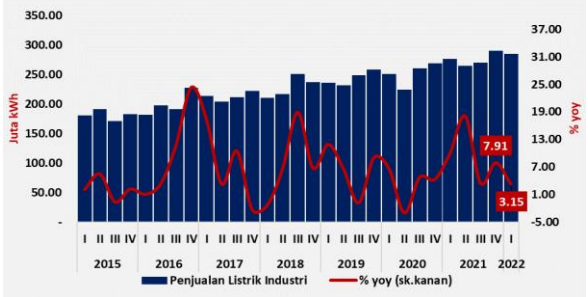

Sumber: Kemenperin dan Kemendag, diolah

Tabel 1. 3 Kebijakan Pemerintah Terkait Penjualan dan Pengetatan Ekspor CPO dan Turunannya

Periode	Aturan	Pokok Kebijakan
28 Januari 2022	Permendag No. 6 Tahun 2022	Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.000,00/liter, minyak goreng sederhana sebesar Rp13.500,00/liter, dan minyak goreng premium sebesar Rp14.000,00/liter.
10 Februari 2022	Permendag No. 129 Tahun 2022	Penguatan aturan pengetatan ekspor melalui implementasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk Crude Palm Oil (CPO) sebesar 20% dengan Domestic Price Obligation (DPO) sebesar Rp9.300,00/kg dan RBD *Palm Olein* dengan DPO sebesar Rp10.300,00/kg.
9 Maret 2022	Permendag No. 170 Tahun 2022	Penyesuaian aturan pengetatan ekspor melalui peningkatan DMO untuk CPO dan RBD *Palm Olein* menjadi sebesar 30%
16 Maret 2022		Pencabutan aturan mengenai HET minyak goreng (Permendag No. 6 Tahun 2022) serta pengetatan ekspor CPO dan turunannya (Permendag No. 170 Tahun 2022)

Sumber: Kementerian Perdagangan

dan turunannya. Terhambatnya peningkatan kegiatan usaha Industri Pengolahan CPO dan turunannya pada triwulan laporan disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan baku yang mendorong adanya dinamika implementasi kebijakan terkait penjualan dan pengetatan ekspor CPO dan turunannya (Tabel 1.3). Perkembangan tersebut berdampak signifikan terhadap meningkatnya harga CPO internasional, terdisrupsinya rantai pasok CPO dan turunannya di dalam negeri, serta terganggunya stabilitas keuangan pelaku usaha.

Grafik 1.33 Impor Gula dan Kembang Gula

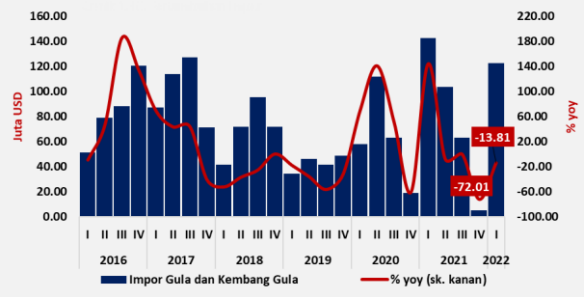

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.34 SBT Realisasi Tenaga Kerja LU Industri Pengolahan

Sumber: Bank Indonesia

Terkontraksinya pertumbuhan LU Industri Pengolahan juga disebabkan oleh terhambatnya kegiatan usaha Industri Pengolahan Gula untuk Industri seiring dengan impor Gula dan Kembang Gula (Gula Rafinasi) yang tercatat mengalami kontraksi 13,81% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.33). Menurunnya realisasi impor Gula Rafinasi pada periode laporan terutama disebabkan oleh penerbitan Perizinan Impor (PI) Gula Kristal dan Rafinasi tahun 2022 yang lebih lambat jika dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga realisasi impor Gula Rafinasi pada Januari 2022 hanya tercatat USD25,81, lebih rendah jika dibandingkan realisasi pada Januari 2021 yang sebesar USD35,50. Rendahnya kegiatan usaha Industri Pengolahan pada triwulan laporan terpantau sejalan dengan perkembangan Saldo Bersih Tertimbang realisasi tenaga kerja LU Industri Pengolahan pada SKDU triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 1,8% (Grafik 1.34) atau sama dengan triwulan sebelumnya.

1.2.3 LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 tetap tumbuh kuat, yaitu sebesar 15,11% (yoy), meski sedikit melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (16,81%; yoy). Tetap kuatnya pertumbuhan LU Perdagangan sejalan dengan permintaan domestik yang mengalami peningkatan signifikan seiring dengan terkendalinya penyebaran COVID-19 varian Omicron yang mendorong terjadinya peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi perekonomian dan terakselerasinya mobilitas masyarakat. Perkembangan yang terjadi pada kinerja LU ini tercermin dari peningkatan kredit LU Perdagangan yang tercatat meningkat 15,34% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.35), lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang meningkat 7,46% (yoy).

Meningkatnya pembiayaan pada LU ini mencerminkan sikap ekspansif para pelaku usaha pada triwulan laporan seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi di Provinsi Lampung. Hal tersebut didukung oleh peningkatan serapan tenaga kerja, tercermin dari peningkatan Saldo Bersih Tertimbang realisasi tenaga kerja LU Perdagangan pada SKDU triwulan I 2022 menjadi 1,94% (Grafik 1.36). Sikap ekspansif yang ditempuh para pelaku usaha pada triwulan I 2022 terpantau memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan sejalan dengan permintaan yang terakselerasi. Peningkatan penjualan tercermin dari omset pelaku usaha pada triwulan laporan yang tercatat tumbuh 13,21% (yoy) (Grafik 1.37), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (5,19%; yoy). Perkembangan tersebut juga didukung oleh penjualan mobil dan truk yang tetap

tumbuh dengan kuat, di mana masing-masing tercatat tumbuh 21,99% (yoy) dan 146,39% (yoy) **(Grafik 1.38)**. Penjualan mobil terpantau tetap tumbuh dengan kuat meskipun terdapat penyesuaian besaran diskon tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah pada triwulan I 2022 untuk mobil dengan kategori *low-cost green car* (tarif 3% akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah) dan mobil dengan rentang harga Rp200 juta s.d. Rp500 juta (50% dari tarif PPnBM ditanggung oleh Pemerintah). Adapun pertumbuhan kuat penjualan truk didukung oleh aktivitas investasi pelaku usaha dalam rangka persiapan menuju penerapan standar emisi Euro 4 pada kendaraan diesel di Indonesia yang akan diberlakukan sejak 1 April 2022.

Grafik 1.35 Kredit LU Perdagangan

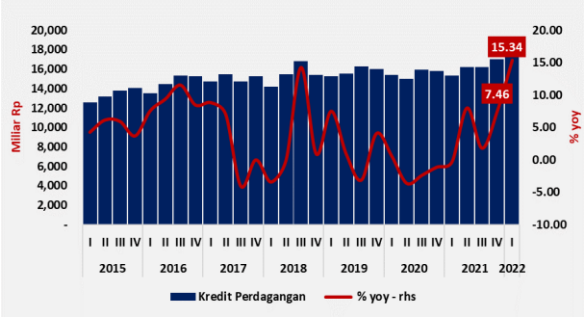

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.36 Realisasi Tenaga Kerja LU Perdagangan

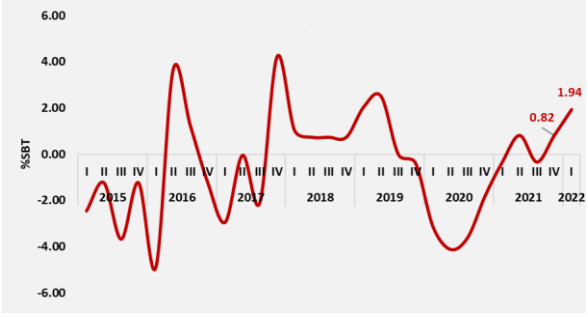

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.37 Perkembangan Omset Pelaku Usaha

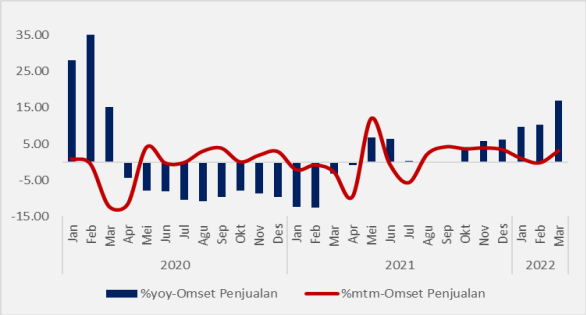

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.38 Pertumbuhan Penjualan Kendaraan

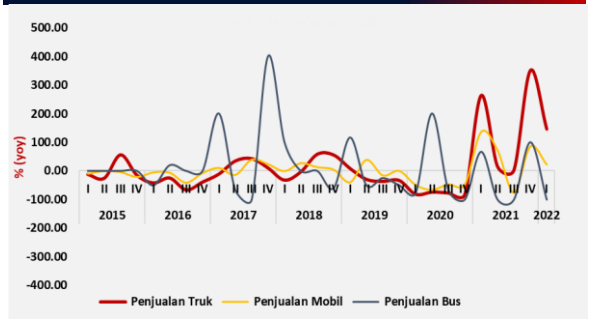

Sumber: LADEO

1.2.4 LU Konstruksi

Pada triwulan I 2022, kinerja LU Konstruksi tetap tumbuh positif sebesar 5,04% (yoy), meski sedikit melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,48% (yoy). Tetap positifnya pertumbuhan LU Konstruksi didorong oleh peningkatan realisasi belanja APBD untuk belanja modal gedung, bangunan, jaringan jalan, dan irigasi jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, kinerja investasi juga didorong oleh berlangsungnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Lampung, yaitu pembukaan lahan dan pembangunan awal *Bakauheni Harbour City* (BHC).

Namun demikian, telah terselesaikannya beberapa proyek investasi di Provinsi Lampung menyebabkan terjadinya perlambatan kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan, antara lain Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Bendungan Maratiga, dan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung. Perlambatan ini terkonfirmasi dari pertumbuhan *outstanding* kredit LU Konstruksi yang masih mengalami kontraksi sebesar 1,45% (yoy) **(Grafik 1.39)**, meski membaik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (-2,12%; yoy). Pertumbuhan kredit LU Konstruksi terpantau memiliki tren menurun sejak triwulan IV 2019 seiring dengan telah berakhirnya pembangunan jalan tol lintas

Sumatera di Provinsi Lampung. Sejalan dengan perkembangan tersebut, realisasi pengadaan semen di Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 masih mengalami kontraksi sebesar 5,46% (yoy) **(Grafik 1.40)**, meski membaik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (-9,21%; yoy). Selanjutnya, pembangunan logistik kereta api Lahat – Muara Enim – Prabumulih Tarahan terpantau mengalami perlambatan pada triwulan I 2022, tercermin dari volume impor besi dan baja yang mengalami kontraksi sebesar 30,09% (yoy) **(Grafik 1.41)**.

Grafik 1.39 Kredit LU Konstruksi

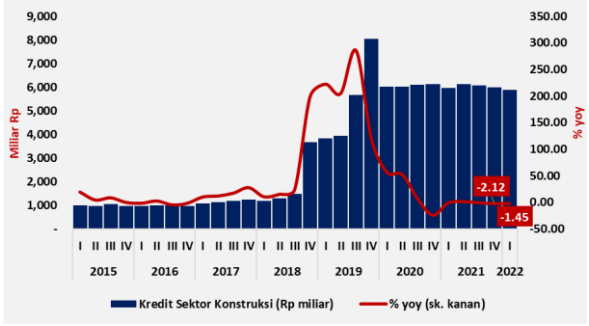

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.40 Pengadaan Semen

Sumber: Kemenperin RI

Grafik 1.41 Perkembangan Volume Impor Besi dan Baja

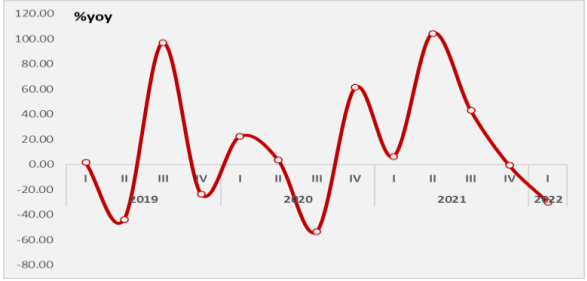

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

1.2.5 Lapangan Usaha Lainnya

LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan I 2022 tercatat masih mengalami kontraksi sebesar -4,86% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan dengan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -0,78% (yoy). Kembali menurunnya kinerja LU Pertambangan dan Penggalian disebabkan oleh peningkatan curah hujan yang mengganggu kegiatan operasional pertambangan dan *lifting* minyak bumi di Lampung Timur. Perkembangan tersebut juga tercermin dari masih berlanjutnya perlambatan pertumbuhan Kredit LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan laporan, yaitu sebesar 2,68% (yoy) **(Grafik 1.42)**, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (48,18%; yoy).

Grafik 1.42 Kredit LU Pertambangan dan Penggalian

Sumber: Bank Indonesia

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan I 2022 tercatat tumbuh sebesar 17,03% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,63% (yoy). Akselerasi kinerja LU ini dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat yang meningkat secara signifikan, tercermin dari meningkatnya volume arus penumpang pengguna jasa kapal *ferry* dan angkutan udara di Provinsi Lampung, yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 1,05% (yoy) dan 59,20% (yoy) **(Grafik 1.43)**. Pertumbuhan volume arus penumpang kapal *ferry* dan angkutan udara tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat terkontraksi 8,15% (yoy) dan 9,08% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan volume arus penumpang pengguna jasa kereta api pada triwulan laporan masih mengalami kontraksi sebesar 36,29% (yoy), membaik jika dibandingkan triwulan sebelumnya (-57,04%; yoy). Pertumbuhan volume arus penumpang yang lebih tinggi untuk setiap moda transportasi masih tertahan oleh penyebaran COVID-19 varian Omicron yang mencapai puncak penyebaran pada Februari 2022, meskipun segera terkendali pada Maret 2022.

Peningkatan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan laporan juga didorong oleh meningkatnya volume pengiriman Batu Bara dari Sumatera Selatan ke Provinsi Lampung. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan volume arus barang yang menggunakan jasa kereta api yang tumbuh 19,41% (yoy) **(Grafik 1.44)**, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (12,82%; yoy), serta meningkatnya volume ekspor Batu Bara pada triwulan laporan. Berbagai perkembangan positif dari kinerja LU Transportasi dan Pergudangan ini sejalan dengan terakselerasinya Saldo Bersih Tertimbang kegiatan usaha Sektor Pengangkutan pada SKDU triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 2,81% **(Grafik 1.45)**, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya (0,09%).

Grafik 1.43 Perkembangan Arus Penumpang Provinsi Lampung

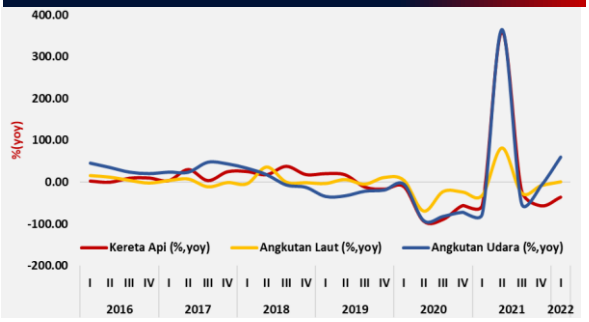

Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

Grafik 1.44 Perkembangan Arus Barang Menggunakan Kereta Api

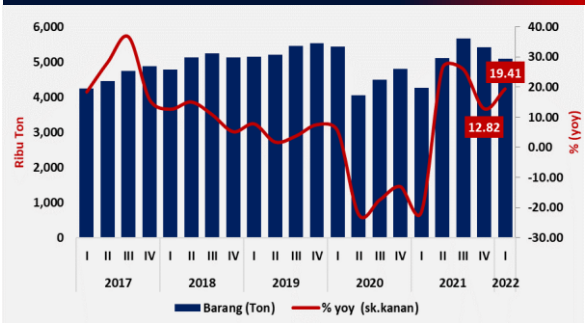

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 1.45 Kegiatan Dunia Usaha Sektor Pengangkutan

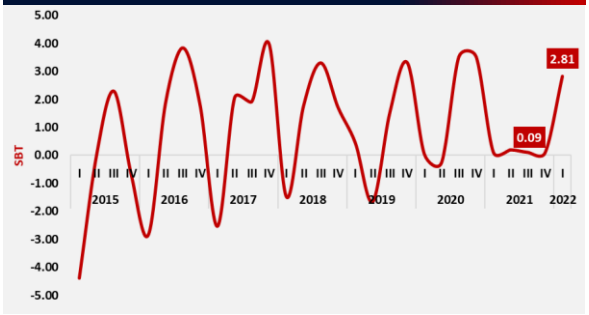

Sumber: SKDU Bank Indonesia

Kinerja LU Informasi dan Komunikasi pada triwulan I 2022 terkontraksi semakin dalam (-2,55%; yoy) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (-0,38%; yoy). Kontraksi pertumbuhan yang semakin dalam pada LU ini disebabkan oleh penurunan permintaan seiring dengan normalisasi aktivitas masyarakat untuk kembali menyelenggarakan kegiatan tatap muka, sejalan dengan percepatan akselerasi program vaksinasi pada triwulan laporan. Perkembangan tersebut terkonfirmasi dari berlanjutnya tren perlambatan pertumbuhan kredit LU Informasi dan Komunikasi sejak triwulan IV 2021. Pertumbuhan Kredit LU Informasi dan Komunikasi pada triwulan I 2022 tercatat tumbuh 0,79% (yoy) **(Grafik 1.46)**, lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya (1,97%; yoy).

Grafik 1.46 Kredit LU Informasi dan Komunikasi

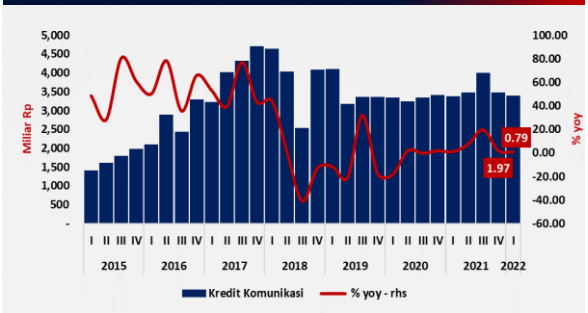

Sumber: Bank Indonesia

Ke depan, perbaikan kinerja ekonomi Provinsi Lampung diperkirakan terus berlanjut, meski risiko dari sektor eksternal perlu diwaspadai. Eskalasi tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang mendorong terjadinya kenaikan harga komoditas energi dan bahan pangan dunia berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, menahan pemulihan daya beli masyarakat, serta menghambat aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dan koordinasi yang erat dari seluruh pihak dalam rangka menjaga momentum perbaikan sekaligus peningkatan kinerja ekonomi. **Pertama**, memperkuat sinergi kebijakan dengan antar *stakeholders* di Provinsi Lampung dalam rangka mempercepat akselerasi program vaksinasi dan pembukaan sektor prioritas untuk menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi daerah. **Kedua**, meningkatkan produktivitas Lapangan Usaha Pertanian, terutama subsektor tanaman pangan, melalui peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) dan benih berkualitas, penguatan askes pembiayaan *procyclical* bagi Petani, serta memastikan ketersediaan pupuk berkualitas di Provinsi Lampung di tengah tereskalasinya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. **Ketiga**, mendorong sinergi pemulihan dan penguatan struktur Industri Pengolahan, terutama terkait ketersediaan bahan baku berkualitas, *debottlenecking* permasalahan logistik, dan percepatan pemulihan stabilitas finansial, dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, dan berkelanjutan melalui delapan langkah strategis[3]. **Keempat**, mendorong berlanjutnya peningkatan konsumsi rumah tangga dengan menjaga pemulihan daya beli masyarakat yang dapat dilakukan dengan optimalisasi peran TPID dalam rangka pengendalian inflasi, percepatan pemanfaatan dana desa, realisasi bantuan sosial/subsidi dan program perbaikan kesejahteraan terutama yang menyasar pada UMKM dan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), termasuk akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi serta percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien melalui perluasan penggunaan QRIS dan intensifikasi program elektronifikasi. **Kelima**, mendorong pertumbuhan investasi dengan menjaga persepsi positif investor swasta dan mengoptimalkan peran *linkage* IRU-RIRU-GIRU dan Forum Investasi Lampung (FOILA). Hal tersebut dapat dilakukan melalui

[3] i) Pemantauan pembukaan industri secara aman dan produktif yang disinergikan dengan akselerasi vaksinasi di daerah pusat industri, (ii) Koordinasi lebih lanjut untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembiayaan untuk mendorong pembiayaan perbankan kepada industri manufaktur, (iii) Kegiatan promosi ekspor berupa sosialisasi pemanfaatan kerja sama perdagangan internasional dan fasilitasi promosi perdagangan-investasi yang diarahkan untuk mendukung industri prioritas, serta kegiatan promosi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), (iv) Kegiatan kampanye pemanfaatan *Local Currency Settlement* (LCS) untuk penyediaan diversifikasi penggunaan mata uang dalam transaksi perdagangan internasional, (v) Penguatan kebijakan substitusi impor melalui perluasan lingkup neraca komoditas (jumlah komoditas) dan implementasi regulasi terkait, (vi) Program pengembangan Industri Kecil Menengah/Usaha Mikro, Kecil, Menengah (IKM/UMKM) manufaktur dengan melanjutkan program *capacity building* produksi dan ekspor, serta digitalisasi sistem pembayaran, dan melakukan fasilitasi *link and match*/*business matching*, fasilitasi *halal value chain*, serta implementasi *material center*, (vii) Penyusunan kajian industri manufaktur ramah lingkungan untuk mendukung komitmen penurunan emisi karbon, dan (viii) Monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan strategi pemulihan dan pengembangan industri manufaktur.

perbaikan iklim kemudahan berusaha termasuk aspek informasi (transparansi, kemudahan akses, kelengkapan, kekinian dan akurasi); aspek regulasi (kepastian, kejelasan, keselarasan, sederhana dan insentif investasi); aspek komunikasi dan program (strategi promosi dengan *public relation* yang handal, jejaring investor domestik dan internasional yang luas, serta visi, program dan *timeline* yang jelas); termasuk memperkuat sinergi antar Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait investasi, salah satunya melalui pembangunan kawasan industri dengan infrastruktur yang memadai sehingga dapat menarik minat investor; mempercepat penyempurnaan OSS RBA, terutama integrasi dengan dinas/lembaga dan kelengkapan fitur, serta regulasi pendukung di daerah agar implementasi OSS-RBA dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian peningkatan target investasi kedepan; pendataan proyek investasi yang *clean and clear* untuk dipromosikan terhadap investor

Keenam, penguatan *Local Value Chain* (LVC) dan sinergi program untuk Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Presidensi G20 Indonesia 2022 dengan mengidentifikasi potensi sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi antara lain melalui optimalisasi *Local Value Chain* (LVC) sebagai strategi dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah, dan tidak terbatas pada sektor pertanian pangan, namun termasuk sektor lainnya yaitu pertambangan, perkebunan, dan industri. Penguatan LVC tersebut diantaranya dengan membentuk klaster-klaster ekonomi baru atau eksosistem dimana korporasi dapat berperan sebagai aggregator dan *offtaker*. **Ketujuh**, perlu juga upaya untuk meningkatkan partisipasi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam LVC dan *Global Value Chain* (GVC) melalui sinergi kebijakan pengembangan IKM antar instansi. **Kedelapan**, pemantauan indikator terkini ekonomi daerah (*Early Warning System*)[4] yang akurat dan terkini untuk memantau denyut perekonomian daerah. **Kesembilan**, sinergi kegiatan dalam rangka mendukung Program Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), termasuk dalam kaitannya menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 yang disusun melalui *Calendar of Event*.

[4] Kebijakan pengendalian mobilitas masyarakat: indikator kasus harian, kasus aktif, kasus kematian, tingkat kesembuhan, dan kecepatan vaksinasi. Sementara itu, untuk kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat indikatornya meliputi: pertumbuhan ekonomi, daya beli (inflasi dan IK), PMI manufaktur, penjualan kendaraan bermotor, dan Indeks Penjualan ritel).

BAB 2. KEUANGAN DAERAH

- *Berdasarkan Raperda Anggaran Tahun 2022, alokasi APBD Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp6,56 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,01 triliun untuk anggaran belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan terkait relaksasi pendapatan retribusi tetap dilanjutkan sebagai upaya pemulihan di masa pandemi Covid-19. Penurunan belanja fiskal didorong oleh penurunan belanja modal dan hibah, meski di sisi lain terdapat peningkatan belanja modal pemerintah untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi untuk mendukung upaya perbaikan ekonomi yang terdampak Covid 19 selama tahun 2021.*
- *Memasuki triwulan I 2022, realisasi penyerapan anggaran pendapatan APBD Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp1,24 triliun atau mencapai 18,87% dari target penerimaan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp6,56 triliun. Sedangkan pada sisi belanja daerah, realisasi penyerapan anggaran belanja APBD Provinsi Lampung mencapai Rp507,40 miliar atau sebesar 7,4% dari target anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp7,01 triliun. Pencapaian ini secara nominal maupun persentase lebih tinggi dari realisasi triwulan I 2021 di sisi pendapatan meski lebih rendah di sisi belanja daerah.*
- *Dari sisi Penerimaan Negara, pada triwulan I 2022 Provinsi Lampung mencatatkan adanya kenaikan penerimaan sebesar 18,18% (yoy) atau sebesar Rp1,24 triliun yang bersumber dari penerimaan dari pendapatan asli daerah (54%) dan pendapatan transfer (48%). Sedangkan dari sisi pengeluaran, realisasi belanja sampai dengan triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp507,4 miliar, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komponen utama penyumbang realisasi belanja adalah belanja modal dan belanja operasi.*

2.1 APBD Provinsi Lampung

Berdasarkan Raperda Anggaran Tahun 2022, alokasi APBD-P Provinsi Lampung mencapai Rp6,56 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,01 triliun untuk anggaran belanja. Sebelumnya, APBD Provinsi Lampung untuk tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp7,54 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,56 triliun untuk anggaran belanja. Hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi melalui kebijakan relaksasi pendapatan retribusi sebagai upaya mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan penanggulangan dampaknya terhadap perekonomian daerah, dengan mempertimbangkan potensi pendapatan. Jika dibandingkan dengan APBDP 2021, anggaran pendapatan tercatat turun 13,00 % (yoy), demikian pula dengan anggaran belanja yang tercatat mengalami penurunan sebesar 7,22% (yoy) **(Grafik 2.1).** Penurunan belanja fiskal terutama di sisi belanja hibah, namun di sisi lain terdapat peningkatan belanja modal sebagai konsumsi pemerintah untuk perbaikan jalan, irigasi dan jaringan sebagai upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di awal tahun 2022.

Grafik 2. 1 Perkembangan APBD Provinsi Lampung

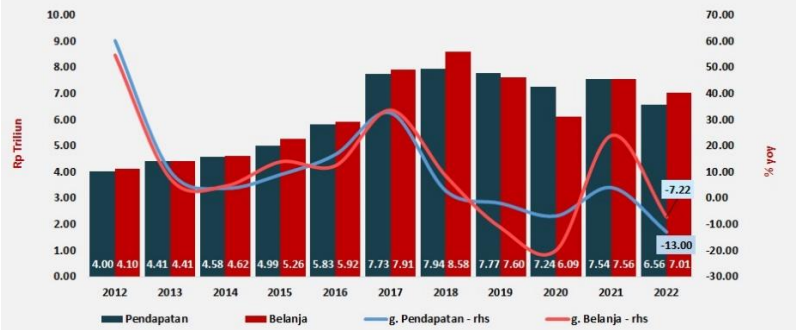

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, diolah

Memasuki triwulan I 2022 (data s.d. Maret 2022), realisasi penyerapan anggaran pendapatan APBD Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp1,24 triliun atau mencapai 18,87% dari target penerimaan pendapatan di tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp6,56 triliun. Pencapaian ini terpantau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,05 triliun atau terserap sebesar 13,79% dari target pendapatan APBD tahun 2021 **(Tabel 2.1)**. Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya realisasi pos penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pendapatan Transfer yang tercatat meningkat masing-masing sebesar 18,18% (yoy) dan 14,31% (yoy). Adapun peningkatan pada komponen PAD disumbang oleh Pendapatan Pajak Daerah dengan realisasi sebesar 21,53% di triwulan I 2022 serta Lain-lain PAD yang Sah dengan realisasi sebesar 13,33%. Realisasi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 16,33% (yoy) untuk komponen Pendapatan Pajak Daerah dan sebesar 6,71% (yoy) untuk Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah di tahun 2021. Selain pada pos PAD, pada pos Pendapatan Transfer juga terdapat kenaikan realisasi pada komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 34,33% (yoy).

Sedangkan pada sisi belanja daerah, realisasi penyerapan anggaran belanja APBD Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 tercatat mencapai Rp507,40 miliar atau sebesar 7,24% dari target anggaran belanja tahun 2022 yang sebesar Rp7,01 triliun. Secara nominal dan persentase, realisasi anggaran belanja di periode ini tercatat mengalami penurunan 40,06% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp846,49 miliar atau 11,32% dari target belanja APBD tahun 2021 **(Tabel 2.1)**. Penurunan realisasi belanja daerah pada periode

laporan terutama didorong oleh penyerapan anggaran pada pos Belanja Modal sebesar Rp2,85 miliar (0,19%) di triwulan I 2022 dari Rp3,29 miliar (0,40%) pada triwulan I 2021 dan pos Belanja Operasi sebesar Rp426,10 miliar (10,13%) di triwulan I 2022 dari Rp477,87 miliar (9,05%) pada triwulan I 2021. Secara rinci, penurunan realisasi belanja daerah pada pos dimaksud terutama ditopang oleh adanya penurunan realisasi komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rp 592 juta atau 0,21%), Belanja Hibah (Rp1,26 miliar atau 0,25%); Belanja Bunga (Rp4,12 miliar atau 16,15%), Belanja Pegawai (Rp271,70 miliar atau 13,56%). Namun di sisi lain terdapat peningkatan belanja modal sebagai konsumsi pemerintah untuk perbaikan jalan, irigasi dan jaringan sebagai upaya mengakselerasi perbaikan ekonomi regional yang terdampak pandemi Covid 19 selama tahun 2021.

Tabel 2. 1 Struktur APBD Provinsi Lampung **(dalam Miliar Rp)**

No	Uraian	APBD 2021	Realisasi		APBD-P	Realisasi		APBD-P	APBD-P	Realisasi		Realisasi		Realisasi		APBD 2022	Realisasi		% yoy
			Tw I 2021	%	2021	Tw II 2021	%	2021	2021	Tw III 2021	%	Tw IV 2021	%	Tw IV 2021	%		Tw I 2022	%	
1	**Pendapatan**	7,593.71	1,047.25	13.79	7,529.73	2,686.98	35.68	7,538.15	7,538.15	5,091.53	67.54	7,467.65	99.06	7,467.65	99.06	6,558.09	1,237.60	18.87	18.18
	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3,337.31	525.61	15.75	3,337.31	1,316.37	39.44	3,336.26	3,336.26	2,187.36	65.56	3,247.85	97.35	3,247.85	97.35	3,447.85	642.28	18.63	22.20
	Pendapatan Pajak Daerah	2,797.56	456.74	16.33	2,797.56	1,188.27	42.48	2,653.66	2,653.66	1,898.79	71.55	2,721.14	102.54	2,721.14	102.54	2,678.86	576.82	21.53	26.29
	Pendapatan Retribusi Daerah	11.43	5.20	45.48	11.43	9.99	87.38	13.60	13.60	22.97	168.91	27.16	199.74	27.16	199.74	8.42	1.00	11.91	(80.71)
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	75.33	33.26	44.16	75.33	33.34	44.25	225.33	225.33	33.34	14.79	33.34	14.79	33.34	14.79	276.86	-	-	-
	Lain-lain PAD yang Sah	453.00	30.41	6.71	453.00	84.78	18.71	443.67	443.67	232.26	52.35	466.21	105.08	466.21	105.08	483.71	64.46	13.33	111.93
	b. Pendapatan Transfer	4,195.65	519.37	12.38	4,178.50	1,365.56	32.68	4,153.42	4,153.42	2,896.47	0.00	4,209.16	101.34	4,209.16	0.00	3,090.98	593.66	19.21	14.31
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,199.67	516.72	12.30	4,149.07	1,358.91	32.75	4,145.96	4,145.96	2,889.39	69.69	4,201.78	101.35	4,201.78	101.35	3,062.18	590.11	19.27	14.20
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.43	2.64	8.98	29.43	6.65	22.59	7.46	7.46	0.84	11.23	7.37	98.83	7.37	65.68	28.80	3.55	12.33	34.33
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.92	2.27	16.34	13.92	5.05	36.29	48.48	48.48	5.05	10.42	10.64	21.95	10.64	21.95	19.26	1.66	8.62	-27.02
	Pendapatan Hibah	13.92	2.20	15.79	13.92	4.97	35.73	48.48	48.48	7.62	15.73	10.56	21.79	10.56	21.79	19.26	1.66	8.62	-24.45
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	100.00	-	0.00	0.08	100.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
2	**Belanja**	7,480.93	846.49	11.32	7,417.15	2,117.77	28.55	7,557.05	7,557.05	4,262.45	56.40	7,097.82	93.92	7,097.82	0.00	7,011.70	507.40	7.24	(40.06)
	a. Belanja Operasi	5,281.92	477.87	9.05	5,281.87	1,390.52	26.33	5,352.38	5,352.38	3,263.01	60.96	5,151.44	96.25	5,151.44	8,450.01	4,204.54	426.10	10.13	(10.83)
	Belanja Pegawai	2,037.89	317.19	15.56	2,037.88	904.55	44.39	2,001.14	2,001.14	1,364.02	68.16	1,934.76	96.68	1,934.76	2,838.47	2,003.66	271.70	13.56	-14.34
	Belanja Barang dan Jasa	1,588.88	115.15	0.00	1,525.01	397.91	26.09	1,594.90	1,594.90	836.82	52.47	1,506.79	94.47	1,506.79	2,871.80	1,661.51	148.69	8.95	29.13
	Belanja Bunga	33.00	6.47	19.60	32.00	12.22	38.19	22.50	22.50	17.46	77.59	22.16	98.50	22.16	28.56	25.49	4.12	16.15	-36.36
	Belanja Hibah	1,721.50	39.00	2.27	1,679.99	75.18	4.48	1,728.58	1,728.58	1,043.88	60.39	1,682.89	97.36	1,682.89	2,786.73	504.46	1.26	0.25	-96.76
	Belanja Bantuan Sosial	8.26	0.06	0.72	6.99	0.66	9.41	5.26	5.26	0.84	15.94	4.84	92.08	4.84	30.37	9.42	0.33	3.49	452.55
	b. Belanja Modal	828.81	3.29	0.40	855.53	28.64	3.35	923.70	923.70	205.40	22.24	849.67	91.98	849.67	3,821.02	1,468.30	2.85	0.19	-13.18
	Belanja Modal Tanah	4.64	-	-	4.64	-	-	4.64	2.44	0.06	2.63	0.13	5.23	0.13	4.9	0.07	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.26	2.04	0.00	168.96	15.51	9.18	168.96	194.60	79.11	40.65	185.59	95.37	185.59	456.5	180.29	2.18	1.21	6.76
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202.01	1.24	0.00	255.71	12.47	4.88	255.71	254.52	61.44	24.14	240.98	94.68	240.98	998.2	282.33	0.59	0.21	-52.16
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	350.75	-	-	394.14	0.02	0.00	394.14	437.23	61.60	14.09	390.08	89.22	390.08	2768.9	975.48	-	-	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.10	-	-	32.07	0.64	1.99	32.07	34.87	3.16	9.07	32.85	94.20	32.85	362.2	26.93	0.09	0.32	-
	c. Belanja Tidak Terduga	30.00	0.00	-	3.00	0.07	2.46	30.00	30.00	0.08	0.27	0.13	0.42	0.13	0.00	31.50	-	-	-99.89
	d. Belanja Transfer	1,340.20	365.34	27.26	1,249.76	698.54	55.89	1,250.96	1,250.96	793.95	63.47	1,096.59	87.66	1,096.59	0.00	1,307.35	78.45	6.00	-10.95

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, diolah

2.1.1 Anggaran Pendapatan Provinsi Lampung

Berdasarkan APBD Provinsi Lampung tahun 2022, alokasi anggaran pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp6.558 triliun, mengalami penurunan sebesar 13,00% (yoy) dibandingkan dengan alokasi pendapatan pada APBD-P 2021 yang sebesar Rp7.538 triliun (Tabel 2.2). Penurunan tersebut disumbang oleh penurunan pagu pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 60,27% (yoy) dari sebesar Rp48,48 miliar menjadi Rp19,22 miliar pada periode laporan. Penurunan pagu pada pos tersebut sebesar Rp29,22 miliar dari APBDP 2021 merupakan upaya Provinsi Lampung mengakselerasi pertumbuhan perekonomian daerah melalui optimalisasi pos penerimaan pajak dan peningkatan kinerja BUMD sebagai salah satu komponen utama pemacu pertumbuhan dan pengembangan ekonomi daerah tercermin dari meningkatnya kedua pos dimaksud.

Selain itu, tercatat pula adanya penurunan pagu pada pos Retribusi Daerah sebesar 38,04% (yoy) dari sebesar Rp13,60 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi Rp8,42 miliar di periode laporan. Hal ini seiring dengan masih adanya relaksasi penerimaan retribusi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.2 Struktur Pendapatan APBD Provinsi Lampung **(dalam Miliar Rp)**

Uraian	APBD 2019	APBD 2020	APBD-P 2020	APBD 2021	APBD-P 2021	APBD 2022	Δ '21 - '22
Pendapatan	**7,371.43**	**7,845.82**	**7,244.17**	**7,593.71**	**7,529.73**	**6,558.09**	**(12.90)**
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**2,987.25**	**3,298.43**	**2,962.40**	**3,337.31**	**3,337.31**	**3,447.85**	**3.31**
Pendapatan Pajak Daerah	2,664.93	2,829.82	2,453.82	2,797.56	2,797.56	2,678.86	(4.24)
Pendapatan Retribusi Daerah	13.05	16.40	11.43	11.43	11.43	8.42	(26.30)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.83	32.20	30.06	75.33	75.33	276.86	267.54
Lain-lain PAD yang Sah	277.45	420.01	467.09	453.00	453.00	483.71	6.78
b. Pendapatan Transfer	**4,324.35**	**4,495.74**	**4,267.85**	**4,242.48**	**4,178.50**	**3,090.98**	**(26.03)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,324.35	**4,495.74**	4,221.42	4,213.04	4,149.07	3,062.18	**(26.20)**
- Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	180.25	163.64	206.39	135.37	135.37	670.95	**395.65**
- Dana Alokasi Umum (DAU)	1,906.78	1,922.70	1,739.92	1,783.41	1,726.30	12,021.11	**596.35**
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	2,237.32	2,409.40	2,275.11	2,276.87	2,287.40	1,920.27	**(16.05)**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0.00	0.00	46.43	29.43	29.43	28.80	**(2.16)**
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**59.83**	**51.66**	**13.92**	**13.92**	**13.92**	**19.26**	**38.40**
Pendapatan Hibah	13.54	13.92	**13.92**	13.92	13.92	19.26	38.40
Pendapatan Lainnya	46.30	19.57	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, diolah

Di sisi lain, alokasi pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer juga tercatat mengalami penurunan pagu sebesar 25,58% (yoy) atau menjadi sebesar Rp593,66 miliar dibandingkan dengan APBDP 2021. Kontraksi ini terutama didorong oleh adanya penurunan alokasi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 26,14% dengan rincian penurunan terbesar berada pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -16,05% (yoy) atau menjadi sebesar Rp550,71 miliar. Di sisi lain, Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan, dengan alokasi pagu sebesar Rp7,46 miliar dalam APBD 2021 menjadi sebesar Rp3,55 miliar di tahun 2022 (naik sebesar 285,93%; yoy).

Sementara itu, rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Lampung tercatat mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sebesar 44,26% menjadi 52,57% pada tahun 2022 (Grafik 2.2). Kenaikan DOF ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat penurunan ketergantungan Provinsi Lampung pada pemerintah Pusat dari sisi pendapatan. Hal tersebut juga sejalan dengan target penerimaan Pajak Daerah di tahun 2022 yang mengalami kenaikan sebesar 0,95% (yoy) dari sebesar Rp2,65 triliun dalam APBD-P 2021 menjadi sebesar Rp2,68 triliun pada APBD 2022, seiring dengan upaya akselerasi pemulihan perekonomian nasional dan daerah yang terus didorong oleh pemerintah.

Grafik 2.2 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Lampung

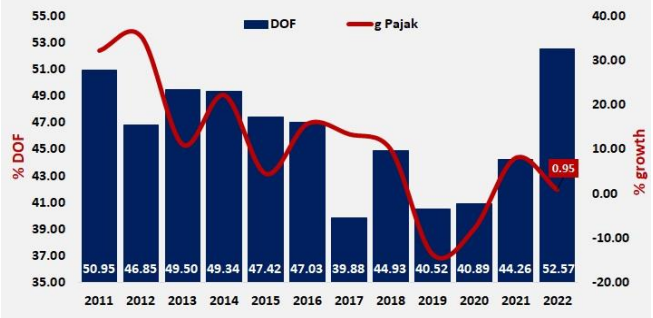

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Lampung, diolah

2.1.2 Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung

Perkembangan keuangan daerah Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp1,24 triliun atau mencapai 18,87% dari target anggaran pendapatan tahun 2022 yang sebesar Rp6,56 triliun. Pencapaian ini tercatat mengalami peningkatan sebesar 18,18% (yoy) dibandingkan realisasi pendapatan pada periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp1,05 triliun (13,79%) **(Tabel 2.3).**

Realisasi pendapatan dari komponen PAD pada periode laporan tercatat sebesar Rp642,28 miliar (18,63%), lebih tinggi apabila dibandingkan pencapaian pada triwulan I 2021 yang sebesar Rp525,61 miliar (15,75%). Komponen PAD secara umum menjadi pendorong utama pertumbuhan keuangan daerah yang menunjang jalannya perekonomian regional. Pada periode laporan komponen ini mengalami peningkatan realisasi sebesar 22,20% (yoy), utamanya disumbang oleh naiknya serapan Lain-Lain PAD yang Sah (111,93%; yoy) dan pajak daerah (26,29%; yoy).

Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Lampung

(dalam Miliar Rp)

Uraian	APBD-P 2021	Realisasi TW I 2021		APBD 2022	Realisasi TW I 2022		yoy
		Rupiah	%		Rupiah	%	
Pendapatan	**7,538.15**	**1,047.25**	**13.79**	**6,558.09**	**1,237.60**	**18.87**	**18.18**
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**3,336.26**	**525.61**	**15.75**	**3,447.85**	**642.28**	**18.63**	**22.20**
Pendapatan Pajak Daerah	2,653.66	456.74	16.33	2,678.86	576.82	21.53	26.29
Pendapatan Retribusi Daerah	13.60	5.20	45.48	8.42	1.00	11.91	-80.71
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	225.33	33.26	44.16	276.86	0.00	0.00	0.00
Lain-lain PAD yang Sah	443.67	30.41	6.71	483.71	64.46	13.33	111.93
b. Pendapatan Transfer	**4,153.42**	**519.37**	**12.38**	**3,090.98**	**593.66**	**19.21**	**14.31**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,145.96	516.72	12.26	3,062.18	590.11	19.27	14.20
- Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	132.26	66.71	49.28	670.95	65.58	9.77	-1.68
- Dana Alokasi Umum (DAU)	1,726.30	445.85	25.00	12,021.11	4,007.04	33.33	798.73
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	2,287.40	4.16	0.18	1,920.27	550.71	28.68	13,136.86
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	7.46	2.64	8.98	28.80	3.55	12.33	34.33
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**443.67**	**2.27**	**16.34**	**19.26**	**1.66**	**8.62**	**-27.02**
Pendapatan Hibah	**48.48**	2.20	15.79	19.26	1.66	8.62	-24.45
Pendapatan Lainnya	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, diolah

Sementara itu pos Pendapatan Retribusi Daerah tercatat mengalami penurunan serapan yang cukup signifikan mencapai -80,71% atau sebesar Rp4,2 miliar (11,91%); dari Rp5,20 miliar pada triwulan I 2021 menjadi sebesar Rp1 miliar di periode laporan. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pemberlakuan kembali pengetatan mobilitas level 3 dan level 2 sehingga mengurangi mobilitas masyarakat sebagaimana tercermin pada penurunan realisasi di hampir seluruh komponen retribusi seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi terminal, retribusi pelayanan pelabuhan, dan tempat khusus parkir. Adapun kontraksi yang lebih dalam pada pos pendapatan Retribusi Daerah tertahan oleh masih tingginya penyerapan pada retribusi pelayanan kesehatan seiring dengan masih banyaknya frekuensi tes swab dan/atau antigen di masyarakat, serta perluasan program vaksinasi COVID-19 seiring dengan upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang terus berlanjut pada triwulan IV 2021.

Pos Pendapatan Transfer juga mengalami kenaikan realisasi sebesar 14,31% (yoy), dimana pada triwulan I 2022 mencatatkan realisasi sebesar Rp593,66 miliar (19,21%) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp519,37 miliar (12,38%) (Grafik 2.3). Secara rinci, kenaikan ini terutama ditopang oleh adanya peningkatan realisasi pada pos Dana Alokasi Khusus yang terserap sebesar 28,68% pada triwulan I 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya terealisasi sebesar 0,000002%. Hal ini sejalan dengan upaya

percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui realisasi DAK Fisik sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari penyaluran DAK Fisik di Provinsi Lampung. Adapun langkah-langkah strategis penyaluran DAK Fisik yang dilakukan oleh Pemda adalah percepatan pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa.

Untuk komponen penerimaan Pajak Daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mengalami penurunan realisasi pada triwulan I 2022 masing-masing sebesar Rp129,75 miliar (-32,11%; yoy); Rp108,44 miliar (-15,81%; yoy); dan Rp129,19 miliar (-30,37%; yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. **(Grafik 2.4)**. Pelemahan penjualan otomotif akibat pandemi COVID-19, pemberlakuan kembali pengetatan mobilitas level 3 dan level 2 dan meningkatnya harga minyak dunia akibat adanya ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina menjadi faktor yang berpengaruh pada penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Pajak air permukaan juga mengalami penurunan realisasi di triwulan I 2022 sebesar -30,37% (yoy), dari Rp1,10 miliar di triwulan I 2021 menjadi Rp765,9 juta di periode laporan. Sementara itu, realisasi komponen pajak rokok terpantau meningkat sebesar 22,08% (yoy), dari Rp41,9 juta di triwulan I 2021 menjadi Rp51,2 juta di periode laporan.

Grafik 2.3 Realisasi dan Target Pendapatan APBD Provinsi Lampung

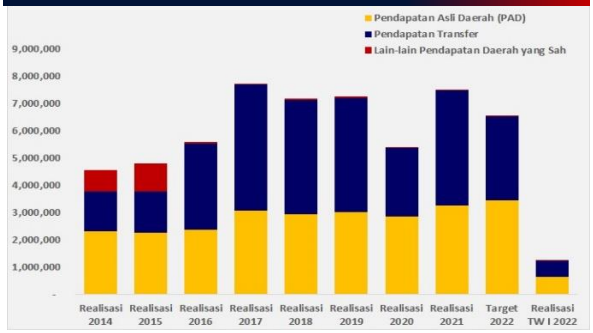

Grafik 2.4 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Provinsi Lampung

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung,diolah

2.1.3 Anggaran Belanja Provinsi Lampung

Anggaran belanja Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer mengalami penurunan pagu pada 2022, dengan total anggaran belanja mencapai Rp7,01 triliun atau mengalami penurunan sebesar -7,22% dibandingkan dengan APBD-P 2021 yang sebesar Rp7,56 triliun (Tabel 2.4). Terkontraksinya pagu belanja daerah terutama disebabkan oleh turunnya alokasi Belanja Operasi (-21,45%; yoy) yang pada tahun 2022 merupakan salah satu pos belanja dengan alokasi terbesar, dengan porsi sebesar 60% dari total anggaran belanja daerah. Pos Belanja Modal mengalami peningkatan alokasi tertinggi (58,96%; yoy) pada APBD 2022 menjadi sebesar Rp1.468,30 miliar dibandingkan dengan alokasi pada APBD-P 2021 yang sebesar Rp923,70 miliar. Adapun komponen belanja modal yang mengalami peningkatan alokasi tertinggi mencapai lebih dari 100% yaitu komponen alokasi belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan yakni sebesar 123,11% (yoy). Sementara itu, pos Belanja Tidak Terduga tercatat meningkat yakni sebesar 5,00% (yoy), dari Rp30,00 miliar pada APBD-P 2021 menjadi Rp31,50 miliar di tahun 2022. Pos Belanja Transfer juga terpantau mengalami peningkatan sebesar 4,51% (yoy).

Sementara itu, pada komponen belanja dengan pangsa terbesar yaitu Belanja Operasi tercatat mengalami penurunan alokasi sebesar -21,45% (yoy); dari alokasi sebesar Rp5,35 triliun pada APBD-P 2021 menjadi Rp4,20 triliun pada APBD 2022. Penurunan ini didorong oleh adanya pengurangan alokasi yang signifikan khususnya pada pagu pos Belanja Hibah yang pada APBD-P 2022 ini ditetapkan mencapai Rp504,46 miliar dari Rp1.728 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, pada komponen Belanja Operasi tercatat alokasi belanja bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami peningkatan tertinggi yakni sebesar 79,30%. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut pemerintah dalam upaya penanganan bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Tabel 2. 4 Struktur Belanja APBD Provinsi Lampung

Miliar Rp

Uraian	APBD-P 2020	APBD 2021	APBD-P 2021	APBD 2022	Δ '21 - '22
Belanja	**7,381.12**	**7,480.93**	**7,557.05**	**7,011.70**	**(7.22)**
a. Belanja Operasi	**5,088.80**	**5,281.92**	**5,352.38**	**4,204.54**	**(21.45)**
Belanja Pegawai	2,005.57	2,037.89	2,001.14	2,003.66	0.13
Belanja Barang dan Jasa	1,588.88	1,588.88	1,594.90	1,661.51	4.18
Belanja Bunga	33.00	33.00	22.50	25.49	13.29
Belanja Hibah	1,460.84	1,721.50	1,728.58	504.46	(70.82)
Belanja Bantuan Sosial	0.50	8.26	5.26	9.42	79.30
b. Belanja Modal	**844.61**	**828.81**	**923.70**	**1,468.30**	**58.96**
c. Belanja Tidak Terduga	**160.88**	**30.00**	**30.00**	**31.50**	**5.00**
d. Belanja Transfer	**1,286.84**	**1,340.20**	**1,250.96**	**1,307.35**	**4.51**

BPKAD Provinsi Lampung, diolah

Alokasi Belanja Modal mencatatkan peningkatan sebesar 58,96% (yoy), yang disumbang oleh kenaikan pagu pada pos Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan pos belanja Modal Gedung dan Bangunan masing-masing sebesar 123,11% (yoy) dan 10,92% (yoy). Kenaikan alokasi ini sejalan dengan program percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama pemerintah. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi (dari sisi permintaan) maupun jangka panjang yang berkontribusi melalui peningkatan kapasitas produksi serta perbaikan arus barang dan jasa (dari sisi penawaran). Akselerasi pembangunan infrastruktur telah dicanangkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan peningkatan daya saing.

Grafik 2.5 Perbandingan Pangsa Komponen Anggaran Belanja Provinsi Lampung

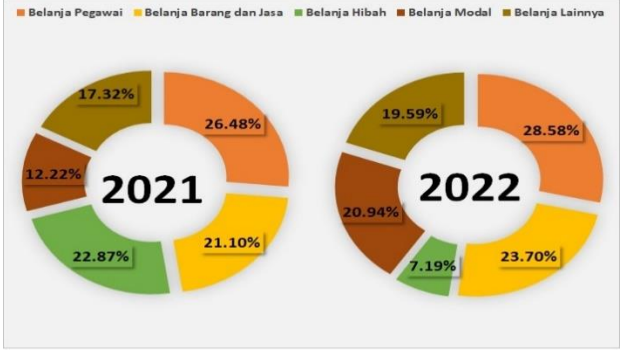

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Lampung, diolah

Grafik 2.6 Proporsi Anggaran Belanja Provinsi Lampung

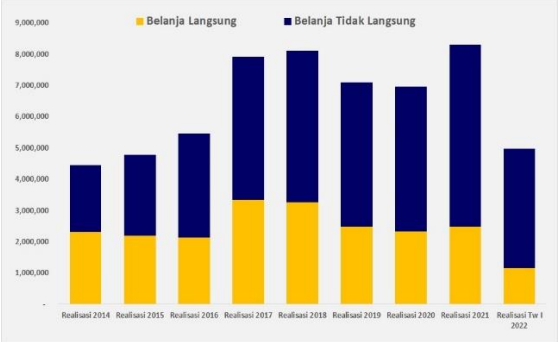

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Lampung, diolah

2.1.4 Realisasi Belanja Provinsi Lampung

Sampai dengan triwulan I 2022, realisasi belanja daerah di Provinsi Lampung mencapai Rp507,40 miliar atau 7,24% dari total pagu anggaran belanja tahun 2022 yang sebesar Rp7,01 triliun. Pencapaian ini baik secara nominal maupun persentase tercatat lebih rendah dari realisasi triwulan I 2021 yang sebesar Rp846,49 miliar atau 11,32% dari pagu APBD-P 2021 **(Tabel 2.5)**. Dari empat komponen pembentuk anggaran belanja, komponen dengan pangsa terbesar yakni Belanja Operasi mencatatkan realisasi sebesar 10,13% dari total pagu APBD 2022 atau sebesar Rp426,10 miliar; lebih rendah -10,83 (yoy) dibandingkan dengan serapan anggaran periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9,05% atau Rp477,87 miliar. Penurunan realisasi pada komponen Belanja Operasi didukung oleh pos belanja hibah, pos belanja bunga, dan pos belanja pegawai dengan realisasi masing-masing sebesar Rp1,26 miliar, Rp4,12 miliar, dan Rp271,70 miliar.

Tabel 2.5 Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung TW I-Tahun 2022

Miliar Rp

Uraian	APBD-P 2021	Realisasi TW I 2021		APBD 2022	Realisasi TW I 2022		% yoy
		Rupiah	%		Rupiah	%	
Belanja	**7,557.05**	**846.49**	**11.32**	**7,011.70**	**507.40**	**7.24**	**-40.06**
a. Belanja Operasi	**5,352.38**	**477.87**	**9.05**	**4,204.54**	**426.10**	**10.13**	**-10.83**
Belanja Pegawai	2,001.14	317.19	15.56	2,003.66	271.70	13.56	-14.34
Belanja Barang dan Jasa	1,594.90	115.15	0.00	1,661.51	148.69	8.95	29.13
Belanja Bunga	22.50	6.47	19.60	25.49	4.12	16.15	-36.36
Belanja Hibah	1,728.58	39.00	2.27	504.46	1.26	0.25	-96.76
Belanja Bantuan Sosial	5.26	0.06	0.72	9.42	0.33	3.49	452.55
b. Belanja Modal	**923.70**	**3.29**	**0.40**	**1,468.30**	**2.85**	**0.19**	**-13.18**
c. Belanja Tidak Terduga	**30.00**	**-**	**-**	**31.50**	**-**	**-**	**-99.89**
d. Belanja Transfer	**1,250.96**	**365.34**	**27.26**	**1,307.35**	**78.45**	**6.00**	**-10.95**

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Lampung, diolah

Selanjutnya yang menopang peningkatan capaian serapan tertinggi belanja operasi adalah komponen belanja bantuan sosial, dengan tingkat kenaikan realisasi pada triwulan I 2022 ini masing-masing sebesar 452,55% atau Rp9,42 miliar. Pos Belanja Barang dan Jasa terpantau juga mengalami kenaikan realisasi sebesar 29,13% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan persentase realisasi terhadap APBD 2022 sebesar 8,95% atau Rp148,69 miliar.

Secara persentase, komponen belanja yang tercatat juga mengalami penurunan realisasi adalah Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, dimana untuk komponen Belanja Modal mencatatkan realisasi sebesar Rp2,85 miliar atau 0,19% dari pagu anggaran, lebih rendah (-13,18%; yoy) dibandingkan triwulan I 2021 yang tercatat sebesar Rp3,29 miliar atau sebesar 0,40%. Secara rinci, penurunan realisasi pos komponen Belanja Modal pada triwulan I 2022 didominasi oleh Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp592,1 juta (0,21% dari pagu anggaran). Sedangkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencatatkan peningkatan realisasi sebesar 6,76% atau Rp2,18 miliar (1,21% dari target yang ditetapkan). Komponen Belanja Transfer juga mengalami penurunan realisasi sebesar -10,95% (yoy), dimana pada triwulan I 2022 terealisasikan sebesar Rp78,45 miliar (6,00% dari target yang ditetapkan) sedangkan pada periode yang sama tahun 2021 mampu mencatatkan realisasi sebesar Rp365,34 miliar atau 27,26% dari target yang ditetapkan.

2.2 Belanja APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, total anggaran belanja pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar Rp23,42 triliun atau menurun sebesar 11,80% (yoy) dibandingkan anggaran belanja triwulan I 2021 yang sebesar Rp24,49 triliun. Adapun untuk porsi anggaran belanja tertinggi terpantau dimiliki oleh Kab. Lampung Tengah yang mencapai 11,71% (Rp2,74 triliun) dari total keseluruhan anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung; diikuti oleh Lampung Timur sebesar 10,11%; dan Lampung Selatan sebesar 9,88%. Sedangkan Kabupaten

dengan pangsa alokasi belanja daerah terendah adalah Pesisir Barat (3,18%), Tulang Bawang Barat (3,62%), dan Kota Metro (3,73%) **(Grafik 2.7)**. Berdasarkan strukturnya, anggaran belanja kabupaten/kota pada triwulan I 2022 didominasi oleh anggaran Belanja Operasi dengan kontribusi sebesar 67,97%, diikuti dengan Belanja Transfer (18,77%), dan Belanja Modal (12,71%) **(Grafik 2.8).**

Grafik 2.7 Pangsa Anggaran Belanja Kab/Kota

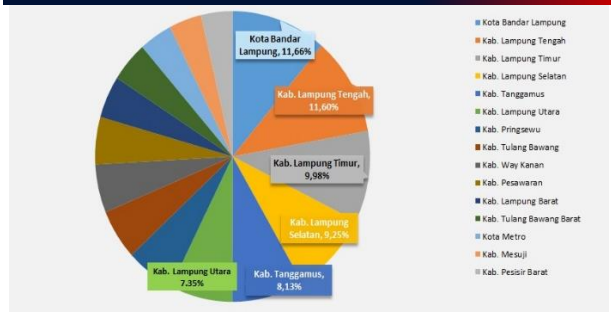

Grafik 2.8 Struktur Belanja APBD Kab/Kota

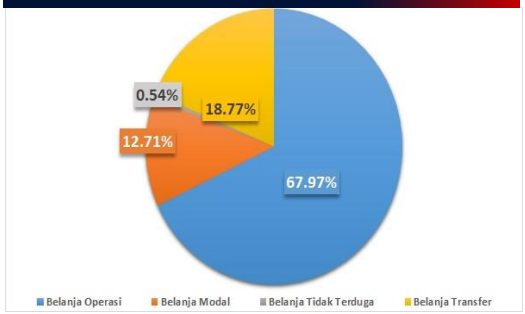

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, diolah

Grafik 2.9 Realisasi Belanja per Kab/Kota Triwulan I 2022

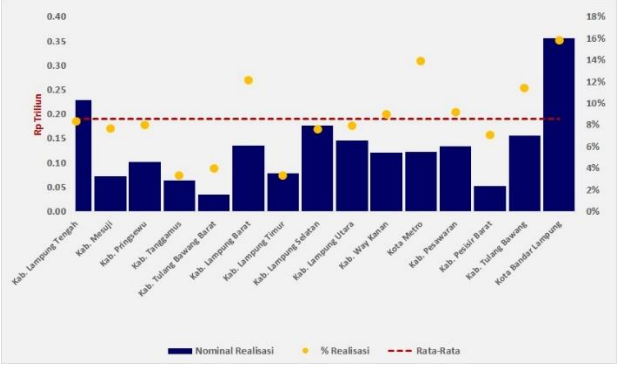

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, diolah

Realisasi belanja APBD dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 tercatat mencapai Rp1.983,12 miliar atau 8,47% terhadap total anggaran, dengan rata-rata realisasi sebesar 8,60% (Grafik 2.9). Adapun secara nominal realisasi tertinggi dicapai oleh Kota Bandar Lampung dengan total realisasi pada triwulan I 2022 sebesar Rp357,02 miliar; diikuti oleh Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan dengan capaian realisasi masing-masing sebesar Rp229,04 miliar dan Rp176,21 miliar serta Kabupaten Tulang Bawang dengan nilai realisasi sebesar Rp155,62 miliar. Sedangkan dari sisi persentase, realisasi terbesar dimiliki oleh Kota Bandar Lampung yang tercatat sebesar 15,83%, diikuti Kota Metro (13,96%) dan Kabupaten Lampung Barat (12,16%) serta Kabupaten Tulang Bawang sebesar 11,46%.

2.3 Penerimaan dan Belanja Negara di Provinsi Lampung

2.3.1 Penerimaan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah tingkat Kanwil oleh DJPb Provinsi Lampung, jumlah Penerimaan Negara di Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 mencapai Rp2,11 triliun, tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,12% (yoy) dari Rp1,88 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan Negara tersebut bersumber dari

penerimaan perpajakan (91,91%) serta penerimaan negara bukan pajak (8,09%). Pada triwulan I 2022, penerimaan perpajakan terealisasikan sebesar Rp1,94 triliun atau mengalami kenaikan realisasi sebesar 0,17% (yoy) dari Rp1,66 triliun pada triwulan I 2021. Sementara itu, komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak mencatatkan realisasi sebesar Rp170,67 miliar; tercatat menurun sebesar -0,23% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp221,93 miliar.

Secara lebih rinci, komponen Penerimaan Perpajakan yang didominasi oleh penerimaan dalam negeri (74,31%) utamanya berasal Pajak Pertambahan Nilai (pangsa 37,94%) yang terealisasikan sebesar Rp487,38 miliar pada triwulan I 2022, diikuti dengan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp681,59 miliar. Sementara itu, pada penerimaan luar negeri yang berasal dari Pajak Perdagangan Internasional pada triwulan I 2022 mencatatkan realisasi sebesar Rp233,82 miliar atau menurun signifikan sebesar -46,10% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini didominasi oleh realisasi komponen pendapatan bea masuk sebesar Rp108,38 miliar yang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2021 yang mencapai sebesar Rp161,89 miliar. Adapun penurunan pendapatan Pajak Perdagangan Internasional yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan pos Pendapatan Bea Keluar yang mencapai sebesar Rp170,67 miliar atau meningkat signifikan sebesar 130,59%.

Tabel 2.6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah Negara

Laporan Arus Kas Masuk	Tw I Tahun 2021 (Miliar Rp)	Tw II Tahun 2021 (Miliar Rp)	Tw III Tahun 2021 (Miliar Rp)	Tw IV Tahun 2021 (Miliar Rp)	Tw I Tahun 2022 (Miliar Rp)	% Δ Tw I 2021 - 2022 (yoy)
Pendapatan Negara & Hibah	**1,878.33**	**4,245.20**	**7,100.99**	**9,654.03**	**2,108.85**	**12.27**
Penerimaan Perpajakan	**1,656.40**	**3,774.22**	**6,234.06**	**8,570.89**	**1,938.18**	**17.01**
- Pendapatan Pajak Dalam Negeri	**1,222.58**	**2,744.44**	**4,684.43**	**6,368.88**		**(100.00)**
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	556.34	1,321.18	2,021.35	2,827.74	681.59	22.51
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	624.03	1,316.76	2,464.67	3,251.52	487.38	(21.90)
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	7.93	38.28	94.59	151.43	1.61	(79.64)
4) Pendapatan BPHTB	-	-	-	-	-	-
5) Pendapatan Cukai	0.04	0.05	0.08	0.098	0.05	22.08
6) Pendapatan Pajak Lainnya	34.25	68.17	103.74	138.10	32.14	(6.17)
7) Pendapatan Penagihan Bunga Pajak	-	-	-	1,533.26	-	-
- Pendapatan Pajak Perdagangan Intl.	**433.82**	**1,029.78**	**1,549.63**	**2,202.01**	**233.82**	**(46.10)**
1) Pendapatan Bea Masuk	161.89	251.81	333.83	363.32	108.38	(33.05)
2) Pendapatan Bea Keluar	271.93	777.97	1,215.80	1,838.69	627.03	130.59
Penerimaan Negara Bukan Pajak	**221.93**	**470.98**	**866.94**	**1,083.14**	**170.67**	**(23.10)**
Penerimaan Hibah	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, diolah

2.3.2 Belanja

Untuk periode triwulan I 2022 Laporan Arus Kas Keluar Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp1,16 triliun, terpantau menurun sebesar 42,45% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp2,02 triliun. Komponen penyumbang realisasi arus keluar belanja terbesar bersumber dari pos Belanja Pegawai sebesar Rp711,80 miliar atau sebesar 61,14% dari keseluruhan total Belanja Negara di Provinsi Lampung. Realisasi ini tercatat meningkat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang belum mencatatkan realisasi. Pos Belanja Modal juga mengalami kenaikan serapan sebesar 494,11% (yoy) atau terealisasikan sebesar Rp94,88 miliar pada triwulan I 2022 dibandingkan dengan triwulan I 2021 yang sebesar Rp15,97 miliar. Sementara itu, pos Belanja Barang hingga triwulan I 2022 mencatatkan realisasi sebesar Rp349,97 miliar, naik 965,70% (yoy) dibandingkan triwulan I tahun 2021 yang terealisasikan sebesar Rp32,84 miliar.

Tabel 2.7 Laporan Arus Kas Keluar di Provinsi Lampung

Laporan Arus Kas Keluar	Tw I Tahun 2021 (Miliar Rp)	Tw II Tahun 2021 (Miliar Rp)	Tw III Tahun 2021 (Miliar Rp)	Tw IV Tahun 2021 (Miliar Rp)	Tw I Tahun 2022 (Miliar Rp)	% Δ Tw I 2021- 2022 (yoy)
Belanja	**48.81**	**210.28**	**317.90**	**1,279.32**	**1,164.21**	**2,285.20**
Belanja Pegawai	-	-	-	**10.37**	**711.80**	-
Belanja Barang	**32.84**	**162.99**	**62.35**	**761.89**	**349.97**	**965.70**
Belanja Modal	**15.97**	**47.29**	**83.84**	**266.45**	**94.88**	**494.11**
- Belanja Modal Tanah	-	-	0.15	0.97	-	-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.13	1.01	2.55	26.01	0.01	(92.64)
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.08	0.03	18.02	68.49	0.49	478.72
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.74	42.46	42.46	42.50	17.50	11.17
- Belanja Modal Lainnya	-	-	0.01	1.31	1.31	-
- Belanja Modal Badan Layanan Umum	0.01	3.49	20.65	127.16	0.02	152.74

Sumber: Kanwil Perbendaharaan Provinsi Lampung, diolah

BAB 3. PERKEMBANGAN INFLASI

- *Rata-rata indeks harga konsumen Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 secara bulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,31% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata triwulan IV 2021 yang mencatat inflasi sebesar 0,54% (mtm). Secara garis besar, tekanan inflasi di triwulan I 2022 didorong oleh meningkatnya permintaan menjelang masuknya bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1443 H. Pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan di tengah berlanjutnya kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) dunia menyebabkan kenaikan harga komoditi dimaksud. Selain itu, meningkatnya harga beberapa komoditas dunia turut mendorong peningkatan tekanan inflasi pada kelompok pangan bergejolak. Selain itu, belum masuknya masa panen dan tingginya curah hujan turut mengganggu ketersediaan pasokan komoditas strategis.*
- *Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 tercatat pada rentang sasaran Inflasi yaitu sebesar 2.43% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya 2,19% (yoy). Adapun pencapaian tersebut terpantau lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahunan Nasional dan Sumatera yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 2,64% (yoy) dan 3,11% (yoy). Tekanan Inflasi IHK Provinsi Lampung di triwulan I 2022 ini terutama di dorong oleh meningkatnya tekanan inflasi pada komoditas minyak goreng akibat peningkatan harga komoditas CPO dunia.* Secara *tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2022 disumbang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,31% dengan nilai inflasi 4,45% (yoy).*
- *Menghadapi tekanan inflasi pada triwulan I 2022, TPID tetap berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan menjajaki Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbauan untuk berbelanja secara bijak.*

3.1. Inflasi Umum Provinsi Lampung

3.1.1. Inflasi Bulanan

Rata-rata indeks harga konsumen Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 secara bulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,31% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata triwulan IV 2021 yang mencatat inflasi sebesar 0,54% (mtm) (Grafik 3.1). Secara garis besar, menurunnya tekanan inflasi di triwulan I 2022 dibandingkan periode sebelumnya sejalan dengan penurunan tekanan inflasi pada seluruh kelompok inflasi (Grafik 3.2). Hal tersebut didorong oleh normalisasi permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta penurunan mobilitas masyarakat akibat penerapan PPKM pandemi COVID-19 varian omicron. Selain itu, meningkatnya pasokan akibat panen beberapa komoditas seperti cabai merah, jeruk, telur ayam, cabai rawit, kangkung dan ikan mas turut menurunkan tekanan inflasi.

Grafik 3. 1 Inflasi Lampung dan Nasional

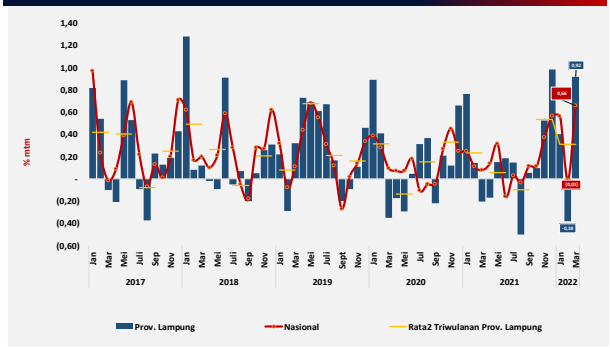

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.2 Sumbangan Inflasi Bulanan Jan, Feb, Mar 2022

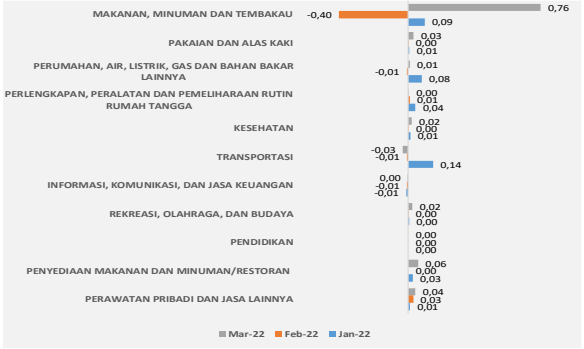

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Januari 2022 mengalami inflasi yaitu sebesar 0,40% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi inflasi bulan sebelumnya dan rata-rata inflasi bulan Januari dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,99% (mtm) dan 0,69% (mtm). Tingkat inflasi IHK tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan dengan Nasional dan Sumatera yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,56% (mtm) dan 0,85% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar 1,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yang masing-masing tercatat sebesar 2,18% (yoy) dan 2,24% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada bulan Januari 2022 didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti: mobil, beras, rokok kretek filter, sepeda motor, dan kue kering berminyak dengan andil masing-masing sebesar 0,08%; 0,08%; 0,05%; 0,03% dan 0,03% (Tabel 3.1). Kenaikan harga mobil disebabkan oleh adanya perubahan subsidi harga mobil yang hanya berlaku bagi jenis mobil *Low Cost Green Car* (LCGC). Kenaikan harga beras didorong oleh meningkatnya harga gabah kering dan belum masuknya masa panen raya. Sementara itu, kenaikan cukai rokok yang berlaku mulai bulan Januari 2022 turut mendorong peningkatan harga pada komoditas rokok kretek filter. Selanjutnya, kenaikan harga sepeda motor didorong oleh adanya penambahan biaya produksi akibat peningkatan harga bahan baku dan upah pekerja. Lebih lanjut seiring dengan meningkatnya permintaan pada tahun baru dan menjelang Imlek 2022 di tengah kenaikan harga bahan baku produksi, turut mendorong peningkatan harga kue kering berminyak.

Tekanan inflasi yang lebih tinggi pada periode Januari 2022 tertahan oleh deflasi yang terjadi pada sebagian komoditas diantaranya biaya administrasi transfer uang, air kemasan, jeruk, udang basah, dan cabai merah dengan andil masing-masing sebesar -0,23%; -0,03%, -0,03%; -0,02%; dan -0,02%. Penurunan harga pada komoditas cabai merah didorong oleh masuknya masa panen di beberapa sentra produksi sehingga terjadi peningkatan pasokan. Sementara itu, adanya penurunan permintaan turut mendorong penurunan harga pada komoditas udang basah. Di sisi lain, penurunan harga jeruk didorong oleh masuknya masa panen pada periode Januari 2022. Selanjutnya, sebagai strategi pemasaran untuk mendorong penjualan sejumlah pedagang menurunkan harga air kemasan. Adapun, biaya administrasi transfer uang mengalami deflasi seiring dengan diberlakukannya BI-FAST.

Tabel 3.1 5 Komoditas Inflasi & Deflasi Januari 2022

Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
MOBIL	0,08	CABAI MERAH	-0,23
BERAS	0,08	UDANG BASAH	-0,03
ROKOK KRETEK FILTER	0,05	JERUK	-0,03
SEPEDA MOTOR	0,03	AIR KEMASAN	-0,02
KUE KERING BERMINYAK	0,03	BIAYA ADMINISTRASI TRANSFER UANG	-0,02

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.3 Sumbangan Inflasi Bulanan Jan 2022

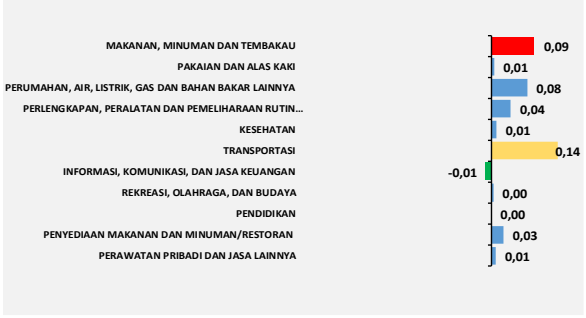

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Februari 2022 mengalami deflasi yaitu sebesar 0,38% (mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,40% (mtm) dan lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata inflasi bulan Februari dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 0,40% (mtm) dan 0,06% (mtm). Tingkat inflasi IHK tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Nasional dan Sumatera yang masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,02% (mtm) dan 0,23% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar 1,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yang masing-masing tercatat sebesar 2,06% (yoy) dan 2,31% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, deflasi pada bulan Februari 2022 didorong oleh penurunan harga pada beberapa komoditas seperti: telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, daging ayam ras, dan sabun detergen bubuk dengan andil masing-masing sebesar -0,18%; -0,12%; -0,07%; -0,03% dan -0,02%. Penurunan harga telur ayam ras dan daging ayam ras didorong oleh terbatasnya permintaan akibat diberlakukannya PPKM dengan level tertentu di berbagai wilayah Provinsi Lampung di tengah pasokan yang relatif stabil. Sementara itu, penurunan harga cabai rawit didorong oleh mulai meningkatnya pasokan seiring dengan masuknya masa panen. Di sisi lain, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Kementerian Perdagangan turut mendorong penurunan harga komoditas minyak goreng. Lebih lanjut, penurunan harga komoditas detergen bubuk disebabkan oleh adanya strategi pemasaran oleh distributor untuk meningkatkan penjualan.

Meski demikian, deflasi yang lebih dalam pada periode Februari 2022 tertahan oleh tekanan inflasi yang terjadi pada sebagian komoditas diantaranya bawang merah, roti manis, sabun cair/cuci piring, pengharum cucian/pelembut dan popok bayi sekali pakai/*diapers* dengan andil masing-masing sebesar 0,08%; 0,02%, 0,02%; 0,01%; dan 0,01% (Tabel 3.2). Peningkatan harga pada komoditas bawang merah didorong oleh terbatasnya pasokan seriring dengan berakhirnya masa panen pada sentra produksi di pulau Jawa. Sementara itu, peningkatan harga pada komoditas roti manis sejalan meningkatnya harga bahan baku produksi. Di sisi lain, peningkatan harga pada komoditas sabun cair, pengharum cucian dan popok bayi disebabkan

oleh adanya penyesuaian harga jual yang diakibatkan oleh biaya produksi yang meningkat di tahun 2022.

Tabel 3.2 5 Komoditas Inflasi & Deflasi Feb-22

Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
BAWANG MERAH	0,08	TELUR AYAM RAS	-0,18
ROTI MANIS	0,02	CABAI RAWIT	-0,12
SABUN CAIR/CUCI PIRING	0,01	MINYAK GORENG	-0,07
PENGHARUM CUCIAN/ PELEMBUT	0,01	DAGING AYAM RAS	-0,03
POPOK BAYI SEKALI PAKAI/ DIAPERS	0,01	SABUN DETERGEN BUBUK/CAIR	-0,02

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.4 Sumbangan Inflasi Bulanan Feb 22

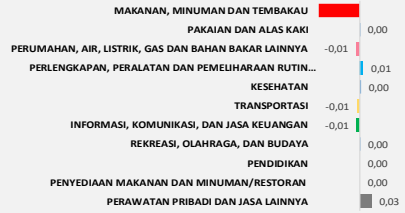

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Maret 2022 mengalami inflasi yaitu sebesar 0,92% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,38% (mtm) dan rata-rata inflasi bulan Maret dalam 3 (tiga) tahun terakhir 0,12% (mtm). Tingkat inflasi IHK tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dan Sumatera yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,66% (mtm) dan 0,80% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yang masing-masing tercatat sebesar 2,64% (yoy) dan 3,11% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada bulan Maret 2022 didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti: cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng, daging ayam ras dan nasi dengan lauk dengan andil masing-masing sebesar 0,22%; 0,14%; 0,11%; 0,08% dan 0,05%. Peningkatan harga cabai merah didorong oleh pasokan yang mengalami penurunan akibat pengaruh cuaca yang menyebabkan penurunan produksi cabai merah di Pulau Jawa. Sementara itu, peningkatan harga telur ayam ras dan daging ayam ras didorong oleh kenaikan harga pakan ayam dan meningkatnya permintaan menjelang masuknya bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1443 H. Selanjutnya, pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan oleh Kementerian Perdagangan pada 16 Maret 2022 di tengah berlanjutnya kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia menyebabkan kenaikan harga komoditi dimaksud. Adapun kenaikan harga nasi dengan lauk disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku akibat *second round impact* dari kenaikan harga telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng.

Meski demikian, inflasi yang lebih dalam pada periode Maret 2022 tertahan oleh adanya deflasi yang terjadi pada sebagian komoditas di antaranya mobil, beras, ikan teri, kulkas/lemari es dan ikan kembung dengan andil masing-masing sebesar -0,04%; -0,01%, -0,01%; -0,01%; dan -0,01% (Tabel 3.3). Penurunan harga pada komoditas mobil disebabkan oleh penurunan harga mobil kelompok 1.300cc dan belum dilakukannya penyesuaian harga untuk mobil jenis *Sport Utility Vehicle* (SUV), meski telah ditetapkan penyesuaian tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada triwulan I 2022. Kemudian, penurunan harga beras didorong oleh peningkatan pasokan seiring mulai masuknya masa panen padi di beberapa sentra produksi. Selanjutnya, penurunan harga ikan teri dan ikan kembung juga didorong oleh peningkatan jumlah pasokan sebagai dampak dari normalisasi jumlah tangkapan. Adapun penurunan harga kulkas/lemari es disebabkan oleh munculnya beberapa kulkas model terbaru, sehingga terjadi penyesuaian harga untuk kulkas model lainnya.

Tabel 3.3 5 Komoditas Inflasi & Deflasi Mar-2022

Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
CABAI MERAH	0,22	MOBIL	-0,03
TELUR AYAM RAS	0,14	BERAS	-0,01
MINYAK GORENG	0,11	IKAN TERI	-0,01
DAGING AYAM RAS	0,08	KULKAS/LEMARI ES	-0,01
NASI DENGAN LAUK	0,05	IKAN KEMBUNG	0,00

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.5 Sumbangan Inflasi Bulanan Mar 2022

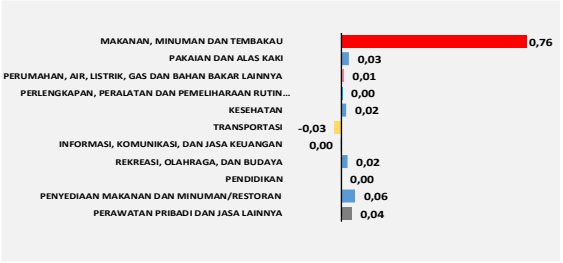

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Tabel 3.4 Inflasi Bulanan Menurut Kelompok (% mtm)

No	Kelompok Inflasi	Jan-22	Feb 22	Mar-22
	Umum	0,40	-0,38	0,92
1	MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	0,32	-1,34	2,59
2	PAKAIAN DAN ALAS KAKI	0,10	0,00	0,51
3	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	0,44	-0,05	0,05
4	PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	0,78	0,16	0,08
5	KESEHATAN	0,46	0,11	0,82
6	TRANSPORTASI	1,09	-0,05	-0,23
7	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	-0,29	-0,16	-0,05
8	REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	0,22	0,04	1,24
9	PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00
10	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	0,30	0,00	0,65
11	PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	0,18	0,52	0,75

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

3.1.2. Inflasi Tahunan

Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 tercatat pada rentang sasaran Inflasi yaitu sebesar 2,43% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya 2,19% (yoy). Adapun pencapaian tersebut terpantau lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahunan Nasional dan Sumatera yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 2,64% (yoy) dan 3,11% (yoy) (Grafik 3.6). Meningkatnya tekanan Inflasi IHK Provinsi Lampung di triwulan I 2022 ini terutama didorong oleh meningkatnya tekanan inflasi pada komoditas minyak goreng disebabkan oleh masih berlanjutnya peningkatan harga komoditas CPO dunia sebagai bahan baku utama. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2022 disumbang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,31% dengan nilai inflasi 4,45% (yoy).

Grafik 3.6 Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional

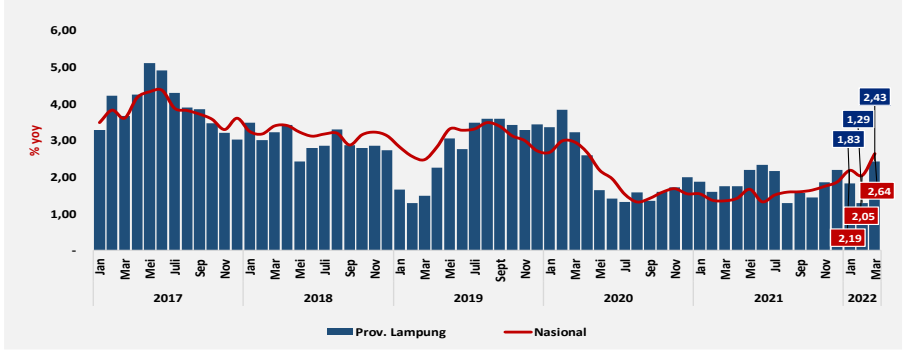

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Tabel 3.5 Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok (% yoy)

NO	KELOMPOK INFLASI	TW IV 2021	TW I 2022
	UMUM	2,19	2,43
1	MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	1,47	1,31
2	PAKAIAN DAN ALAS KAKI	0,07	0,10
3	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	0,27	0,31
4	PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	0,19	0,23
5	KESEHATAN	0,06	0,09
6	TRANSPORTASI	0,05	0,23
7	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	(0,09)	(0,09)
8	REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	0,01	0,04
9	PENDIDIKAN	(0,14)	(0,21)
10	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	0,22	0,29
11	PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	0,07	0,12

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau terpantau mengalami penurunan tekanan inflasi yaitu sebesar 4,45% (yoy) di triwulan I 2022, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 5,08% (yoy). Pada triwulan I 2022, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau merupakan kelompok penyumbang inflasi dengan andil terbesar yaitu 1,31% (yoy). Dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, sub kelompok Makanan merupakan penyumbang inflasi dengan andil sebesar (0,92%). Komoditas utama yang penyumbang tekanan inflasi pada sub kelompok tersebut antara lain minyak goreng (0,50%), beras (0,16%) dan daging ayam ras (0,16%). Peningkatan tekanan inflasi pada komoditas minyak goreng disebabkan oleh masih berlanjutnya peningkatan harga komoditas CPO dunia sebagai bahan baku utama. Lebih lanjut, peningkatan harga beras disebabkan oleh belum masuknya masa panen. Selain itu, harga daging ayam ras juga naik dipengaruhi oleh meningkatnya harga pakan ternak (Tabel 3.6). Tekanan inflasi pada sub kelompok makanan tertahan oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi seperti komoditas cabai rawit, cabai merah dan udang basah dengan andil deflasi masing-masing sebesar (-0,27%), (-0,10%) dan (-0,06%). Penurunan harga komoditas cabai rawit dan cabai merah didorong oleh terjaganya pasokan akibat panen di beberapa sentra produksi di Jawa. Pada sub kelompok tembakau, pada periode triwulan I 2022 menyumbang Inflasi dengan andil sebesar 0,41%. Adapun peningkatan tekanan Inflasi pada sub kelompok ini didorong oleh peningkatan harga dari distributor seiring dengan adanya pengumuman kenaikan tarif dasar cukai sebesar 12% di awal tahun 2022.

Tabel 3.6 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Makanan, Minuman Non Alkohol & Tembakau (% yoy)

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	DEFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
MAKANAN (0,92%)						
1	MINYAK GORENG	42,20	0,50	CABAI RAWIT	-44,11	-0,27
2	BERAS	4,60	0,16	CABAI MERAH	-11,33	-0,10
3	DAGING AYAM RAS	12,04	0,16	UDANG BASAH	-14,46	-0,06
MINUMAN NON ALKOHOL (0,02%)						
1	-			AIR KEMASAN	-3,90	-0,03
TEMBAKAU (0,41%)						
1	ROKOK KRETEK FILTER	10,23	0,31	-		
2	ROKOK KRETEK	6,28	0,05	-		
3	ROKOK PUTIH	5,27	0,05	-		

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.7 Perkembangan Harga Beras

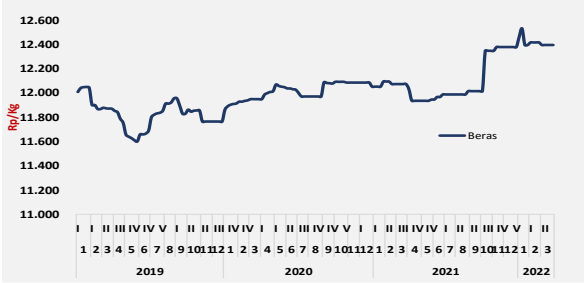

Sumber: SPH Bank Indonesia

Grafik 3.8 Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan

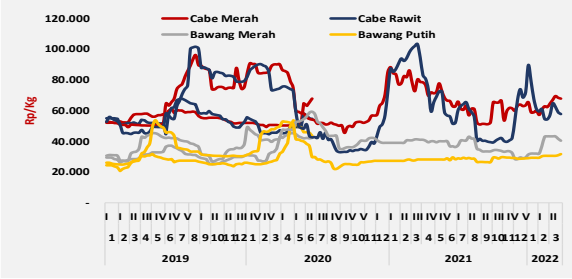

Sumber: SPH Bank Indonesia

Grafik 3.9 Perkembangan Harga Daging dan Telur

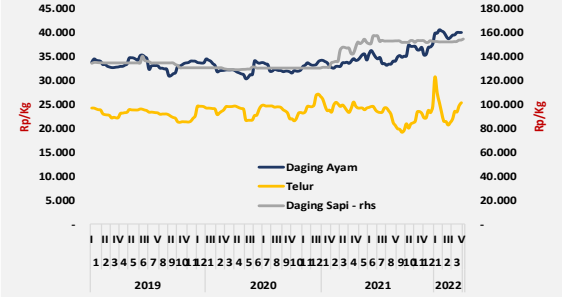

Sumber: SPH Bank Indonesia

Grafik 3.10 Perkembangan Harga Sayur Sayuran

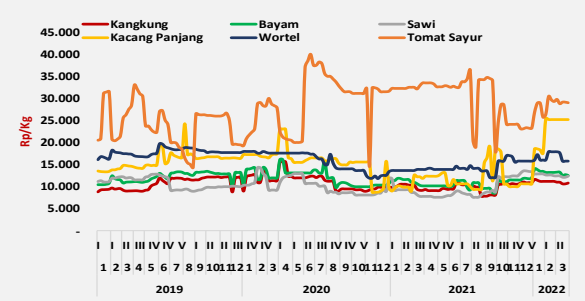

Sumber: SPH Bank Indonesia

Grafik 3.11 Perkembangan Harga Rokok

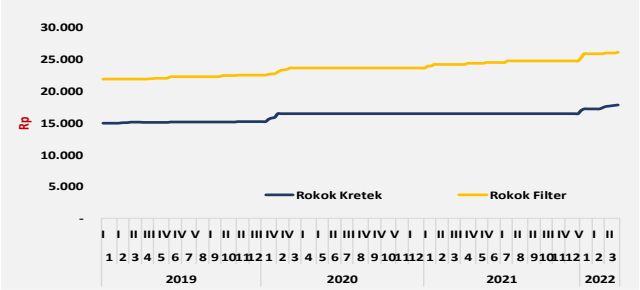

Sumber: SPH Bank Indonesia

Kelompok Pendidikan

Pada kelompok pendidikan di triwulan I 2022 tercatat mengalami deflasi sebesar 3,89% (yoy) dengan andil sebesar -0,21% terjadi peningkatan deflasi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Deflasi yang terjadi pada kelompok pendidikan terjadi pada sub kelompok pendidikan dasar dan anak usia dini dengan andil (-0,05%) dan sub kelompok pendidikan menengah dengan andil (-0.15%). Penurunan harga yang terjadi pada kelompok pendidikan yaitu untuk komoditas sekolah menengah atas dan sekolah dasar didorong oleh adanya penyesuaian biaya pendidikan akibat perubahan pola ajar dari tatap muka menjadi daring. **(Tabel 3.7)**.

Tabel 3.7 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	INFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI (-0,05%)						
1				SEKOLAH DASAR	-5,18	-0,05
PENDIDIKAN MENENGAH (-0,15%)						
1				SEKOLAH MENENGAH ATAS	-14,99	-0,15

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran

Inflasi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran di triwulan I 2022 tercatat sebesar 3,45% (yoy) dengan andil sebesar 0,29% lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi pada triwulan IV 2021 yaitu sebesar 2,54% (yoy), dengan andil sebesar 0,22%. Tekanan inflasi yang terjadi pada sub kelompok jasa pelayanan makanan dan minuman terutama berasal dari peningkatan harga pada komoditas nasi dengan lauk dan bakso siap santap dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,13% (yoy) dan 0,09% (yoy) **(Tabel 3.8)**. Peningkatan tekanan Inflasi pada kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran disebabkan oleh imbas dari kenaikan harga minyak goreng yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Tabel 3.8 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran (% yoy)

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	INFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN (0,29%)						
1	NASI DENGAN LAUK	7,20	0,13	-		
2	BAKSO SIAP SANTAP	7,43	0,09	-		

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Inflasi pada kelompok perawatan dan jasa lainnya di triwulan I 2022 tercatat sebesar 2,20% dengan andil sebesar 0,12% lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi 1,30% (yoy), dengan andil sebesar 0,07%. Komoditas pendorong tekanan inflasi pada kelompok ini berasal dari peningkatan harga pada komoditas shampoo, *deodorant* dan emas perhiasan dengan andil masing-masing sebesar 0,03% (yoy); 0,02% (yoy) dan 0,02% (yoy). Peningkatan harga emas perhiasan mengikuti perkembangan harga emas global akibat dari krisis geopolitik Rusia-Ukraina, sedangkan kenaikan harga *shampoo* dan *deodorant* didorong oleh kenaikan harga distributor. **(Tabel 3.9)**.

Tabel 3.9 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	INFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
PERAWATAN PRIBADI (0,09%)						
1	SHAMPO	7,40	0,03			
2	DEODORANT	13,27	0,02			
PERAWATAN PRIBADI LAINNYA (0,02%)						
1	EMAS PERHIASAN	3,96	0,02			

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Kelompok Transportasi

Kelompok transportasi pada periode triwulan I 2021 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,74% (yoy) dengan andil sebesar 0,23% lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,39% (yoy) dengan andil sebesar 0,05% (Tabel 3.10). Peningkatan tekanan Inflasi pada kelompok transportasi didorong oleh sub kelompok pembelian kendaraan atas penyesuaian harga mobil dan sepeda motor memasuki pergantian tahun. Selain itu, inflasi kelompok transportasi juga disebabkan sub kelompok jasa angkutan penumpang dari komoditas angkutan udara dan tariff kendaraan travel. Menjelang bulan Ramadhan, mobilitas masyarakat mulai meningkat untuk sejalan dengan relaksasi PPKM.

Tabel 3.10 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Transportasi (% yoy)

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	DEFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
PEMBELIAN KENDARAAN (0,13%)						
1	MOBIL	3,07	0,07			
2	SEPEDA MOTOR	2,85	0,05			
JASA ANGKUTAN PENUMPANG (0,05%)						
1	ANGKUTAN UDARA	4,83	0,03			
2	TARIF KENDARAAN TRAVEL	14,63	0,02			

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.12 Perkembangan Harga Bensin

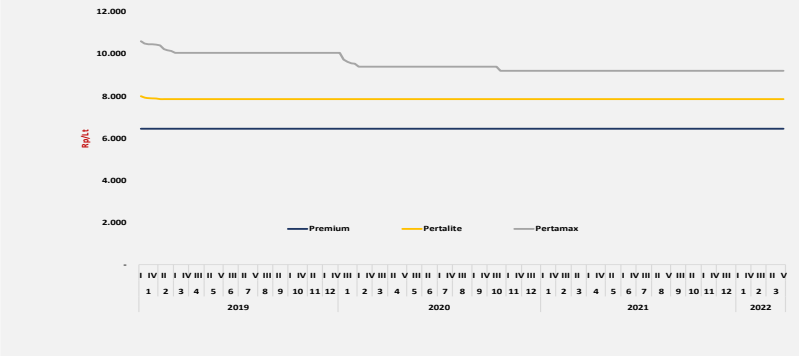

Sumber: SPH Bank Indonesia

Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan di triwulan I 2022 tercatat kembali mengalami deflasi sebesar -1,88%(yoy) dengan andil sebesar -0,09% lebih rendah jika dibandingkan dengan deflasi pada triwulan sebelumya yaitu sebesar -1,98% (yoy) dengan andil sebesar -0,09%. Deflasi yang terjadi pada periode ini didorong oleh penurunan harga telepon seluler dan biaya administrasi transfer uang dengan andil masing-masing sebesar -0,09% (yoy) dan -0,02% (yoy) **(Tabel 3.11)**. Penurunan harga telepon seluler merupakan strategi pemasaran produsen untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, biaya administrasi transfer uang mengalami deflasi seiring dengan diberlakukannya BI-FAST.

Tabel 3.11 Sumbangan Inflasi & Deflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Komunikasi

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	INFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
PERALATAN INFORMASI & KOMUNIKASI (-0,06%)						
1	TELEVISI BERWARNA	24,37	0,02	TELEPON SELULER	-12,70	(0,09)
JASA KEUANGAN (-0,02%)						
1				BIAYA ADMINISTRASI TRANSFER UANG	-34,28	(0,02)

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

3.1.3 Ekspektasi Inflasi

Inflasi di triwulan II 2022 diperkirakan meningkat seiring dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penetapan PPN sebesar 11%, kenaikan permintaan bahan pangan pada periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H, berlanjutnya peningkatan harga CPO global yang mendorong peningkatan harga minyak goreng dan adanya potensi kenaikan tarif angkutan udara dan angkutan antar kota sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, rata-rata ekspektasi perubahan harga jual produk 3 (tiga) bulan ke depan mengalami peningkatan pada triwulan I 2022 yaitu sebesar 150,67, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dengan rata-rata ekspektasi sebesar 146,67. **(Grafik 3.13).**

Grafik 3.13 Ekspektasi Perubahan Harga 3 & 6 Bulan ke Depan

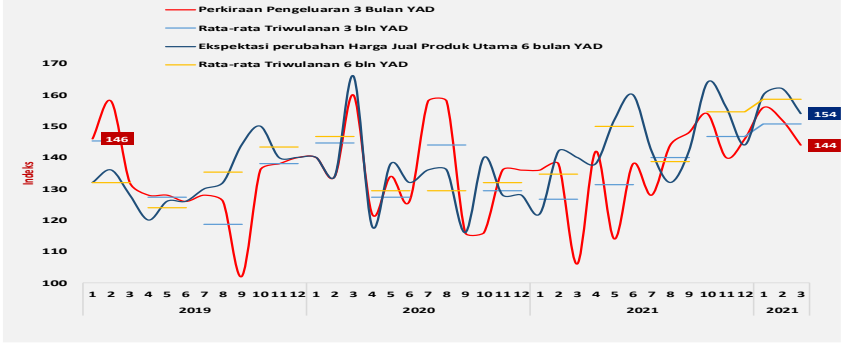

Sumber: Survei Penjualan Eceran KPw BI Provinsi Lampung

3.1.4 Pengendalian Inflasi

Dalam rangka mencapai target inflasi IHK Provinsi Lampung sebesar 3±1% di tahun 2022, beberapa upaya pengendalian inflasi telah ditempuh tim TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung selama triwulan I 2022. Upaya-upaya dimaksud meliputi:

a. *High Level Meeting* Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Pada 28 Maret 2022 telah dilaksanakan HLM TPID Provinsi Lampung dalam rangka persiapan menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Lampung. Dalam kesempatan dimaksud, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memastikan ketersediaan bahan pangan pokok strategis dapat terpenuhi selama bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dengan menerapkan kebijakan pemerintah terutama diarahkan terhadap strategi 4K yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, serta Komunikasi yang efektif sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, serta melakukan pemantauan langsung kepada pedagang besar dan retail guna memastikan ketersediaan stok pangan baik milik pemerintah maupun pelaku usaha.
2. Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan melakukan pasar murah dan kunjungan pasar dalam upaya pengendalian harga.
3. Melakukan kerjasama antar pihak-pihak terkait agar pengiriman pasokan bahan pangan tidak terganggu, termasuk penyaluran BBM, LPG subsidi dan non-subsidi kepada masyarakat, serta penanganan jalan dan pengendalian arus kendaraan.
4. Meningkatkan komunikasi terkait kecukupan pasokan pangan strategis serta memberikan informasi yang positif dan optimis kepada masyarakat tentang perkembangan kebijakan dan langkah-langkah khususnya pengendalian inflasi menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H.
5. Untuk menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng menjelang HBKN Idul Fitri 1443 H, diperlukan langkah-langkah antisipatif yaitu :
   - Melakukan pendataan terpadu ketersediaan minyak goreng dari produsen maupun PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia.
   - Menyusun mekanisme penyaluran/distribusi yang efektif dan efisien.

b. *Review* kecukupan pasokan dan perkembangan harga-harga kebutuhan pokok di pasar, distributor, dan gudang oleh TPID baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sekaligus memastikan kualitas barang pokok memiliki kualitas yang baik dan layak konsumsi.

1. Melaksanakan pemantauan harga secara harian yang dilaksanakan melalui Pusat Infromasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang aktif disosialisasikan dalam setiap rapat koordinasi TPID. Selain itu, pemantauan harga juga aktif dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
2. KPwBI Provinsi Lampung secara aktif menyampaikan analisis perkembangan harga komoditas bahan pokok di Lampung secara harian berdasarkan data PIHPS yang disampaikan pada *Platform* komunikasi bersama TPID Lampung dan Satgas Pangan Lampung.

c. Kerjasama Antar Daerah

Tanggal 28 Januari 2022 telah diselenggarakan penandatanganan MoU KAD antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa TImur dengan kesepakatan melakukan kerjasama pengembangan budidaya dan pemasaran hasil-hasil pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan budidaya dan pemasaran hasil-hasil perkebunan, pengembangan budidaya dan pamasaran hasil-hasil peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan, penguatan kelembagaan serta pengembangan koperasi dan UMKM, investasi dan penanaman modal, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia. Selain itu, dilakukan penandatanganan kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikulltura; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Dinas teknis Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rekomendasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung

Menghadapi risiko inflasi pada triwulan I 2022, TPID Provinsi Lampung melakukan beberapa langkah dalam rangka menjaga laju inflasi agar berada dalam *range* 3%±1, antara lain sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga:

Melakukan pemantauan harga harian dan perbandingan harga dengan daerah lain, salah satunya melalui aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (https://hargapangan.id/), untuk melihat perkembangan harga yang terjadi dan melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan. Selain itu, bekerja sama dengan produsen, distributor dan kelompok tani melakukan operasi pasar murah untuk komoditas-komoditas rentan. Pelaksanaan pasar murah dapat dilakukan secara *offline* dengan tetap menjaga protokol kesehatan ataupun secara *online* dengan bekerja sama dengan pihak *e-commerce* ataupun kanal pemasaran lainnya.

2. Ketersediaan Pasokan:

Sebagai antisipasi lonjakan permintaan masyarakat dengan kembalinya optimisme masyarakat pasca vaksinasi COVID-19. Untuk itu, TPID Provinsi/Kabupaten/Kota perlu meningkatkan intensitas koordinasi, salah satunya melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam hal pemenuhan komoditas pangan strategis menghadapi risiko kenaikan harga. Sementara itu, implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB), selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani, tentunya dapat mendukung upaya peningkatkan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan.

3. Kelancaran Distribusi:

TPID dan Satgas Pangan TPID memastikan kembali kecukupan pasokan dan kelancaran akses distribusi bahan pokok. Selain untuk menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi dapat memudahkan produsen, distributor dan petani memasarkan produk dan mendapatkan harga yang wajar. Di sisi lain, perlunya kerjasama dan dukungan antara semua pihak untuk mendorong digitalisasi dengan pemanfaatan *platform e-commerce/marketplace* lokal untuk membantu pemasaran dan distribusi**.**

4. Komunikasi Efektif:

Mengimbau masyarakat melalui diseminasi informasi harga dan iklan layanan masyarakat melalui media masa agar bijak berkonsumsi dan mengurangi *asymmetric information* untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Selain itu, masih terdapat tantangan bagi TPID ke depan yakni upaya penguatan daya beli masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi Nasional. Oleh karena itu, TPID harus bersama-sama mendorong percepatan realisasi program perlindungan sosial dan perlunya melakukan identifikasi potensi sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi antara lain melalui optimalisasi *Local Value Chain* (LVC) sebagai strategi dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah, dan tidak terbatas pada sektor pertanian pangan, namun termasuk sektor lainnya yaitu pertambangan, perkebunan, dan industri. Penguatan LVC tersebut diantaranya dengan membentuk klaster-klaster ekonomi baru atau eksosistem dimana korporasi dapat berperan sebagai *aggregator* dan *off-taker*.

3.2. Inflasi Kota-Kota di Provinsi Lampung

3.2.1. Inflasi Kota Bandar Lampung

Pada bulan Januari 2022, indeks harga komoditas di Kota Bandar Lampung mengalami inflasi sebesar 0,38% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,99% (mtm), kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil inflasi terbesar 0,07% pada bulan Januari 2022. Secara tahunan, inflasi di Kota Bandar Lampung tercatat sebesar 1,71% (yoy). Dilihat dari sumbernya, komoditas utama penyumbang Inflasi adalah adalah komoditas mobil, beras dan rokok kretek filter dengan andil masing-masing sebesar 0,08% (mtm), 0,08% (mtm) dan 0,05% (mtm). Kenaikan harga mobil disebabkan oleh adanya perubahan subsidi harga mobil yang hanya berlaku bagi jenis mobil *Low Cost Green Car* (LCGC). Kenaikan harga beras didorong oleh meningkatnya harga gabah kering dan belum masuknya masa panen raya. Sementara itu, kenaikan cukai rokok yang berlaku mulai bulan Januari 2022 turut mendorong peningkatan harga pada komoditas rokok kretek filter.

Kota Bandar Lampung di bulan Februari 2022 mengalami deflasi sebesar 0,40% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,38% (mtm), deflasi tersebut menjadikan inflasi secara tahunan sebesar 1,17% (yoy). Komoditas penyumbang deflasi pada bulan Februari 2022 antara lain adalah telur ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng dengan andil masing-masing 0,18% (mtm); 0,12% (mtm), dan 0,07% (mtm). Penurunan harga telur ayam ras didorong oleh terbatasnya permintaan akibat peningkatan status PPKM di Provinsi Lampung di tengah pasokan yang relatif stabil. Sementara itu, penurunan harga cabai rawit didorong oleh mulai meningkatnya pasokan seiring dengan masuknya masa panen. Di sisi lain, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Kementerian Perdagangan turut mendorong penurunan harga komoditas minyak goreng.

Grafik 3.14 Inflasi Bulanan Kota Bandar Lampung

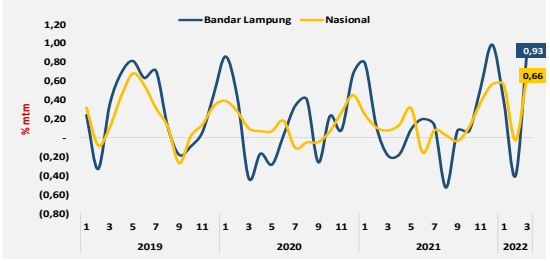

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, diolah

Grafik 3.15 Inflasi Tahunan Kota Bandar Lampung

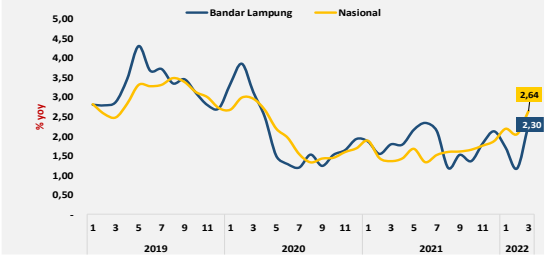

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, diolah

Pada bulan Maret 2022, Kota Bandar Lampung terpantau mengalami inflasi sebesar 0,93% (mtm) atau 2,30% (yoy), lebih tinggi dari periode sebelumnya (-0,40%, mtm). Peningkatan tekanan inflasi pada periode ini terutama disebabkan oleh peningkatan tekanan inflasi pada kelompok makanan minuman dan tembakau dengan andil bulanan 0,78%. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi pada periode ini adalah komoditas cabai merah, telur ayam ras dan minyak goreng dengan andil masing-masing sebesar 0,25% (mtm); 0,14% (mtm) dan 0,11% (mtm). Peningkatan harga cabai merah didorong oleh pasokan yang mengalami penurunan akibat pengaruh cuaca yang menyebabkan penurunan produksi cabai merah di Pulau Jawa. Sementara itu, peningkatan harga telur ayam ras dan daging ayam ras didorong oleh kenaikan harga pakan ayam dan meningkatnya permintaan menjelang masuknya bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1443 H. Selanjutnya, pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan oleh Kementerian Perdagangan pada 16 Maret 2022 di tengah berlanjutnya kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia menyebabkan kenaikan harga komoditi dimaksud.

3.2.2. Inflasi Kota Metro

Sejalan dengan Kota Bandar Lampung, Kota Metro pada bulan Januari 2022 mencatatkan inflasi sebesar 0,55% (mtm) lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,99% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Metro pada bulan Januari 2022 adalah sebesar 2,75% (yoy). Dilihat dari sumbernya, komoditas utama penyumbang inflasi adalah komoditas rokok kretek filter, minyak goreng dan beras dengan andil masing-masing sebesar 0,07% (mtm), 0,06% (mtm), dan 0,05% (mtm). Kenaikan harga pada komoditas rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan cukai rokok yang berlaku mulai bulan Januari 2022. Sementara itu, kenaikan harga pada komoditas minyak goreng didorong oleh meningkatnya harga komoditas CPO dunia. Peningkatan harga beras didorong oleh meningkatnya harga gabah kering dan belum masuknya masa panen raya.

Grafik 3.16 Inflasi Bulanan Kota Metro

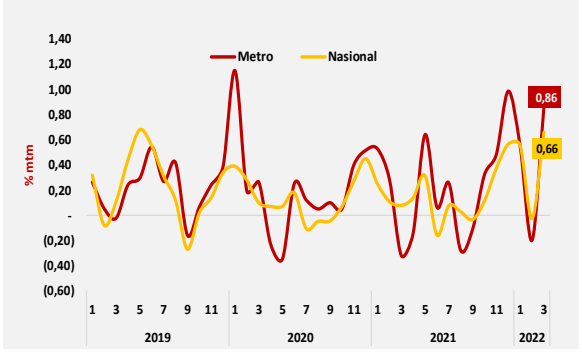

Sumber: BPS Kota Metro, diolah

Grafik 3.17 Inflasi Tahunan Kota Metro

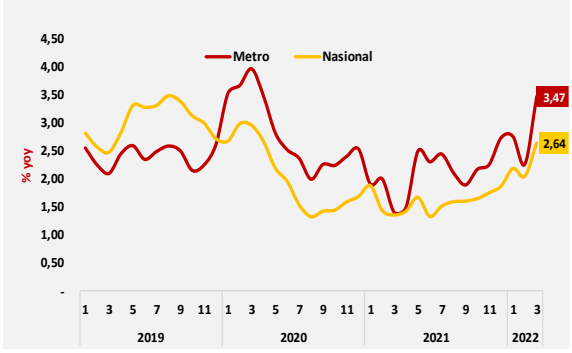

Sumber: BPS Kota Metro, diolah

Di bulan Februari 2022, Kota Metro mengalami deflasi sebesar 0,20% (mtm) lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Deflasi yang terjadi pada periode Februari terutama didorong oleh penurunan harga telur ayam ras, cabai rawit dan minyak goreng dengan andil 0,21%, 0,10% dan 0,09%. Secara tahunan, inflasi di Kota Metro pada Februari 2022 tercatat sebesar 2,26% (yoy). Peningkatan harga telur ayam ras didorong oleh kenaikan harga pakan ayam dan meningkatnya permintaan menjelang masuknya bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1443 H. Sementara itu, penurunan harga cabai rawit didorong oleh mulai meningkatnya pasokan seiring dengan masuknya masa panen. Selain itu, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Kementerian Perdagangan turut mendorong penurunan harga komoditas minyak goreng.

Pada bulan Maret 2022, Kota Metro mengalami inflasi sebesar 0,86% (mtm) lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi pada periode sebelumnya. Peningkatan tekanan inflasi pada

periode ini didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti telur ayam ras, minyak goreng dan ikan dencis dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,13%, 0,11% dan 0,09%. Secara tahunan, inflasi di Kota Metro pada Maret 2022 tercatat sebesar 3,47% (yoy). Harga telur ayam ras masih mengalami peningkatan didorong oleh kenaikan harga pakan ayam dan permintaan yang meningkat menjelang masuknya bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1443 H. Selanjutnya, pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan oleh Kementerian Perdagangan pada 16 Maret 2022 di tengah berlanjutnya kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia menyebabkan kenaikan harga komoditi dimaksud. Kenaikan harga pada komoditas ikan dencis disebabkan oleh penurunan hasil tangkapan akibat meningkatnya curah hujan pada periode berjalan.

3.3. Inflasi Kota-Kota di Sumatera

Secara umum laju inflasi tahunan kota-kota di Sumatera pada triwulan I 2022 tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi pada triwulan sebelumnya. Inflasi Sumatera pada triwulan laporan tercatat sebesar 3,11% (yoy) lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,91% (yoy). Adapun pencapaian inflasi Sumatera pada periode laporan tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Nasional yang sebesar 2,64% (yoy).

Grafik 3.18 Inflasi tahunan Kota-Kota Sumatera

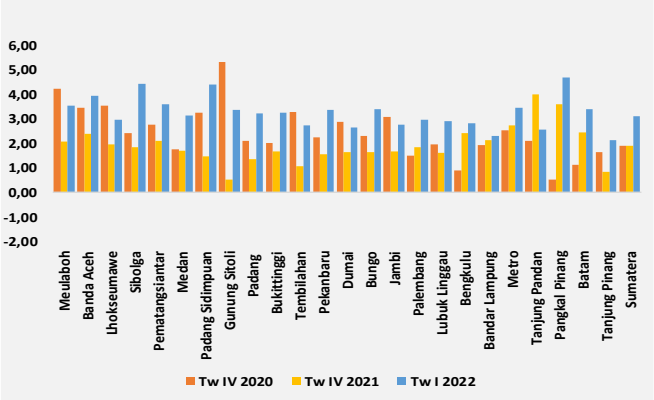

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Dari 24 kota perhitungan inflasi di Sumatera (SBH 2018), terdapat 21 kota yang memiliki inflasi di atas inflasi Nasional dan 3 kota yang memiliki inflasi di bawah inflasi Nasional. Kota Bandar Lampung tercatat mengalami inflasi di bawah nasional dan sebaliknya Kota Metro tercatat sebagai kota yang capaiannya berada di atas nasional dimana masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 2,30% (yoy) dan 3,47% (yoy). Dengan pencapaian inflasi tahunan tersebut, Kota Bandar Lampung dan Metro masing-masing menempati peringkat pencapaian inflasi yakni ke-23 dan 7 dari 24 kota perhitungan inflasi di Sumatera. Kota dengan inflasi tertinggi di Sumatera adalah Pangkal Pinang dengan inflasi tahunan sebesar 4,70% (yoy).

3.4. Arah Perkembangan Inflasi Triwulan II 2022

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada April 2022 mengalami inflasi yaitu sebesar 0,86% (mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya dan rata-rata inflasi bulan April dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,92% (mtm) dan 0,03% (mtm). Tingkat inflasi IHK tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Nasional dan Sumatera yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,95% (mtm) dan 0,87% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar

3,49% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional, namun lebih rendah dari inflasi Sumatera yang masing-masing tercatat sebesar 3,47% (yoy) dan 3,91% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada bulan April 2022 didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti: minyak goreng, bensin, angkutan udara, mobil, dan telur ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,30%; 0,13%; 0,08%; 0,06% dan 0,04%. Peningkatan harga minyak goreng didorong oleh pencabutan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas minyak goreng kemasan oleh Kementerian Perdagangan pada 16 Maret 2022. Sementara itu, peningkatan harga BBM jenis bensin didorong dari naiknya harga minyak mentah global. Selanjutnya, peningkatan harga angkutan udara selain dampak meningkatnya permintaan menjelang HBKN, juga akibat tingginya peningkatan harga avtur global yang sangat mempengaruhi biaya operasional penerbangan. Di sisi lain, harga mobil juga mengalami peningkatan akibat dicabutnya kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk beberapa tipe mobil, selain itu juga adanya kenaikan tarif PPN 11% mulai April 2022 juga turut menjadi penyumbang naiknya harga mobil. Sementara itu, kenaikan harga telur ayam ras didorong oleh meningkatnya permintaan menjelang masuknya HBKN Idul Fitri 1443 H.

Meski demikian, inflasi yang lebih dalam pada periode April 2022 tertahan oleh deflasi yang terjadi pada sebagian komoditas diantaranya beras, cabai rawit, tahu mentah, cabai merah dan tomat dengan andil masing-masing sebesar -0,09%; -0,05%, -0,03%; -0,02%; dan -0,01%. Penurunan harga pada komoditas beras, cabai rawit dan cabai merah didorong oleh meningkatnya pasokan seiring dengan masuknya masa panen. Sementara itu, penurunan harga pada komoditas tahu mentah didorong oleh menurunnya harga kedelai. Penurunan harga tomat juga didorong oleh peningkatan jumlah pasokan di tengah masih rendahnya permintaan masyarakat.

Grafik 3.19 Realisasi Inflasi vs Nilai Historis Inflasi 3 Tahun Terakhir

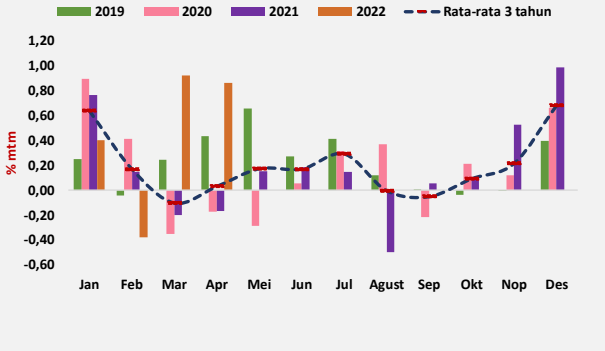

Sumber: BPS Prov. Lampung, diolah

Grafik 3.20 Realisasi Inflasi Februari 2022

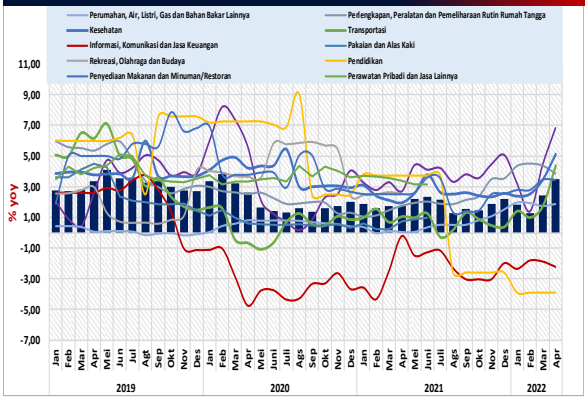

Sumber: BPS Prov. Lampung, diolah

KPw BI Provinsi Lampung memandang bahwa inflasi pada triwulan II 2022 akan tetap terjaga pada rentang sasaran 3±1%. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi, antara lain: dari inflasi **risiko kelompok inti,** meningkatnya permintaan seiring dengan melandainya kasus COVID-19, ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina, kenaikan harga komoditas global impor serta peningkatan harga akibat *second round impact* VF dan AP. **Risiko kelompok *Volatile Food* (VF),** kenaikan harga minyak goreng akibat terus melonjaknya harga CPO global, meningkatnya harga beberapa komoditas strategis akibat berakhirnya masa panen, adanya permasalahan struktural pada pola tanam dan manajemen impor, serta inefisiensi tata niaga pangan. **Risiko kelompok *Administered Price* (AP),** kenaikan harga minyak dunia akibat permasalahan geopolitik Rusia dan Ukraina ditransmisikan pada kenaikan harga BBM nonsubsidi. Kenaikan harga minyak dunia berimbas pada harga avtur yang berimplikasi pada kenaikan komoditas angkutan udara, selain memasuki periode Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1443 H.

BOKS 1: Kenaikan Harga Komoditas Dunia sebagai Penyumbang Utama Tekanan Inflasi 2022

Disrupsi rantai pasokan global telah memicu kenaikan tekanan inflasi dunia sejak tahun 2021 di tengah terakselerasinya pemulihan ekonomi. Lebih dari 80% perdagangan dunia dilakukan dengan memanfaat moda transportasi laut (Swallow et al, 2022). *Shock* yang ditimbulkan oleh penyebaran COVID-19 terhadap sisi *supply* pada perekonomian dunia menyebabkan adanya gangguan pada rantai pasokan global, misalnya pelabuhan yang kekurangan tenaga kerja karena terinfeksi COVID-19, terhambatnya pengiriman barang antar wilayah karena adanya pengetatan mobilitas, dan terbatasnya ketersediaan *chip* semikonduktor yang menghambat kegiatan operasional pelabuhan. Disrupsi rantai pasokan karena penyebaran COVID-19 menyebabkan terjadinya keterlambatan pengiriman barang, terutama pada rute utama Shanghai – Rotterdam – Los Angeles dan di sebagian besar negara maju (Grafik 1). Permintaan yang pulih lebih cepat seiring dengan adanya stimulus kebijakan moneter di tengah disrupsi rantai pasokan yang masih berlangsung mendorong kenaikan tarif pengiriman barang menggunakan jasa transportasi laut (Grafik 2), sehingga mendorong kenaikan harga komoditas bahan pangan global yang kemudian berdampak terhadap kenaikan tekanan inflasi global, termasuk di Indonesia.

Grafik 1. *Purchasing Manager's Index – Suppliers' Delivery Times*

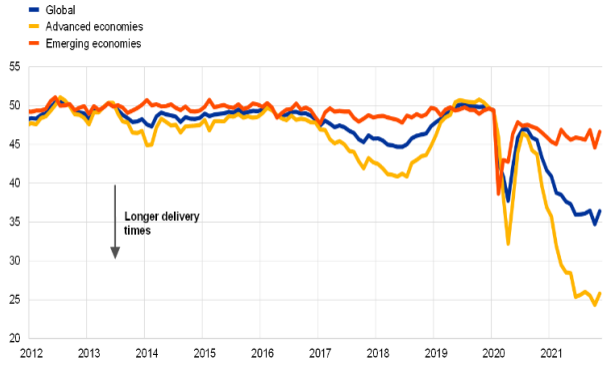

Sumber: IHS Markit dan ECB, 2022

Grafik 2. *Global Shipping Costs*

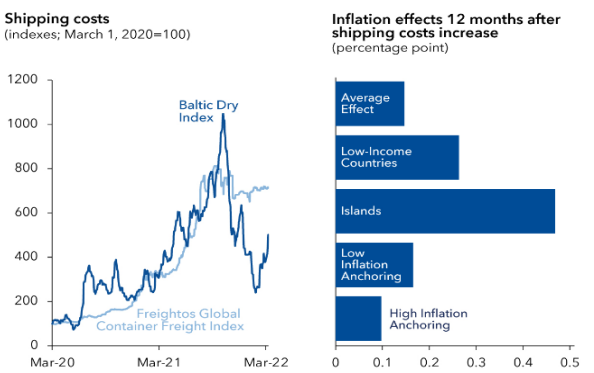

Sumber: Haver Analytics dan IMF, 2022

Di tengah masih berlangsungnya disrupsi rantai pasokan, tekanan inflasi pada tahun 2022 semakin menguat seiring dengan tereskalasinya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Peningkatan tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina sejak Februari 2022 menghambat pemulihan disrupsi rantai pasokan dan menimbulkan berbagai tantangan bagi perekonomian dunia hingga saat ini, salah satunya melalui jalur kenaikan harga komoditas. Meskipun kontribusi Rusia terhadap perekonomian dan perdagangan internasional terpantau terbatas, namun perannya sebagai produsen komoditas energi dan bahan pangan dunia kembali mendorong kenaikan harga komoditas dunia ke level yang lebih tinggi, misalnya untuk minyak mentah, batu bara, gas alam, pupuk, kedelai, dan gandum. Sanksi restriksi perdagangan yang dijatuhkan kepada Rusia berpotensi mengganggu jalur pemulihan ekonomi dan meningkatkan tekanan inflasi secara langsung bagi negara yang cukup bergantung terhadap komoditas energi dan bahan pangan Rusia, misalnya Wilayah Eropa, India, Tiongkok, dan Jepang. Namun demikian, dampak tidak langsung melalui kenaikan harga komoditas dunia menyebabkan risiko peningkatan tekanan *imported inflation* termaterialisasi di sebagian besar negara. Mencermati perkembangan tersebut, *International Monetary Fund* (IMF) merevisi proyeksi inflasi negara maju dan negara berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, setidaknya untuk keseluruhan tahun 2022 (Grafik 3).

Grafik 3.Risiko Inflasi Dunia

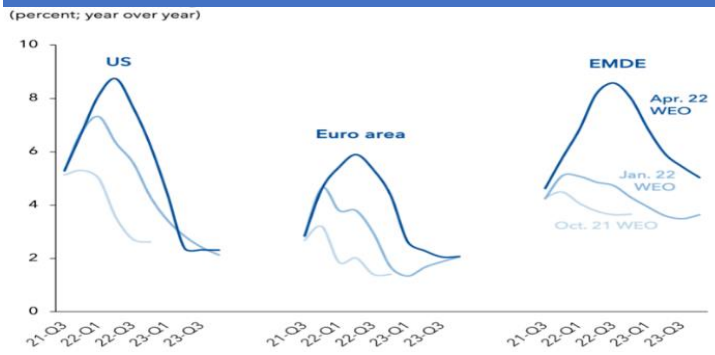

Sumber: World Economic Outlook, IMF

Sejalan dengan perkembangan di tingkat internasional, kenaikan harga bahan pangan internasional turut meningkatkan tekanan inflasi *Volatile Foods* (VF) Provinsi Lampung. Harga CPO internasional terpantau mengalami peningkatan secara signifikan sejak Juni 2020 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini (Grafik 4). Harga CPO internasional diperkirakan akan mulai melandai pada paruh ke-2 tahun 2022, namun masih rendahnya produksi CPO Malaysia dan adanya dinamika implementasi kebijakan pernjualan domestik dan pengetatan ekspor CPO di Indonesia menyebabkan harga CPO dunia kembali melonjak pada triwulan I 2022. Inflasi Minyak Goreng pada April dan Mei 2022 masing-masing tercatat sebesar 7,35% (mtm) dan 18,54% (mtm) seiring dengan pencabutan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng pada 16 Maret 2022. Pada Mei 2022, harga CPO dunia mulai melandai ke 1597,6 USD/metric ton, atau terkoreksi 54,93 USD/metric ton dari posisi harga tertinggi pada Maret 2022. Pada triwulan II 2022, seiring dengan mulai melandainya harga CPO internasional, andil inflasi Minyak Goreng terhadap VF diperkirakan mengalami penurunan. Adapun assesmen KPw BI Provinsi Lampung menunjukkan bahwa setiap kenaikan 100 USD/metric ton harga CPO internasional berpotensi meningkatkan IHK VF sebesar 0,38%.

Selanjutnya, eskalasi tensi geopolitik Rusia dan Ukraina kembali mendorong kenaikan harga kedelai, gandum, dan pupuk pada Februari 2022 ke tingkat yang lebih tinggi (Grafik 4). Sampai dengan posisi Mei 2022, harga Kedelai dan Gandum internasional pada triwulan II 2022 masing-masing meningkat 1,21 USD/bsh dan 2,64 USD/bsh dibandingkan posisi triwulan I 2022. Di sisi lain, harga pupuk internasional pada triwulan II 2022 (angka s.d. Mei) terpantau menurun 24,85% jika dibandingkan posisi triwulan I 2022. Lebih lanju, kenaikan harga komoditas internasional yang disebabkan oleh eskalasi tensi geopolitik berpotensi meningkatkan tekanan inflasi VF pada triwulan II 2022, meski sedikit tertahan oleh harga pupuk internasional yang mulai melandai. Asesmen KPw BI Provinsi Lampung menunjukkan bahwa setiap harga Kedelai, Gandum, dan Pupuk masing-masing sebesar 1 USD/bsh, 0,6 USD/bsh, dan 1 USD/ton berpotensi peningkatan IHK VF sebesar 0,46%, 0,28%, dan 0,14%.

Grafik 4.Kenaikan Harga Komoditas Bahan Pangan Internasional

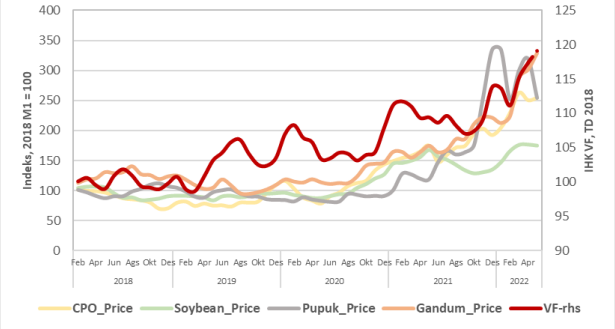

Sumber: Bloomberg, BPS, diolah

Grafik 5.Kenaikan Harga Minyak Dunia

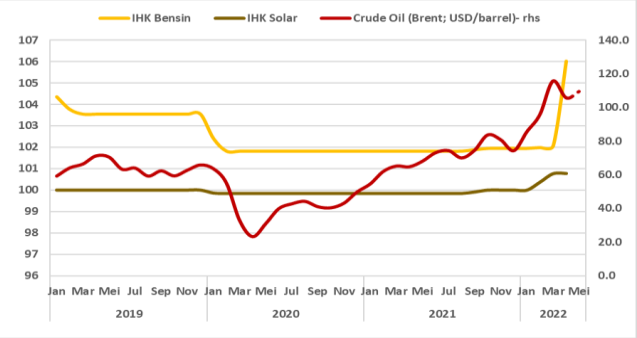

Sumber: Bloomberg, BPS, diolah

Selanjutnya, IHK Bensin dan Solar Provinsi Lampung terpantau mengalami peningkatan pada April 2022 seiring dengan kenaikan harga energi internasional dan respon Pemerintah. Harga minyak mentah (Brent) terpantau telah mengalami peningkatan sejak April 2020, pasca terkontraksi pada Maret 2020 akibat penyebaran COVID-19. Peningkatan harga terus berlangsung di sepanjang 2021 akibat terjadinya krisis energi di Eropa. Pada awal tahun 2022, harga minyak mentah kembali melonjak tinggi akibat tereskalasinya tensi geopolitik Rusia dan Ukraina (Grafik 5). Merespon perkembangan tersebut, Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada April 2022 (Tabel 1). Perkembangan tersebut mendorong kenaikan IHK Bensin dan Solar pada April 2022 masing-masing sebesar 3,87% (mtm) dan 0,01% (mtm). Oleh karena itu, tekanan inflasi Bensin dan Solar pada triwulan II 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun kenaikannya relatif terbatas jika kenaikan harga BBM hanya berlaku untuk BBM non-subsidi. Lebih lanjut, peningkatan tekanan inflasi kelompok VF dan AP pada triwulan II 2022 diperkirakan turut menyumbang kenaikan IHK Kelompok Inti pada triwulan II 2022, terutama melalui tampak tidak langsung kepada IHK Kelompok Makanan Jadi dan meningkatnya biaya input seiring kenaikan harga energi.

Tabel 1. Kenaikan Harga BBM non-subsidi pada April 2022

BBM	Harga Triwulan I 2022	Harga per April 2022
Bensin (Rp/liter)		
Pertamax Turbo	Rp12.500	Rp14.800
Pertamax	Rp9.000	Rp12.750
Solar (Rp/liter)		
Pertamina Dex	Rp10.200	Ro14.000
Dexlite	Rp9.500	Rp13.250

Sumber: pertamina.com

BAB 4. PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN UMKM

- *Kinerja sektor rumah tangga mengalami peningkatan pada triwulan I 2021 sejalan dengan relaksasi pembatasan mobilitas penduduk untuk mencegah varian Omicron Covid-19. Bertahannya kinerja konsumsi rumah tangga pada periode laporan terkonfirmasi dari stabilnya keyakinan konsumen terhadap perkembangan ekonomi pada triwulan berjalan yang tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE). Sementara itu, kinerja korporasi Lampung pada triwulan I 2022 tumbuh positif sejalan dengan peningkatan permintaan domestik. Peningkatan kinerja korporasi berasal dari peningkatan kinerja sektor pengolahan dan perdagangan.*

- *Secara umum, indikator utama kinerja Bank Umum (berdasarkan lokasi bank) di Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 menunjukkan perbaikan sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi. Di sisi lain, kinerja perbankan syariah pada triwulan I 2021 melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selanjutnya, dukungan perbankan Lampung pada UMKM di triwulan I 2022 mengalami peningkatan dengan kualitas kredit yang relatif terjaga dibawah threshold 5%.*

4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga

Kinerja sektor rumah tangga mengalami peningkatan pada triwulan I 2022 sejalan dengan masih terjaganya optimisme penduduk. Konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama perekonomian Lampung (61,73% PDRB) tumbuh 4,05% (yoy) pada triwulan I 2022, meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,70% (yoy) (Grafik 4.1). Walaupun demikian, peningkatan pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh pembatasan mobilitas masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran varian Omicron yang terjadi pada sejak akhir Februari 2022 (Grafik 4.3). Penyebaran varian Omicron tersebut menyebabkan melambatnya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi, yang tercermin dari IKK sebesar 115,8, melambat dari 126,58 pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.2). Meningkatnya penyaluran kredit kepada rumah tangga tersebut diiringi oleh perbaikan kualitas kredit yang diindikasikan oleh NPL yang tercatat sebesar 4,70% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan 5,00% pada triwulan IV 2021.

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga

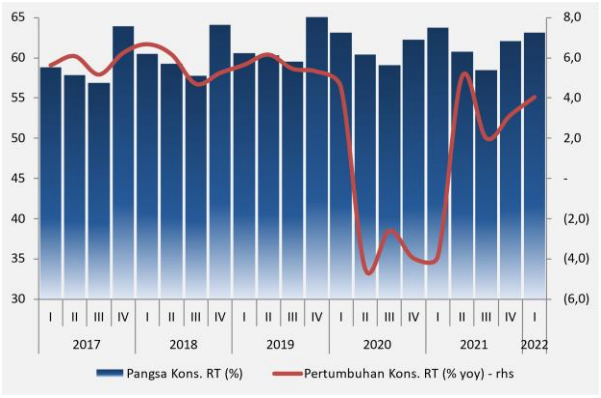

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 4.2 Data Konfirmasi COVID-19 Provinsi Lampung

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.3 Indeks Keyakinan Konsumen

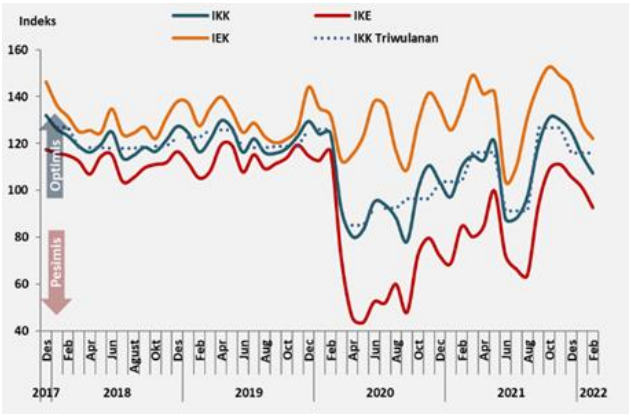

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

4.1.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Penyaluran kredit konsumsi tetap tumbuh positif, sejalan dengan membaiknya kinerja konsumsi tangga pada triwulan I 2022. Pertumbuhan PDRB konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 4,05% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 3,70% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Walaupun demikian, peningkatan yang lebih tinggi tertahan dengan adanya pembatasan mobilitas penduduk yang lebih ketat oleh Pemerintah menanggapi potensi penyebaran varian Omicron COVID-19 **(Grafik 4.3).**

Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2022 terkonfirmasi dari masih baiknya keyakinan konsumen terhadap perkembangan ekonomi pada triwulan berjalan yang tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE). Hasil survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata IKE pada triwulan I 2022 sebesar 100. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat masih memiliki pandangan optimis terhadap kondisi ekonomi saat ini **(Grafik 4.4)**, yang didorong oleh masih tingginya keyakinan konsumen terhadap kondisi penghasilan dan pengeluaran konsumsi barang tahan lama saat ini **(Grafik 4.4).**

Pada triwulan I 2022, eksposur utang perseorangan Lampung yang ditunjukkan oleh kredit konsumsi tetap tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kredit konsumsi kepada perseorangan tercatat tumbuh sebesar 2,28% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan sebesar 2,71% (yoy) pada triwulan IV 2021 ditengah terjaganya kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2022 **(Grafik 4.5).** Perlambatan kredit konsumsi pada triwulan I 2022 bersumber dari penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang masih terkontraksi sebesar 12,57%(yoy), meski membaik jika dibandingkan dengan -15,92% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Grafik 4.4 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini

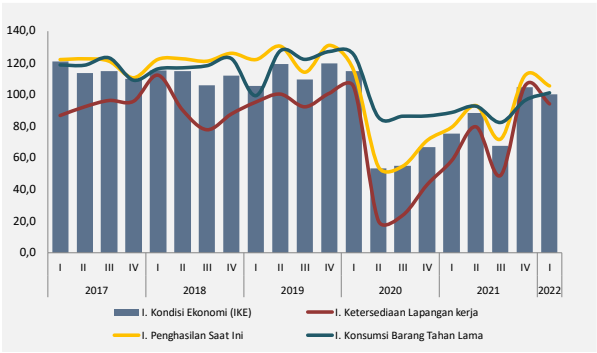

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 4.5 Kredit Perseorangan Lampung

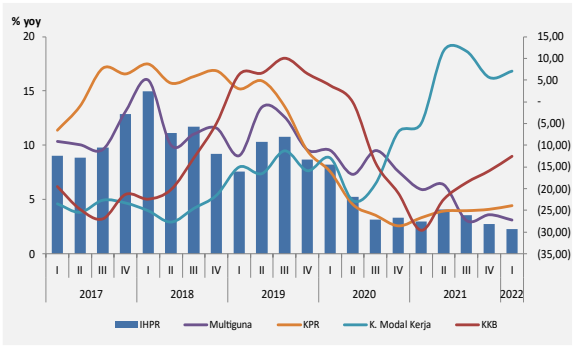

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.6 Indeks Ekspektasi Konsumen 6 Bulan Mendatang

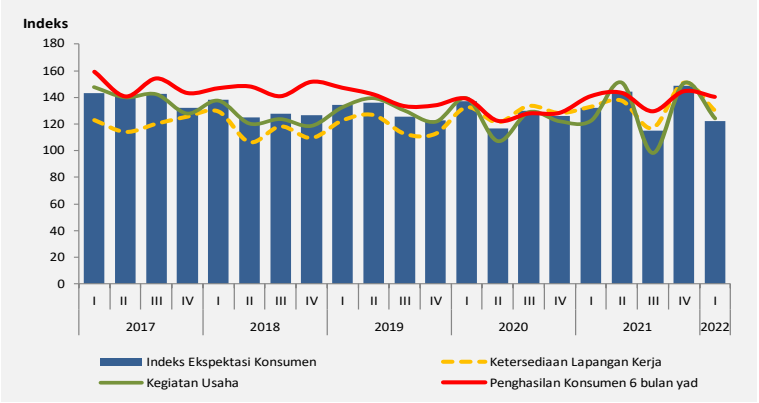

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

4.1.2 Kinerja Keuangan Rumah Tangga

Sejalan dengan peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2022, penghasilan konsumen di Provinsi Lampung tercatat masih terjaga. Walaupun indeks penghasilan konsumen pada triwulan I 2022 (105,33) tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (112,0), namun indeks tersebut mengindikasikan bahwa persepsi konsumen masih tetap berada di level optimis (indeks > 100). Kondisi ini berimplikasi pada membaiknya konsumsi masyarakat sebagaimana tercermin pada peningkatan konsumsi barang tahan lama (*durable goods*), dari 96,0 pada triwulan IV 2021 menjadi 100,83 pada triwulan I 2022. Di sisi lain, Indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini menunjukkan penurunan dari 105,3 pada triwulan IV 2021 menjadi 93,83 pada triwulan I 2022. Adapun kondisi tersebut didukung oleh *likert scale* tingkat upah (1,09) dan tenaga kerja (0,18) yang mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan nilai masing-masing sebesar 1,67 dan 0,78. Hal ini secara umum disebabkan oleh perusahaan yang cenderung melakukan efisiensi dalam bisnis dengan cara mengurangi biaya melalui pengurangan jumlah tenaga kerja **(Grafik 4.7)**.

Grafik 4.7 LS Tingkat Upah & Tenaga Kerja

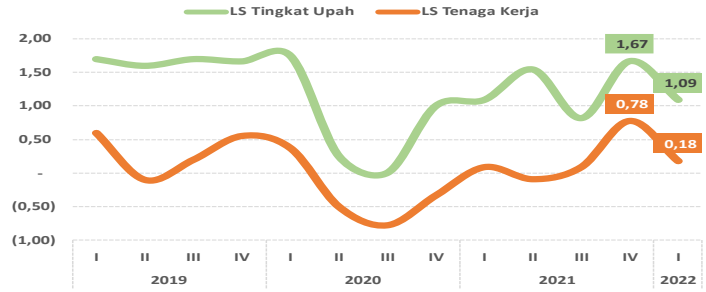

Sumber: Liaison Bank Indonesia Provinsi Lampung

4.1.3 Dana Pihak Ketiga Perseorangan di Perbankan

Di tengah perlahan membaiknya kinerja ekonomi, simpanan rumah tangga di perbankan pada triwulan I 2022 melambat. Pada triwulan I 2022, dana Pihak Ketiga (DPK) perseorangan di perbankan Lampung tercatat sebesar 6,44% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (6,55%; yoy) **(Grafik 4.8).** Pertumbuhan DPK perseorangan ini juga tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan total DPK perbankan yang tumbuh 9,87% (yoy) pada periode yang sama. Sektor rumah tangga tetap menjadi pendorong kinerja sekaligus sumber utama pembiayaan perbankan Lampung dengan pangsa mencapai 70,12% **(Grafik 4.9).**

Grafik 4.8 Pertumbuhan DPK Perbankan

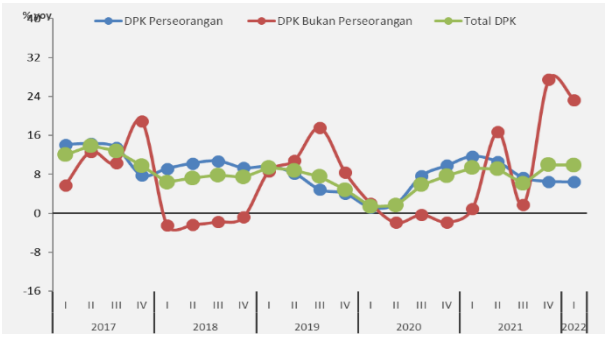

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.9 Komposisi DPK Perbankan

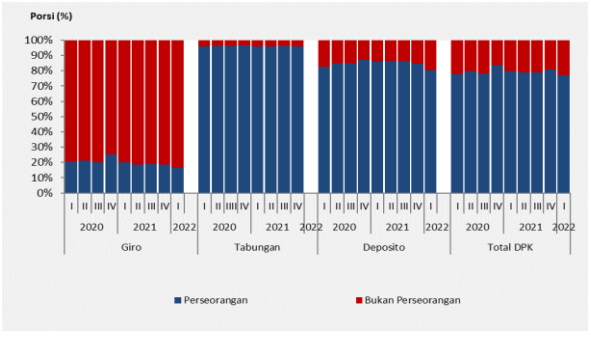

Sumber: LBU Bank Indonesia

Perlambatan pertumbuhan DPK perseorangan terutama didorong oleh terkontraksinya giro dan deposito **(Grafik 4.10)**. Pada triwulan I 2022, giro dan deposito masing-masing tercatat terkontraksi sebesar 7,04% (yoy) dan 5,48% (yoy), relatif lebih baik jika dibandingkan dengan -12,68% (yoy) dan -4,65% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perlambatan DPK perseorangan lebih jauh tertahan oleh tabungan yang tumbuh sebesar 11,58% (yoy), yang sedikit melambat jika dibandingkan dengan 11,63% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Grafik 4.10 Pertumbuhan DPK Perseorangan

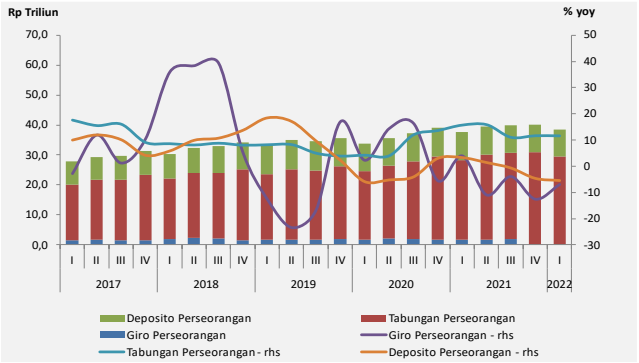

Sumber: LBU Bank Indonesia

4.1.4 Eksposur Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga

Portofolio kredit sektor rumah tangga (kredit perseorangan) pada triwulan laporan tercatat meningkat. Pada triwulan I 2022, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tercatat tumbuh sebesar 9,44% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 8,55% (yoy) pada triwulan IV 2021. Dari sisi penggunaan, membaiknya penyaluran kredit dipengaruhi oleh masih tetap kuatnya penyaluran seluruh komponen Kredit Modal Kerja (KMK), membaiknya penyaluran Kredit Investasi (KI), serta terjaganya penyaluran Kredit Konsumsi (KK) yang memiliki *share* terbesar dalam penyaluran kredit kepada rumah tangga **(Grafik 4.11)**.

Penyaluran kredit konsumsi tercatat sebesar 2,28% (yoy), sedikit melambat jika dibandingkan dengan 2,71% (yoy) pada triwulan IV 2021. Penyaluran kredit modal kerja yang tetap tumbuh positif juga turut menjaga perbaikan penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga. Kredit modal kerja pada triwulan I 2022 tercatat tumbuh positif sebesar 16,84% (yoy), kembali meningkat jika dibandingkan dengan 16,25% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, penyaluran Kredit Investasi (KI) pada triwulan I 2022 sebesar 11,38% (yoy), kembali tumbuh positif setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 0,52% (yoy).

Penyaluran kredit perseorangan pada triwulan I 2022 yang membaik diikuti oleh terjaganya risiko kredit yang yang tercermin dari NPL yang sebesar 2,49%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2,52% pada triwulan sebelumnya. Walaupun nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun tingkat *non performing loan* kredit perseorangan tersebut masih tergolong terjaga (<5%).

Grafik 4.11 Pertumbuhan Kredit Perseorangan

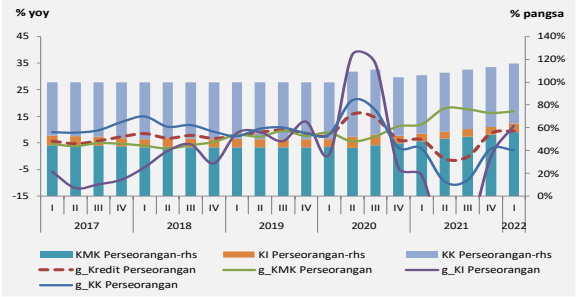

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.12 Pertumbuhan Kredit Konsumsi Perseorangan

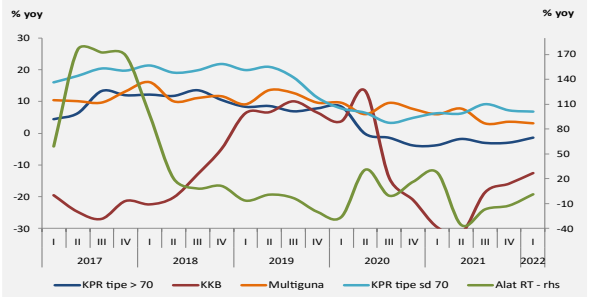

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.13 Komposisi Kredit Konsumsi Perseorangan

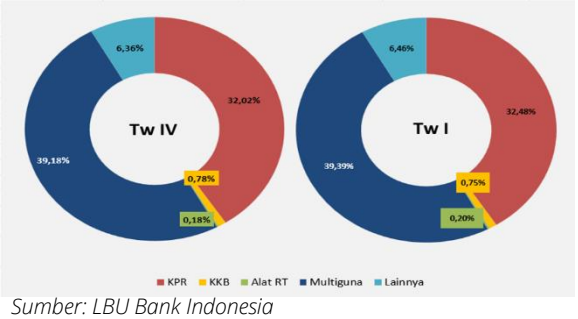

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.14 Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial

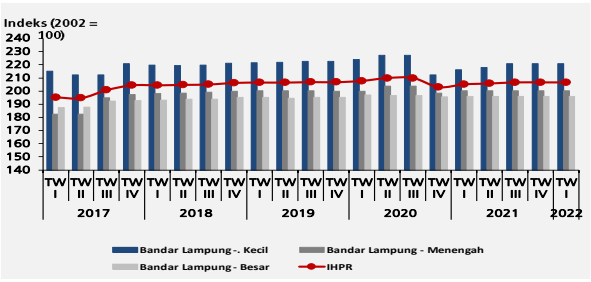

Sumber: SHPR Bank Indonesia

Membaiknya kredit konsumsi perseorangan didorong oleh penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Alat Rumah Tangga, serta peningkatan penyaluran KPR 70 dan multiguna. Pada triwulan I 2022, penyaluran KKB dan kredit alat rumah tangga tercatat masing-masing sebesar -12,57% (yoy) dan -1,19% (yoy), membaik jika dibandingkan dengan -15,92% (yoy) dan -12,47% (yoy) pada triwulan sebelumnya **(Grafik 4.12).** Penyaluran KPR juga turut mendorong perbaikan kinerja kredit konsumsi. Pada triwulan I 2022 KPR tumbuh 4,45% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 4,11% (yoy) pada triwulan sebelumnya **(Grafik 4.12)**. Peningkatan pertumbuhan penyaluran KPR sejalan dengan kebijakan pelonggaran ketentuan LTV (aturan DP 0%) yang masih berlaku hingga bulan Desember 2022. Peningkatan KPR terkonfirmasi dari pergerakan harga properti yang menunjukkan peningkatan sejak triwulan III 2021 **(Grafik 4.14). Sama halnya dengan KPR, peningkatan pertumbuhan kredit multiguna yang relatif terjaga juga turut mendorong p**erbaikan kredit konsumsi lebih jauh. Pada triwulan I 2022, kredit multiguna tumbuh sebesar 3,12% (yoy), sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan 3,60% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

4.2 Asesmen Sektor Korporasi

4.2.1 Kinerja Korporasi

Kinerja korporasi Lampung pada triwulan I 2022 tercatat bertahan positif sejalan dengan peningkatan permintaan domestik. Bertahannya kinerja korporasi ditopang oleh Lapangan Usaha (LU) perdagangan dengan pangsa sebesar 13,00% dari PDRB. Tetap kuatnya sektor perdagangan didukung oleh indeks keyakinan konsumen survei konsumen (SK) sebesar 107,33 yang mengindikasikan tingkat optimisme masyarakat yang masih terjaga. Selain itu, hal tersebut juga didukung oleh total omset penjualan hasil survey pedagang eceran (SPE) yang tumbuh sebesar 16,87% (yoy), meningkat dibandingkan 6,20% (yoy) pada triwulan sebelumnya

Sementara itu, kinerja LU pertanian, pengolahan yang masing-masing memiliki share 23,7% dan 20,9% terhadap PDRB tercatat terkontraksi. Adapun kinerja LU konstruksi juga tercatat

melambat walaupun tetap tumbuh. Pada triwulan I 2022, kinerja industri pertanian dan pengolahan masing-masing terkontraksi sebesar 0,88% (yoy) dan 0,27% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 1,90% (yoy) dan 2,58% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Selanjutnya, kinerja industri konstruksi tercatat masih tumbuh positif sebesar 5,04% (yoy), walaupun melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,48% (yoy).

Melambatnya kinerja pertanian sejalan dengan meningkatnya harga pupuk dan revitalisasi irigasi yang menyebabkan melambatnya produksi berbagai pangan. Adapun kontraksi terhadap industri pengolahan secara umum disebabkan oleh meningkatnya bahan baku CPO, kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) oleh Pemerintah, serta masih terdisrupsinya rantai pasok yang disebabkan oleh masih tingginya biaya kontainer. Adapun melambatnya pertumbuhan lapangan usaha konstruksi sejalan dengan melambatnya pengadaan semen (-5.46%; yoy) dan telah selesainya beberapa proyek strategis nasional (PSN) seperti Bendungan Maratiga dan Bendungan Way Sekampung.

Walaupun demikian, tetap kuatnya kinerja sektor utama pada triwulan I 2022 terkonfirmasi dari indikator realisasi kegiatan usaha, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan *Liaison*. Pada triwulan I 2022 realisasi kegiatan usaha yang ditunjukkan oleh Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 13,87 sedikit melambat jika dibandingkan dengan 15,97 pada triwulan IV 2021 **(Grafik 4.16)**. Sementara itu, berdasarkan hasil liaison, *likert scale* (LS) penjualan domestik korporasi tercatat stabil pada nilai pada triwulan I 2022 **(Grafik 4.15)**.

Grafik 4.15 LS Penjualan Domestik

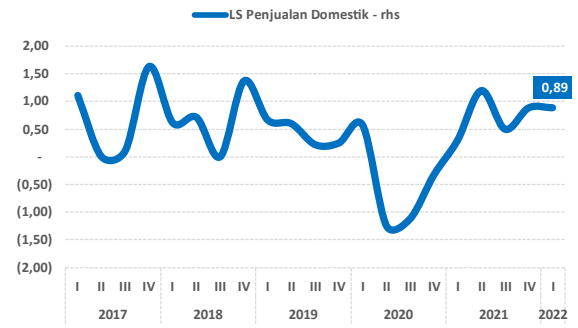

Sumber: Liaison Bank Indonesia dan BPS, diolah

Grafik 4.16 Survei Kegiatan Dunia Usaha

Sumber: Liaison Bank Indonesia dan BPS, diolah

Grafik 4.17 Perkembangan Ekspor

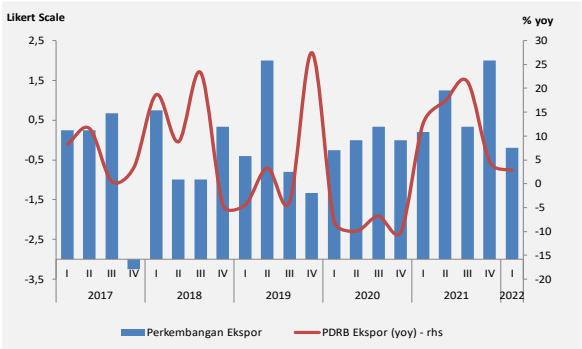

Sumber: Liaison Bank Indonesia dan BPS, diolah

Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekspor Lampung pada triwulan I 2022 tercatat tumbuh positif sebesar 2,80% (yoy), meski melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (4,5%; yoy). Melambatnya kinerja ekspor pada triwulan I 2022 terkonfirmasi dari hasil *Liason* kepada pelaku usaha yang ditunjukkan oleh *Likert Scale* (LS) ekspor sebesar -0,2 **(Grafik 4.17)**. Melambatnya eskpor Lampung terutama disebabkan oleh masih tingginya biaya *container* hingga tiga kali titik normal **(Grafik 4.18)**, siklus panen yang kurang mendukung **(Grafik 4.19)**, meningkatnya biaya energi, serta kebijakan *Domestic Price Obligation* (DPO) dan *Domestic Market Obligation* (DMO) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pasokan CPO dalam negeri.

Grafik 4.18 Biaya Kontainer

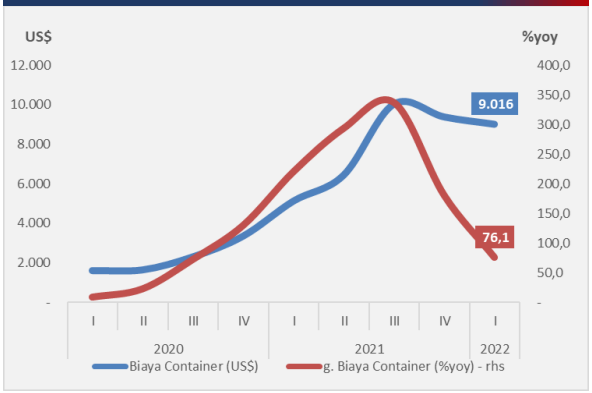

Sumber: Freights Baltic Index (FBX)

Grafik 4.19 Peta Iklim

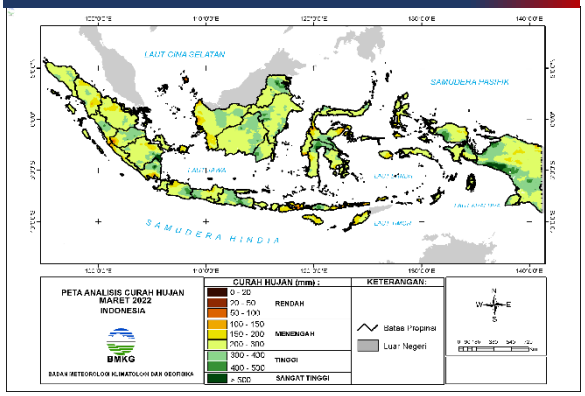

Sumber: BMKG

4.2.2 Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi

Sejalan dengan bertahannya kinerja korporasi pada triwulan I 2022, penyaluran kredit perbankan pada sektor korporasi terpantau masih tercatat positif sebesar 0,70% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan 1,13% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.20). Secara umum, pertumbuhan tersebut bersumber dari membaiknya penyaluran kredit untuk industri pengolahan dan perdagangan. Pada triwulan I 2022, penyaluran kredit pada LU pertanian tercatat terkontraksi sebesar 7,87% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan -4,44% (yoy) pada periode sebelumnya. Kredit untuk LU industri pengolahan dan perdagangan masing-masing tumbuh sebesar 3,66% (yoy) dan 10,12% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 0,95% (yoy) dan 9,28% (yoy) pada triwulan IV 2021. Sementara itu, penyaluran kredit pada sektor konstruksi tercatat kembali terkontraksi sebesar 3,66% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan 0,66% (yoy) pada triwulan IV 2021. Masih tumbuhnya penyaluran kredit perbankan kepada korporasi pada triwulan I 2022 sejalan dengan penurunan suku suku bunga sebesar 0,16 bps menjadi 9,78% **(Grafik 4.22)**.

Grafik 4.20 Pertumbuhan Kredit Korporasi

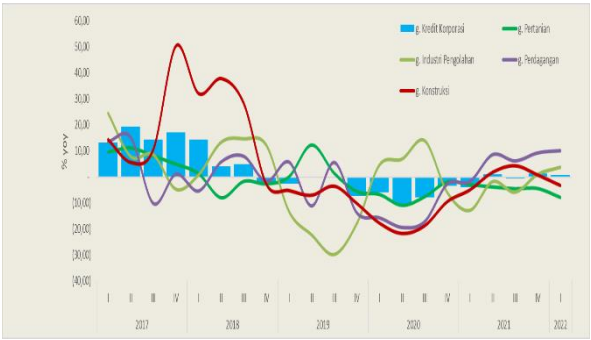

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.21 Komposisi Penyaluran Kredit Korporasi

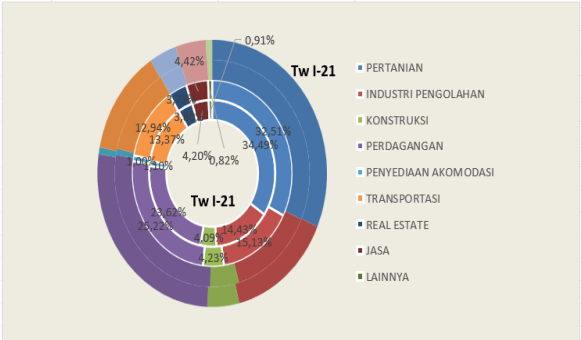

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.22 Rata-Rata Suku Bunga Kredit Bank Umum

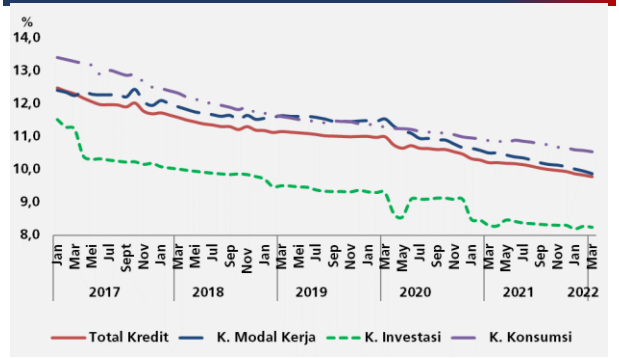

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Perkembangan NPL Kredit Korporasi

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Peningkatan penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2022 diiringi oleh perbaikan kualitas kredit yang ditunjukkan oleh rasio NPL (gross) yang lebih rendah jika dibandingkan rasio NPL triwulan IV 2021. NPL kredit korporasi tercatat sebesar 11,34%, lebih rendah jika dibandingkan dengan 12,58% pada triwulan sebelumnya **(Grafik 4.23).** Meski demikian, posisi NPL tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan NPL keseluruhan portofolio bank pada triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 4,70%. Di tengah upaya restrukturisasi kredit untuk mendorong pemulihan ekonomi, perbankan tetap perlu mengedepankan kehati-hatian dan selektif terhadap sektor yang secara historis memicu kenaikan risiko kredit.

4.3 Asesmen Institusi Keuangan

4.3.1 Bank Umum

Secara umum, indikator utama kinerja Bank Umum (berdasarkan lokasi bank) di Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan aset bank umum di Lampung per Maret 2022 tercatat sebesar Rp73,96 triliun atau tumbuh sebesar 11,27% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan IV 2021 (10,17% (yoy) **(Tabel 4.1).** Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada periode laporan tercatat sebesar 9,87% (yoy), sedikit melambat jika dibandingkan dengan 9,98% (yoy) pada triwulan IV 2021.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Bank Umum Provinsi Lampung

Indikator Perbankan	2018				2019				2020				2021				2022
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Aset (Rp. Milyar)	61.889,11	64.402,98	64.441,15	63.864,15	64.790,52	69.033,03	69.229,27	65.722,13	63.608,32	65.114,75	67.672,08	65.548,03	66.467,35	69.067	70.251	72.213	73.958
Pertumbuhan Aset (%yoy)	10,06	5,83	4,90	6,07	4,69	7,19	7,43	2,91	(1,82)	(5,68)	(2,25)	(0,26)	4,49	6,07	3,81	10,17	11,27
Total DPK (Rp. Milyar)	38.999,35	41.434,24	41.810,27	41.432,59	42.666,26	45.085,43	44.977,02	43.425,18	43.247,89	45.809,59	47.599,89	46.780,94	47.289,18	49.988	50.491	51.451	51.958
Pertumbuhan DPK (%yoy)	6,39	7,25	7,85	7,44	9,40	8,81	7,57	4,81	1,36	1,61	5,83	7,73	9,34	9,12	6,07	9,98	9,87
Total Kredit (Rp. Milyar)	52.138,02	53.414,21	53.688,73	54.795,38	54.610,69	56.081,14	56.756,27	55.724,68	55.776,98	54.863,98	56.621,73	57.396,36	57.379,46	58.955	59.890	60.858	60.627
Pertumbuhan Kredit (%yoy)	9,17	5,25	6,13	4,61	4,74	4,99	5,71	1,70	2,14	(2,17)	(0,24)	3,00	2,87	7,46	5,77	6,03	5,66
NPL (%)	2,33	2,36	2,34	2,32	2,67	2,69	2,25	2,82	2,94	2,85	2,75	2,49	5,52	5,49	5,36	5,00	4,70
LDR (%)	135,35	130,65	130,56	133,66	130,14	126,12	128,29	129,69	131,28	122,72	122,38	124,12	123,22	119,64	120,58	119,58	118,34

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.24 Pertumbuhan Kredit Bank Umum

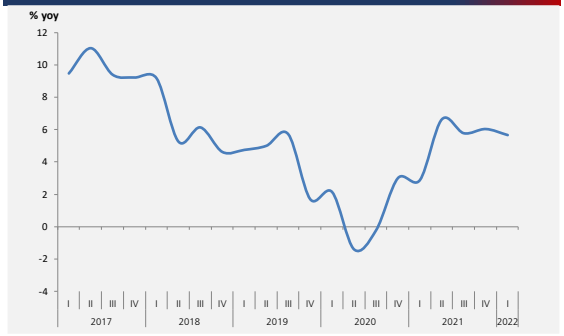

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.25 Pertumbuhan Kredit Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan

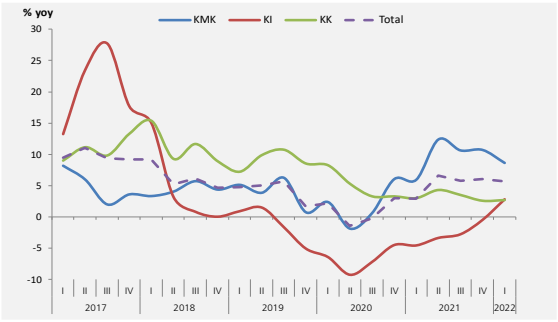

Sumber: LBU Bank Indonesia

Kinerja kredit bank umum pada triwulan I 2022 tumbuh 5,66% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (6,03%; yoy). Berdasarkan jenis penggunaannya, penyaluran kredit Bank Umum di Provinsi Lampung masih terkonsentrasi untuk Kredit Modal Kerja (KMK), dengan pangsa yang mencapai 51,20% dari keseluruhan penyaluran kredit Bank Umum, diikuti oleh kredit konsumsi (30,39%) dan kredit investasi (18,41%). Masih terjaganya pertumbuhan penyaluran kredit bank pada triwulan I 2022 terutama bersumber dari tetap tumbuhnya KMK dan meningkatnya Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK). Pada triwulan I 2022, kredit modal kerja tumbuh sebesar 8,61% (yoy), sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan 10,67% (yoy) pada periode sebelumnya. Sementara itu, penyaluran KK tumbuh positif sebesar 2,70% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2,59% (yoy) pada triwulan IV 2022. Di sisi lain, Kredit Investasi (KI) kini kembali tumbuh sebesar 2,79% (yoy), setelah terkontraksi sebesar 0,51% (yoy) pada triwulan IV 2021 **(Grafik 4.25)**. Peningkatan penyaluran kredit pada triwulan IV 2021 diiringi oleh perbaikan kualitas kredit yang ditunjukkan oleh penurunan NPL menjadi sebesar 4,70%, lebih rendah jika dibandingkan dengan 5,00% pada triwulan sebelumnya.

Secara sektoral, melambatnya pertumbuhan kredit Bank Umum di Provinsi Lampung disebabkan oleh perlambatan penyaluran kredit pada seluruh sektor industri, konstruksi, dan jasa keuangan. Pada triwulan I 2022, penyaluran kredit pada sektor pertanian dan perdagangan masing-masing tercatat tumbuh sebesar 12,14% (yoy) dan 9,61% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 11,83% (yoy) dan 8,17% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sektor akomodasi makan minum juga tercatat tumbuh sebesar 12,27% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 10,53% (yoy) pada triwulan IV 2021 **(Grafik 4.25)**. Peningkatan pertumbuhan kredit bank umum lebih jauh tertahan oleh terkontraksinya jasa keuangan. Pada triwulan I 2022, kredit terhadap jasa keuangan terkontraksi sebesar 6,17% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 5,18% (yoy) pada triwulan sebelumnya sejalan dengan dengan penyelesaian beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti bendungan Maratiga dan Bendungan Way Sekampung.

Grafik 4.26 *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Umum di Provinsi Lampung

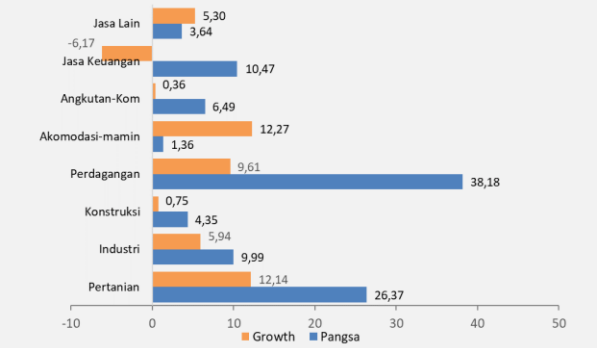

Grafik 4.27 Pertumbuhan Aset Bank Umum di Provinsi Lampung

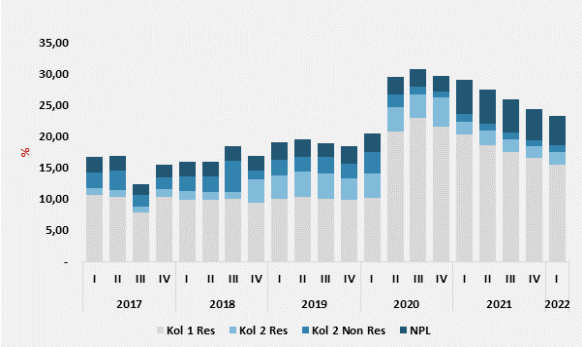

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.28 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum

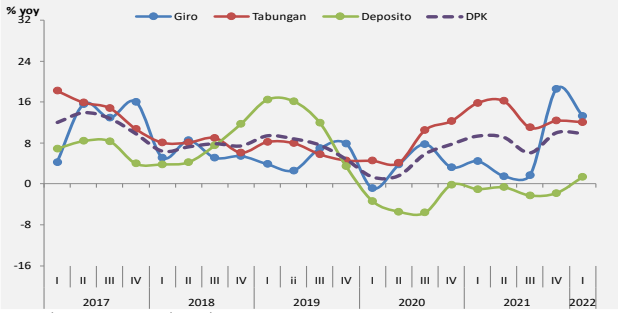

Sumber: LBU Bank Indonesia

Sementara itu, dari sisi pendanaan, pertumbuhan DPK bank umum menunjukkan peningkatan. Pada triwulan IV 2021, DPK bank umum tercatat sebesar 9,87% (yoy), sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan 9,98% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Masih terjaganya DPK utamanya didorong oleh seluruh komponen Giro, Tabungan, dan Deposito yang tetap meningkat. Pada triwulan I 2022, giro dan tabungan masing-masing tercatat tumbuh sebesar 13,33% (yoy), 12,13% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 18,63% (yoy) dan 12,37% (yoy) pada triwulan sebelumnya **(Grafik 4.28)**. Adapun untuk deposito tercatat tumbuh sebesar 1,39% (yoy), setelah terkontraksi sejak triwulan I 2020.

Grafik 4.29 Likert Scale Biaya

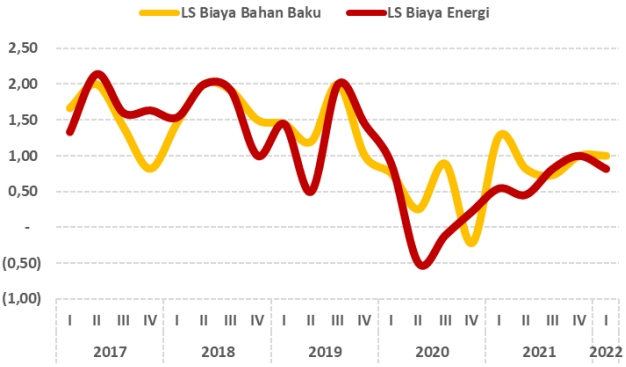

Sumber: Liaison Bank Indonesia Provinsi Lampung

Adapun kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional tergolong menurun, tercermin dari Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang sebesar 74,76%, lebih tinggi jika dibandingkan 69,22% pada triwulan sebelumnya. Menurunnya efisiensi tersebut diiringi oleh peningkatan profitabilitas yang tercermin dari peningkatan rasio ROA dari 2,91% pada triwulan IV 2021 menjadi 0,53% pada triwulan I 2022. Hal ini terkonfirmasi dengan *likert scale* biaya yang mengindikasikan bahwa masih terjadinya peningkatan biaya pada triwulan I 2022.

4.3.3 Bank Syariah

Kinerja perbankan syariah pada triwulan I 2022 terindikasi melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sama halnya dengan pertumbuhan aset Bank Umum yang secara keseluruhan terpantau melambat, pertumbuhan aset bank syariah tercatat melambat dari sebelumnya yaitu sebesar 9,80% (yoy) pada triwulan IV 2021 menjadi 3,31% (yoy) pada triwulan I 2022 (Tabel

4.2). Dari sisi pembiayaan, permintaan pembiayaan pada triwulan laporan tercatat melambat dari sebesar 7,81% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 7,74% (yoy) pada triwulan I 2022.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Bank Syariah Provinsi Lampung

Indikator Perbankan Syariah	2018				2019				2020				2021				2022
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Aset (Rp. Milyar)	3.254	3.410	3.589	3.750	3.749	3.970	4.150	4.324	4.351	4.367	4.496	4.874	4.830	4.669	4.722	5.352	4.990
Pertumbuhan Aset (%yoy)	4,97	1,20	10,51	12,56	15,23	16,45	15,66	15,31	16,05	9,98	8,33	12,71	11,02	6,93	5,03	9,80	3,31
Total DPK (Rp. Milyar)	2.377	2.295	2.434	2.489	2.631	2.779	2.865	3.014	3.026	3.041	3.167	3.438	3.420	3.465	3.527	3.763	3.633
Pertumbuhan DPK (%yoy)	2,88	-1,76	4,53	3,77	10,67	21,08	17,71	21,10	14,99	9,41	10,53	14,09	13,04	13,97	11,37	9,44	6,23
Total Pembiayaan (Rp. Milyar)	2.672	2.827	2.923	2.992	3.079	3.162	3.260	3.303	3.322	3.266	3.419	3.555	3.612	3.788	3.774	3.833	3.892
Pertumbuhan Pembiayaan (%yoy)	18,54	10,74	14,25	14,63	15,24	11,85	11,53	10,42	7,91	3,30	4,86	7,62	8,73	15,97	10,40	7,81	7,74
NPF (%)	4,45	4,16	4,16	3,98	3,46	2,77	2,45	2,65	3,08	2,96	2,68	2,46	2,46	2,24	1,76	1,77	2,05
FDR (%)	114,81	125,89	122,88	121,92	119,07	116,02	117,21	110,87	111,65	108,86	109,74	104,22	107,08	110,72	108,57	102,46	107,17

Sumber: LBUS Bank Indonesia

Pertumbuhan pembiayaan yang melambat diiringi oleh pertumbuhan DPK Bank Syariah yang juga terpantau mengalami perlambatan dari 9,44% (yoy) pada triwulan IV 2021 menjadi **6,23% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 4.30)**. Perlambatan DPK Bank Syariah bersumber dari komponen giro dan tabungan. Pada triwulan I 2022, giro dan tabungan masing-masing tercatat terkontraksi sebesar 15,39% (yoy) dan tumbuh sebesar 11,09% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 5,75% (yoy) dan 13,29% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, deposito tercatat tumbuh sebesar 4,66% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 2,87% (yoy) pada triwulan IV 2021 **(Grafik 4.31)**.

Grafik 4.30 Pertumbuhan Aset, DPK & Pembiayaan Bank Syariah

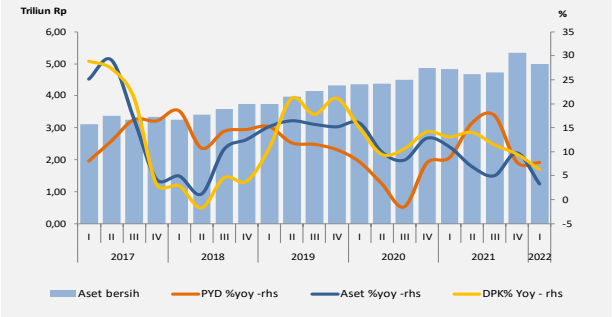

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.31 Pertumbuhan DPK Bank Syariah

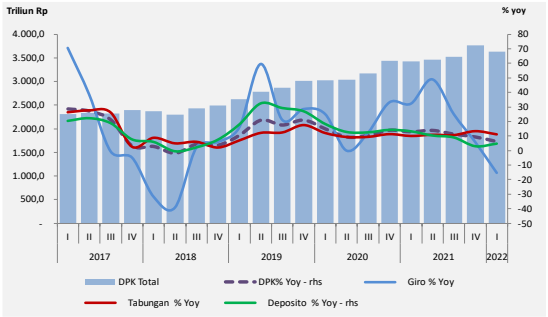

Sumber: LBU Bank Indonesia

Dari sisi pengelolaan resiko, rasio *non performing financing* (NPF) kredit bank syariah terus mengalami perbaikan sejak tahun 2018. Pada triwulan laporan, rasio NPF tercatat baik yakni 2,05%, walaupun meningkat jika dibandingkan dengan 1,77% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, sejalan dengan perbaikan ekonomi Lampung pada triwulan I 2022, pembiayaan investasi tercatat tumbuh sebesar 19,94% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 12,45% (yoy) (Grafik 4.25). Sementara itu, berdasarkan sektornya, pembiayaan tertinggi tercatat masih dialokasikan untuk sektor perdagangan (23,22%) dan jasa kesehatan (3,80%) **(Grafik 4.33).**

Grafik 4.32 Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

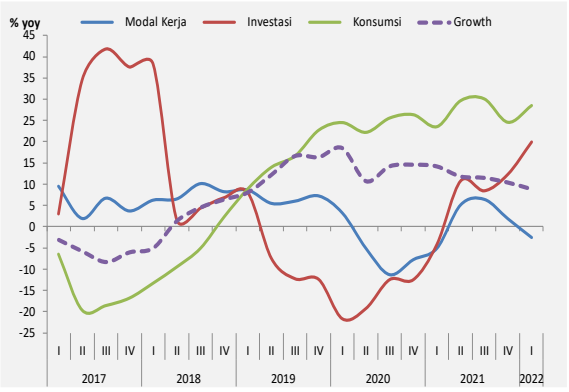

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.33 Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Sektoral

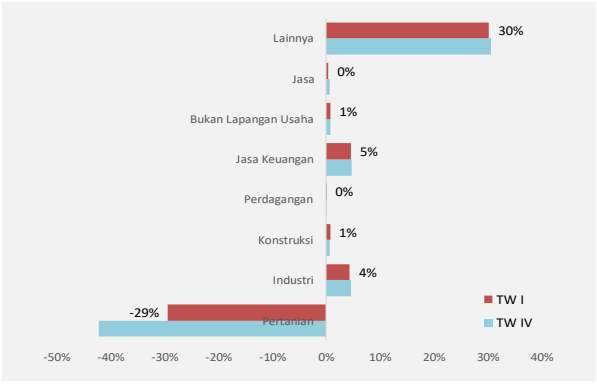

Sumber: LBU Bank Indonesia

4.4 Perkembangan Kredit UMKM

Dukungan perbankan Lampung pada UMKM pada triwulan I 2022 mengalami peningkatan, tercermin dari pertumbuhan kredit UMKM sebesar 23,73% (yoy) yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 17,67% (yoy) (Grafik 4.34). Pada triwulan I 2022, posisi penyaluran kredit UMKM tercatat meningkat menjadi Rp24,21 triliun sejalan dengan masih kuatnya kinerja ekonomi dan masih berlanjutnya optimalisasi program dan anggaran Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk klaster UMKM diantaranya berupa subsidi bunga kredit sebesar 3% hingga akhir 2022. Pada triwulan I 2022, pangsa pasar kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 39,93% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 37,91% (yoy) pada triwulan IV 2022.

Peningkatan pertumbuhan kredit kredit UMKM pada triwulan I 2022 disertai dengan perbaikan kualitas kredit. Di tengah peningkatan pertumbuhan kredit UMKM, kualitas kredit UMKM terpantau meningkat dan dalam batas aman. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) kredit UMKM pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 3,47%, kembali memburuk jika dibandingkan dengan 3,06% pada triwulan IV 2021 **(Grafik 4.35)**. Restrukturisasi kredit UMKM sebagai salah satu bentuk stimulus pemerintah kepada UMKM juga perlu terus ditingkatkan untuk mempercepat pemulihan dunia usaha dan pemulihan ekonomi. Ke depan, sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dukungan perbankan terhadap UMKM perlu terus ditingkatkan diimbangi dengan upaya pengelolaan UMKM yang juga harus terus dipacu agar kinerjanya terus membaik dan meningkatkan kualitas kredit UMKM.

4.34 Perkembangan Kredit UMKM

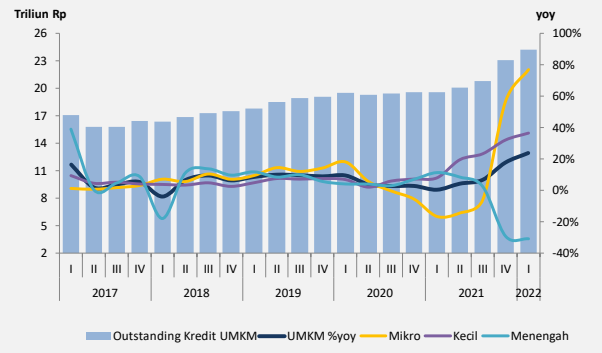

Sumber: LBU Bank Indonesia

4.35 NPL Kredit UMKM

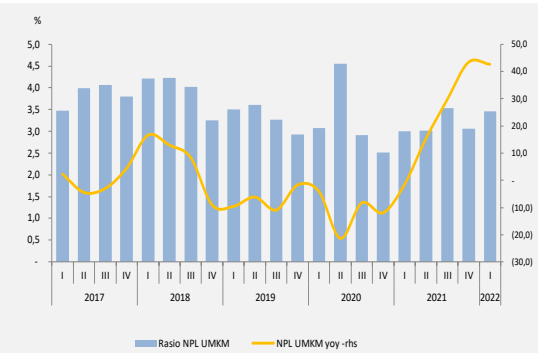

Sumber: LBU Bank Indonesia

4.5 Peningkatan Akses Keuangan UMKM

Dalam rangka mendukung pengembangan UMKM baik dari sisi peningkatan produksi, pemasaran, dan akses keuangan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung memiliki program klaster binaan. Sampai dengan Maret 2022, terdapat 32 (tiga puluh dua) UMKM binaan yang mendapat pendampingan dari Bank Indonesia. Adapun per Maret 2022 telah terdapat tiga UMKM baru yang telah menggunakan pembiayaan melalui Fintech yaitu Keripik Asya, Ratu Selvy Collection, dan Littlemonq.

Grafik 4.36 Penyaluran KUR berdasarkan Sektor Ekonomi

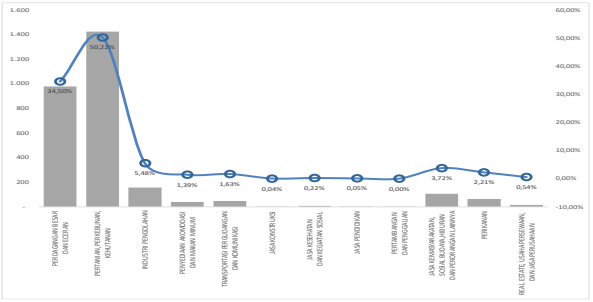

Sumber: DJPB Provinsi Lampung

Grafik 4.37 Penyaluran KUR berdasarkan Skema

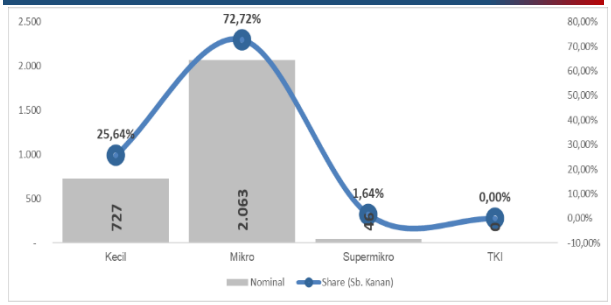

Sumber: DJPB Provinsi Lampung

Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Lampung, pemerintah memberikan subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada tahun 2021, Pemerintah memutuskan menaikkan plafon KUR tanpa jaminan menjadi Rp100 juta dan memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% hingga Juni 2022. Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR di 2021 menjadi sebesar Rp373 triliun, lebih tinggi jika dibandingkan dengan plafon yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp253 triliun. KUR yang disalurkan di Provinsi Lampung sampai dengan Maret 2022 sebesar 2.834 miliar.

Sektor utama penerima KUR adalah sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan mencapai 50,22% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 34,50% dari total KUR yang disalurkan **(Grafik 4.36)**. Sektor ekonomi penerima KUR lainnya adalah Industri Pengolahan (5,48%) dan Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya (3,72%). Total debitur yang menerima KUR di Provinsi Lampung sampai dengan Maret 2022 tercatat paling banyak dengan skema Mikro **(Grafik 4.37)** mencapai 2.063 miliar (72,72%), diikuti dengan skema Kecil mencapai 727 miliar (25,64%) dan Supermikro yang mencapai 46 miliar (1,64%).

BAB 5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

- *Pada triwulan I 2022, aliran uang kartal di Provinsi Lampung mengalami net inflow sebesar Rp1,94 triliun. Perkembangan tersebut sejalan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi pada periode laporan.*
- *Sejalan dengan kondisi tersebut, nominal transaksi pembayaran baik melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Real Time Gross Settlement (RTGS) mencatatkan pertumbuhan yang melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Demikian halnya dengan kinerja penggunaan kartu kredit yang tumbuh positif meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan perubahan kebiasaan masyarakat dalam berbelanja masih terjadi di tengah berbagai pembatasan sosial. Di tengah pembatasan sosial selama triwulan I 2022, masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas berbelanja dengan memanfaatkan pembayaran secara online.*
- *Sebagai upaya untuk lebih memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara digital, Bank Indonesia telah meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sejak tahun 2019 sebagai suatu inovasi yang dapat menyatukan transaksi berbagai macam QR dari berbagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Sampai dengan bulan Maret 2022, tercatat sudah sebanyak 232.227 pengguna/user QRIS, atau sebesar 20,21% dari jumlah yang ditargetkan di Provinsi Lampung dalam rangka mendukung capaian target nasional sebanyak 15 juta pengguna QRIS.*

5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran Tunai

Perkembangan transaksi sistem pembayaran tunai dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain jumlah aliran uang masuk dari Perbankan ke Bank Indonesia *(inflow),* jumlah aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke Perbankan *(outflow),* termasuk dukungan penyediaan Uang Layak Edar (ULE) kepada masyarakat luas melalui berbagai kegiatan, seperti penukaran uang melalui Bank Indonesia, Kas Keliling, dan Kas Titipan.

5.1.1. Perkembangan Aliran Uang Kartal

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 tercatat mengalami *net inflow* sebesar Rp1,94 triliun, berbeda dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp0,39 triliun (Grafik 5.1). Kondisi *net outflow* yang terjadi pada periode laporan terpantau sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2021 yang tumbuh melambat sebesar 2,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,15% (yoy). *Net inflow* tersebut terpantau sejalan dengan data historis dalam beberapa tahun ke belakang. Hal tersebut didorong oleh normalisasi permintaan masyarakat pasca aktivitas/kegiatan ekonomi yang cenderung lebih tinggi, khususnya pada saat HBKN Natal dan Tahun Baru.

Mobilitas masyarakat menunjukkan penurunan pada bulan Januari dan Februari 2022, namun meningkat signifikan pada Bulan Maret 2022 (Grafik 5.2). Pada bulan Januari, mobilitas masyarakat kembali menunjukkan penurunan, tercermin dari rendahnya mobilitas terhadap pusat transportasi, retail dan rekreasi, serta toko bahan makanan dan apotek. Penurunan mobilitas yang lebih dalam terjadi pada Bulan Februari 2022, khususnya di pusat transportasi, taman, serta retail dan rekreasi. Hal tersebut disebabkan oleh pengetatan PPKM untuk antisipasi penyebaran varian Omicron yang masuk Indonesia pada pertengahan Bulan Desember 2021. Namun demikian, pada bulan Maret 2022 tingkat mobilitas tersebut terpantau telah meningkat kembali sebagaimana kondisi sebelum pandemi. Kondisi ini ditengarai seiring dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang jauh lebih terkendali, tingkat vaksinasi yang terus menunjukkan peningkatan, serta keinginan yang cukup tinggi dari masyarakat untuk bepergian setelah pemberlakuan PPKM Level 3 sejak akhir Februari hingga pertengahan Maret 2022. Pelonggaran PPKM ke level 1 terpantau berhasil meningkatkan mobilitas masyarakat di Provinsi Lampung

Grafik 5.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal Triwulanan

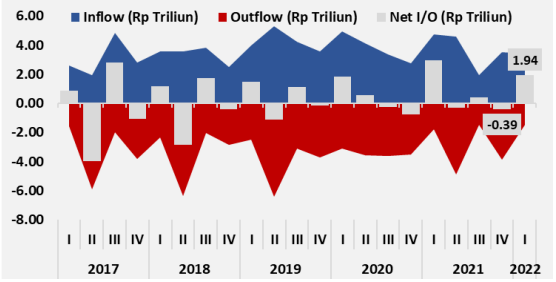

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.2 Mobilitas Masyarakat di Provinsi Lampung

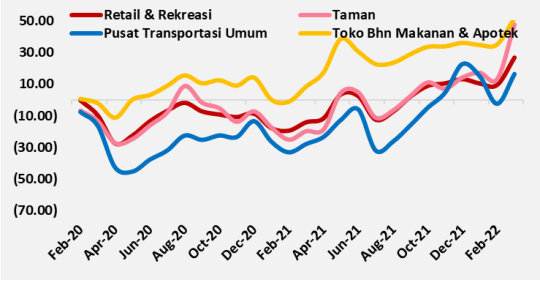

Sumber : *Google Mobility Report*

Secara lebih rinci, dapat dilihat bahwa aliran uang kartal *inflow* tercatat menurun sebesar 28,16% (yoy) (Grafik 5.3) pada triwulan I 2022, berbeda dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 27,72% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, penurunan yang terjadi pada aliran *inflow* terpantau juga terjadi pada aliran uang kartal *outflow*, yakni sebesar 18,99% (yoy) (Grafik 5.4), berbeda dengan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,33% (yoy). Kedua kondisi tersebut menyebabkan terjadinya *net inflow* pada periode laporan.

Grafik 5.3 Aliran Uang Kartal *Inflow*

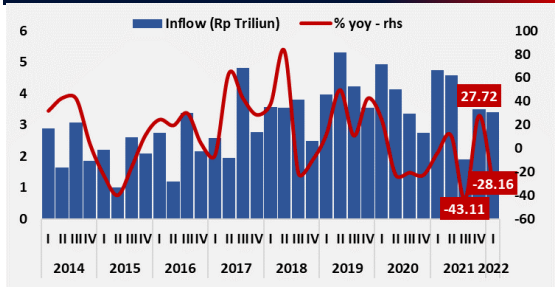

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.4 Aliran Uang Kartal *Outflow*

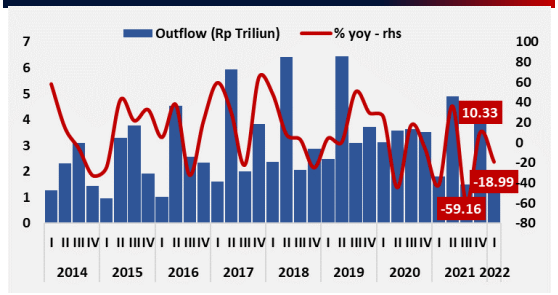

Sumber : Bank Indonesia

Adapun kegiatan ekonomi yang lebih rendah pada periode laporan tidak hanya terlihat dari aliran uang kartalnya yang tercatat *net inflow*, tetapi juga dari perkembangan pertumbuhan kredit Bank Umum di Provinsi Lampung. Pada triwulan I 2022, pertumbuhan total kredit Bank Umum tercatat tumbuh melambat, yakni dari sebesar 6,03% (yoy) menjadi sebesar 5,66% (yoy) **(Grafik 5.5)**. Berdasarkan jenis penggunaannya, perlambatan pertumbuhan terjadi pada jenis kredit modal kerja. Di sisi lain, investasi dan konsumsi mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Grafik 5.5 Pertumbuhan Kredit Bank Umum Provinsi Lampung

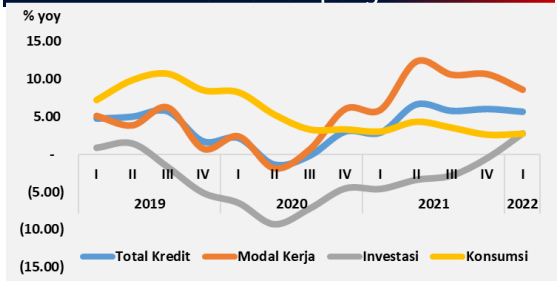

Sumber : Bank Indonesia

5.1.2. Penyediaan Uang Layak Edar

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia melakukan pengedaran uang ke berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan tentunya dalam kondisi yang layak edar.

Sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan uang kartal yang layak edar *(clean money policy)* tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung secara berkala melaksanakan layanan penukaran Uang Tidak Layak Edar (UTLE) baik secara langsung melalui loket penukaran kantor Bank Indonesia dan kas keliling, serta bersinergi dengan Perbankan untuk turut menerima penukaran uang. Selain itu, untuk terus meningkatkan kualitasnya (*soil level*), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung juga secara berkala melakukan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE).

Pada triwulan I 2022 penukaran uang melalui Bank Indonesia tercatat sebesar Rp7,01 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp16,62 miliar (Grafik 5.6). Penurunan ini diantaranya juga didorong oleh mulai diaktifkannya kembali kegiatan kas keliling pada periode berjalan, setelah diterapkannya kebijakan larangan penyelenggaraan kas keliling pada 3 (tiga) triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2022, penukaran melalui kas keliling tercatat sebesar Rp0,56 miliar atau menurun sebesar 46,15% (yoy) **(Grafik 5.7).** Layanan penukaran uang rusak merupakan upaya Bank Indonesia dalam memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar di masyarakat namun dengan tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19.

Grafik 5.6 Penukaran Uang Melalui BI

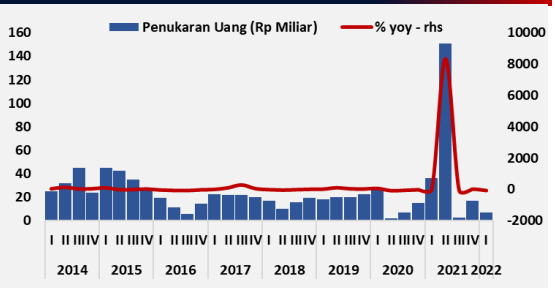

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.7 Kas Keliling

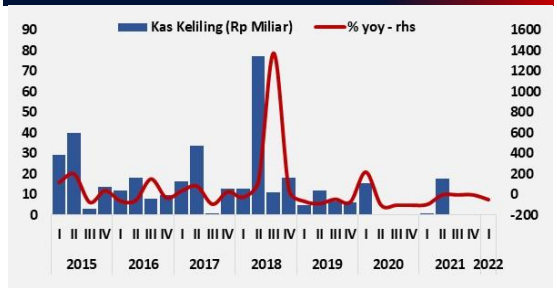

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.8 Kas Titipan

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.9 Perkembangan Pemusnahan UTLE

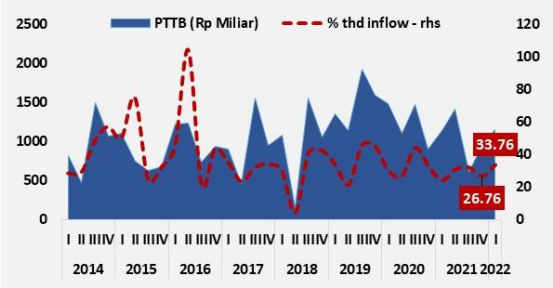

Sumber : Bank Indonesia

Selanjutnya, KPw BI Provinsi Lampung tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan Uang Layak Edar (ULE) khususnya di daerah yang terpencil melalui kegiatan kas titipan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung saat ini memiliki 1 (satu) Kas Titipan yang berada di Liwa (Kabupaten Lampung Barat) dengan dikelola oleh BRI KC Liwa. Kas Titipan Liwa memiliki Bank Peserta yang terdiri dari BNI, Bank Mandiri, BSI, dan BPD Lampung KC Liwa. Adapun selama triwulan I 2022, nominal kas titipan tercatat sebesar Rp116,14 miliar **(Grafik 5.8)**.

Di tengah aktivitas penukaran uang yang cenderung rendah di triwulan I 2022, upaya KPw BI Provinsi Lampung untuk memusnahkan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) terpantau tetap berjalan dengan optimal. Pada periode laporan, UTLE yang dimusnahkan tercatat sebesar Rp1,14 triliun. Dibandingkan dengan nominal *inflow*, persentase pemusnahan tersebut tercatat sebesar 33,76%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 26,76% **(Grafik 5.9)**.

5.1.3. Perkembangan Temuan Uang Palsu

Pada triwulan I 2022, terdapat temuan uang palsu sebanyak 417 lembar di Provinsi Lampung (Grafik 5.10). Jumlah tersebut menurun dibandingkan temuan uang palsu pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.261 lembar. Berdasarkan komposisinya, temuan uang palsu pada triwulan I 2022 tersebut seluruhnya merupakan Uang Pecahan Besar (UPB) **(Grafik 5.11),** dengan masih didominasi pecahan Rp100.000,00. Sementara itu, untuk Uang Pecahan Kecil (UPK) tercatat tidak terdapat temuan uang palsu. Upaya pencegahan dan penanganan uang palsu tetap terus dilakukan oleh KPw BI Provinsi Lampung. Kontinuitas kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah (CIKUR) kepada masyarakat tetap diupayakan dapat dilakukan melalui berbagai *platform* digital. Selain itu, sinergi juga dilakukan dengan perbankan dan pihak aparatur hukum sebagai upaya untuk terus menurunkan tindak kejahatan uang palsu di Provinsi Lampung.

Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu

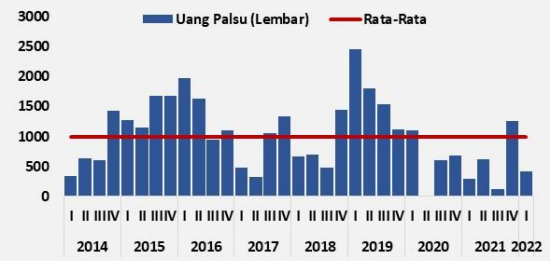

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.11 Pecahan Uang Palsu Tw I-2022

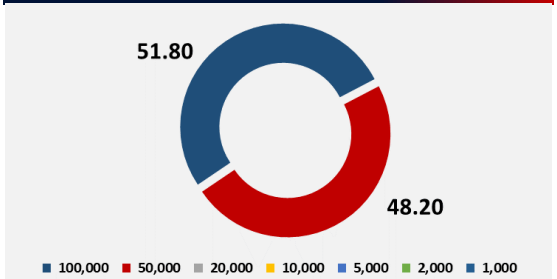

Sumber : Bank Indonesia

5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Sejalan dengan perkembangan aliran uang kartal di Provinsi Lampung, transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) mencatatkan pertumbuhan yang terkontraksi pada triwulan I 2022. Di sisi lain, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif.

Mengacu pada Grafik 5.12, diketahui bahwa transaksi pembayaran melalui SKNBI tercatat tumbuh terkontraksi sebesar 7,74% (yoy). Pertumbuhan tersebut terpantau melambat dan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya juga terkontraksi sebesar 0,04% (yoy). Berdasarkan jenisnya, turunnya transaksi kliring tersebut didorong oleh pertumbuhan kliring kredit serta kliring debit yang tercatat terkontraksi. Untuk kliring kredit, pertumbuhannya tercatat terkontraksi sebesar 5,43% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,74% (yoy). Sementara itu, untuk kliring debit terpantau mengalami kontraksi sebesar 11,17% (yoy), lebih dalam dari kontraksi triwulan sebelumnya yang sebesar 10,64% (yoy).

Adapun sebagai catatan, sejak tahun 2017 pertumbuhan tahunan transaksi SKNBI berada pada area pertumbuhan negatif. Namun demikian, pada tahun 2021 tepatnya pada triwulan II transaksinya kembali tumbuh positif meski sedikit terkontraksi dampak dari kebijakan pembatasan yang dilakukan Pemerintah. Selain ditopang oleh momentum perbaikan ekonomi pasca pandemi yang terjadi di tahun 2020, hal ini juga menjadi indikasi bergesernya *landscape* penggunaan sistem pembayaran di Provinsi Lampung dari tunai menjadi non tunai. Adanya berbagai bentuk pembatasan mobilitas sejak terjadinya COVID-19 semakin mendorong masyarakat untuk bertransaksi secara non tunai guna dapat terus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Grafik 5.12 Perkembangan Transaksi Kliring

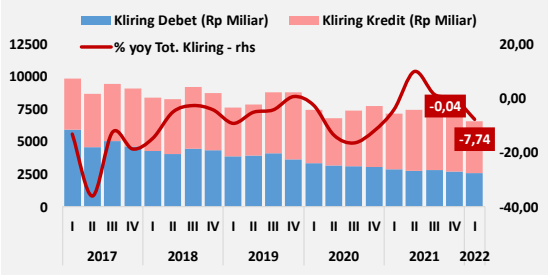

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.13 Perkembangan Transaksi RTGS

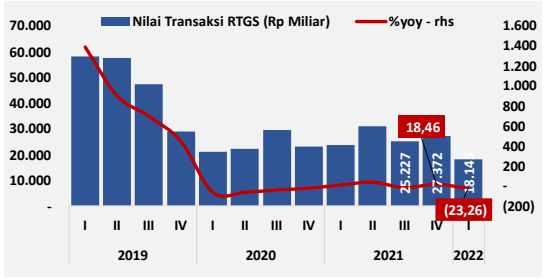

Sumber : Bank Indonesia

Selanjutnya, sejalan dengan SKNBI, transaksi pembayaran melalui RTGS juga tercatat terkontraksi dengan triwulan sebelumnya, yakni sebesar -23,26% (yoy) (Grafik 5.13). Selain itu, jika dilihat berdasarkan nominal transaksinya, jumlahnya kembali melambat dari triwulan IV 2021, yakni dari Rp27,37 triliun menjadi sebesar Rp18,145 triliun. Adapun perkembangan transaksi tersebut merupakan salah satu indikator atas melambatnya aktivitas perekonomian di Provinsi Lampung yang diakibatkan oleh kembali meningkatnya penyebaran varian Omicron COVID-19 pada pertengahan triwulan I 2022.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi, Bank Indonesia kembali memperpanjang kebijakan terkait penurunan biaya transaksi SKNBI. Biaya transfer dana sistem kliring nasional dari nasabah ke bank atau juga sering disebut Lalu Lintas Giro (LLG) maksimal sebesar Rp2.900, serta biaya transfer kliring dari perbankan ke BI sebesar Rp1 (satu Rupiah) diperpanjang hingga 30 Juni 2022. Selain itu, per 1 Desember 2020 Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan biaya transaksi RTGS. Untuk *single transfer*, biaya RTGS turun dari Rp9.000-23.000 menjadi sebesar Rp6.000-21.000, sedangkan untuk *multiple transfer*, biayanya turun dari Rp35.000-50.000 menjadi sebesar Rp28.000-45.000.

Selanjutnya, untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat (*real-time*), serta tersedia setiap saat (24/7), Bank Indonesia telah mengembangkan BI-FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang dapat mengakomodasi kebutuhan dimaksud. Dengan kehadiran BI-FAST, diharapkan hal tersebut dapat memperkuat ketahanan sistem pembayaran ritel nasional melalui penyediaan alternatif terhadap infrastruktur sistem pembayaran nasional eksisting yang saat ini terbatas pada jam operasional tertentu.

Fitur BI-FAST antara lain mencakup operasional setiap saat (24/7), dana diterima secara *real-time* oleh nasabah dan bank, melayani transfer kredit (*push*) dan debit (*pull*), dapat menggunakan *proxy address* (antara lain nomor *handphone* dan *email*) sebagai pengganti nomor rekening, notifikasi kepada nasabah secara otomatis, *fraud detection system* dan *Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism* (AML/CFT). Bank Indonesia menetapkan 2 (dua) skema harga, yaitu harga dari Bank Indonesia ke Peserta sebesar Rp19 per transaksi, serta harga dari Peserta ke Nasabah maksimal sebesar Rp2.500 per transaksi. BI-FAST akan diimplementasikan secara bertahap mulai Desember 2021 dengan prioritas awal adalah transfer kredit individual. Pada tahap awal, layanan BI-FAST dapat diakses melalui kanal *mobile/internet* maupun *counter*. Ke depan BI-FAST akan dikembangkan juga untuk transaksi melalui kanal lainnya, a.l. QRIS, ATM, dan EDC.

5.3. Perkembangan Transaksi APMK dan Uang Elektronik

Perkembangan alat pembayaran di Indonesia terus berevolusi dengan pesat. Jika semula alat pembayaran hanya berupa instrumen tunai (*cash based*), saat ini sudah semakin beralih ke alat-alat pembayaran nontunai. Terdapat beberapa contoh pembayaran nontunai, seperti cek dan bilyet giro yang diproses menggunakan mekanisme kliring/*settlement*. Selain itu, saat ini juga dikenal alat pembayaran *paperless*, seperti alat pembayaran memakai Kartu ATM/Debit dan Kartu Kredit (*card based*) dan transfer dana elektronik.

Mengacu pada perkembangan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam satu dekade terakhir telah terjadi gelombang digitalisasi yang cukup signifikan dan penetrasinya ke kehidupan masyarakat yang mengubah secara drastis perilaku masyarakat. Pola konsumsi masyarakat kini mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba *mobile*, cepat, serta aman melalui berbagai *platform*. Terlebih lagi, dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlanjut sampai dengan saat ini, kemudahan dan keamanan masyarakat dalam bertransaksi di tengah keterbatasan mobilitas menjadi hal yang sangat penting untuk difasilitasi.

Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran memiliki tugas untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar. Oleh karena itu, Bank Indonesia dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada koridor ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja demi kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran nasional.

5.3.1. Perkembangan Transaksi APMK

Kecenderungan meningkatnya aktivitas perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 secara umum tergambar pada perkembangan transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Pada periode laporan, nominal transaksi kartu ATM/Debit tercatat mampu tumbuh sebesar 30,03% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,27% (yoy) **(Grafik 5.14)**. Adapun kembali meningkatnya transaksi kartu ATM/Debit tersebut terpantau juga sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK) KPw BI Provinsi Lampung, dimana indeks pengeluaran konsumsi untuk barang tahan lama meningkat selama periode triwulan I 2022. Sampai dengan Maret 2022, indeks dimaksud tercatat sebesar 102,00, setelah pada bulan Desember 2021 menyentuh nilai 99,00 **(Grafik 5.15)**.

Grafik 5.14 Perkembangan Transaksi Kartu ATM/D

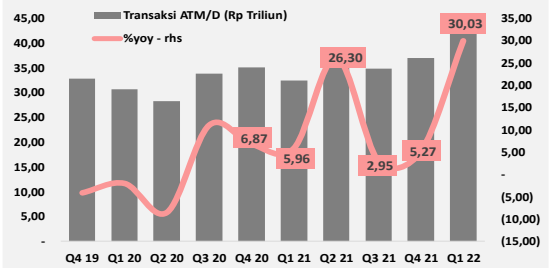

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.15 Indeks Pengeluaran Konsumsi Barang Tahan Lama

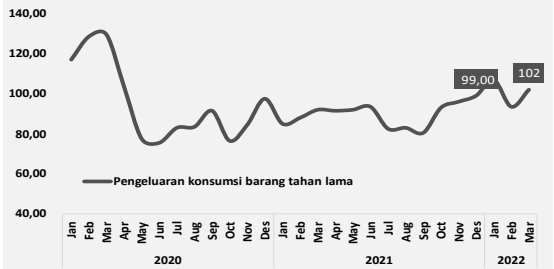

Sumber : Bank Indonesia

Berbeda dengan perkembangan kartu ATM/Debit, transaksi pembayaran melalui kartu kredit pada triwulan I 2022 terpantau tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada periode laporan, transaksi kartu kredit tumbuh sebesar 6,66% (yoy) **(Grafik 5.16)**. Adapun pertumbuhan positif tersebut melanjutkan tren positif dari triwulan II 2021 yang telah kembali tumbuh positif sejak terjadinya pandemi di tahun 2020.

Secara lebih rinci, berdasarkan jenis transaksinya terlihat bahwa masih dapat meningkatnya secara signifikan pertumbuhan transaksi kartu kredit terutama didorong oleh transaksi belanja yang memiliki pangsa terbesar (94%) berdasarkan jenis transaksi. Di sisi lain, transaksi tunai tercatat tumbuh terkontraksi sebesar 81% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 67,25% (yoy) **(Grafik 5.17)**.

Grafik 5.16 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit

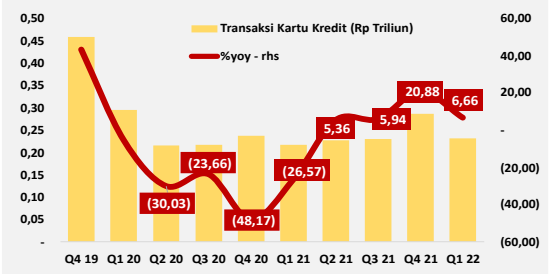

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.17 Pertumbuhan Kartu Kredit Per Jenis Transaksi (% yoy)

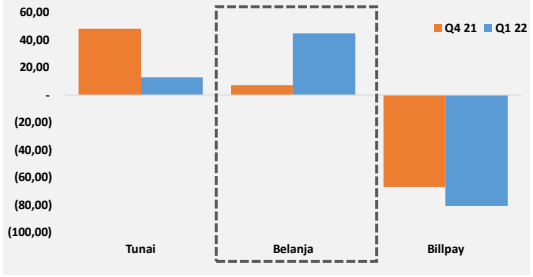

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan perkembangan di atas, terlihat bahwa timbul suatu kebiasaan baru dari masyarakat dalam berbelanja. Di tengah pemberlakuan pembatasan sosial dalam rangka pencegahan varian Omicron yang terjadi selama triwulan I 2022, masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas berbelanja seperti biasanya. Lebih lanjut, hal ini juga terpantau sejalan dengan hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh KPw BI Provinsi Lampung. Pada periode laporan, pangsa penghasilan untuk pembayaran cicilan terpantau mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya **(Grafik 5.18)**. Hal ini tentunya sebagai implikasi dari transaksi kartu kredit yang tetap tumbuh tinggi dan bahkan meningkat pada triwulan I 2022.

Grafik 5.18 Pangsa Penghasilan untuk Pembayaran Cicilan (Hasil SK)

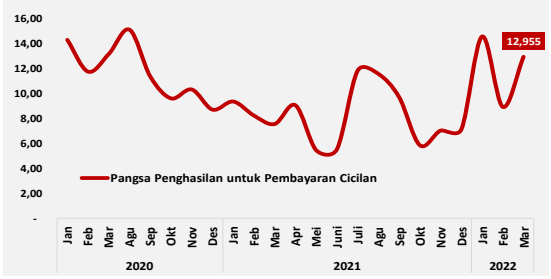

Sumber : Bank Indonesia

5.3.2. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik

Sejalan dengan tren peningkatan transaksi pembayaran APMK untuk belanja, perkembangan positif transaksi uang elektronik di Provinsi Lampung juga terus berlanjut. Pada triwulan I 2022, dana *float* atau nilai uang elektronik yang merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna tercatat sebesar Rp78,42 miliar **(Grafik 5.19)**. Jumlah tersebut terus menunjukkan tren peningkatan sejak akhir tahun 2019 dan tentunya masih akan berlanjut sejalan dengan tren digitalisasi pembayaran di masyarakat yang semakin meningkat. Terlebih lagi, preferensi terhadap pembayaran nontunai juga semakin meningkat dengan adanya pandemi yang masih terjadi.

Berdasarkan jenis transaksinya, pertumbuhan pada triwulan I 2022 terkontraksi pada seluruh jenis transaksi, antara lain belanja, transfer, dan tarik tunai masing-masing sebesar -50,11% (yoy), -26,28% (yoy), dan -5,67% (yoy). **(Grafik 5.20)**. Adapun salah satu penyebab melambatnya transaksi seperti tarik tunai adalah dengan pengetatan sosial sehubungan dengan pelaksanaan PPKM dalam rangka pembatasan penyebaran varian Omicron pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2022.

Grafik 5.19 Perkembangan Dana *Float* UE

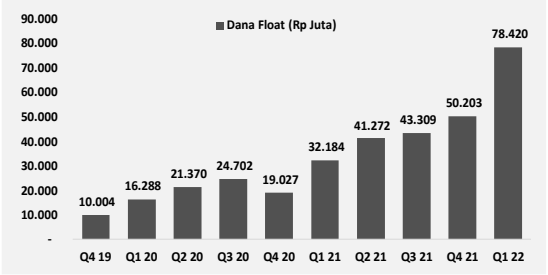

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.20 Perkembangan Transaksi UE Per Jenis Transaksi

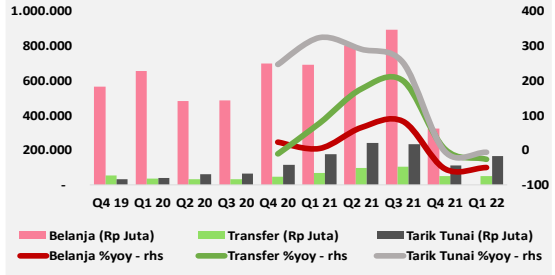

Sumber : Bank Indonesia

Adapun berdasarkan pangsanya, transaksi uang elektronik pada periode laporan sebagian besar berasal dari transaksi belanja dengan pangsa mencapai 61,18% **(Grafik 5.21)**. Sementara itu, untuk kedua jenis transaksi lainnya, yaitu tarik tunai dan transfer pangsanya masing-masing sebesar 29,86% dan 8,96%.

Secara umum, tren peningkatan penggunaan digitalisasi pembayaran digitalisasi di Provinsi Lampung juga tergambar dari terus membaiknya Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), yakni dari 4,83 di tahun 2019 menjadi sebesar 5,15 di tahun 2020. Peningkatan tersebut ditopang oleh seluruh komponennya, yakni baik akses infrastruktur, penggunaan, maupun keahliannya yang juga terus meningkat **(Grafik 5.22)**.

Grafik 5.21 Pangsa Transaksi UE Triwulan I 2022

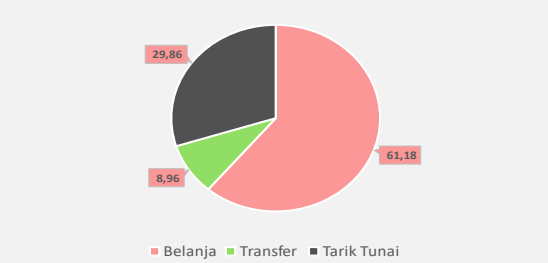

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.22 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi & Komunikasi

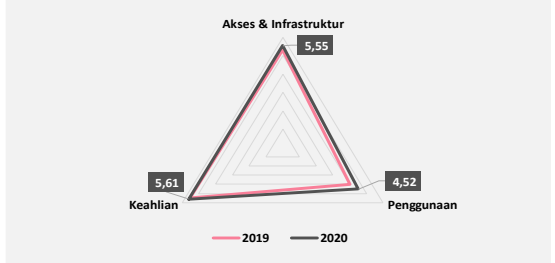

Sumber : Badan Pusat Statistik

5.4. Perkembangan Merchant & Pengguna QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

Pada tahun 2022, Bank Indonesia memiliki target berupa 15 juta pengguna baru QRIS. Hal tersebut sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang menggunakan jumlah *merchant* QRIS sebanyak 12 juta sebagai target. Selain untuk mendukung sistem pembayaran terus berevolusi, hal tersebut juga dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat khususnya dalam bertransaksi di tengah pandemi yang masih berlanjut sampai dengan saat ini. Dengan menggunakan QRIS, diharapkan hal tersebut dapat mengurangi risiko penularan virus melalui sentuhan tangan, terutama ketika masyarakat hendak melakukan transaksi pembayaran.

Data sampai dengan Maret 2022 terdapat 248.743 *merchant* QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan *merchant* QRIS yang ada di Sumatera **(Grafik 5.23)**. Adapun secara triwulanan, pertumbuhan *merchant* QRIS se-Sumatera tertinggi pada triwulan I 2022 dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan diikuti oleh Provinsi Jambi, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 16,42%, 15,08%, dan 14,19% (qtq) **(Grafik 5.24)**. Sementara itu, berdasarkan pangsanya, *merchant* QRIS di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-5 (11,03%) setelah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Sumatera Barat **(Grafik 5.25)**.

Grafik 5.23 Perkembangan Jumlah *Merchant* QRIS

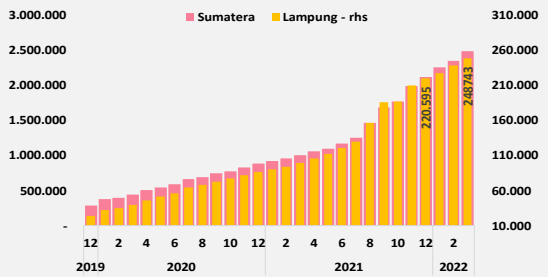

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.24 Pertumbuhan *Merchant* QRIS Triwulanan

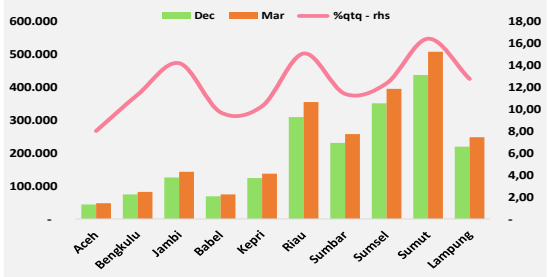

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.25 Pangsa *Merchant* QRIS di Sumatera

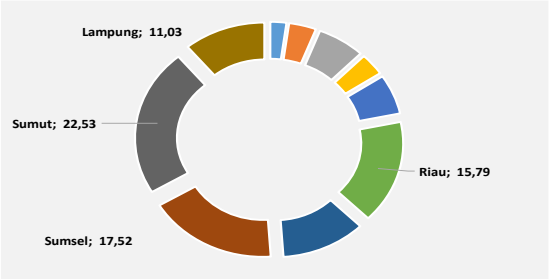

Sumber : Bank Indonesia

Selanjutnya, dalam rangka mendukung target 15 juta pengguna di akhir tahun 2022, secara total wilayah Sumatera memiliki sumbangan target sebesar 3.675.000 pengguna baru yang terbagi ke beberapa Provinsi. Adapun KPwBI Provinsi Lampung memiliki target sebanyak 511.000 pengguna baru pada akhir tahun 2022. Berdasarkan data realisasi, diketahui bahwa telah terdapat sebanyak total 232.227 pengguna QRIS per Maret 2022 **(Grafik 5.26)**. Adapun dari sisi penambahan, tercatat sebesar 103.272 pengguna baru QRIS pada Maret 2022 dibandingkan dengan Desember 2021 atau sebesar 20,21% dari target tahunan **(Grafik 5.27).**

Grafik 5.26 Perkembangan Pengguna QRIS

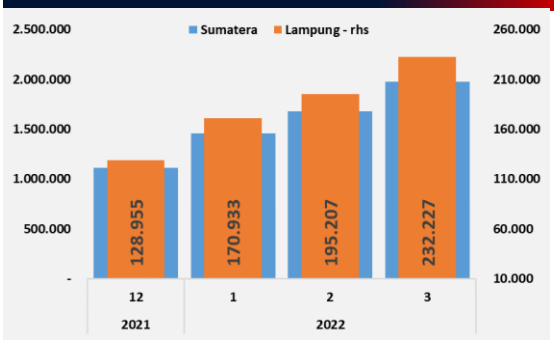

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.27 Target Pengguna QRIS

Sumber : Bank Indonesia

Jumlah tersebut tentunya masih akan terus bertambah, seiring dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh KPw BI Provinsi Lampung sebagai berikut:

- ✓ Pengenalan transformasi digital melalui sistem pembayaran non-tunai (QRIS) kepada seluruh masyarakat;
- ✓ Penggunaan transaksi non-tunai termasuk aplikasi QRIS pada berbagai sektor, seperti kawasan wisata, perkantoran, perdagangan, dan sektor lainnya. Hal tersebut ditargetkan di seluruh Kab/Kota terutama Kabupaten yang potensial, salah satunya yakni Pesawaran;
- ✓ Menggunakan pilar ekspansi, edukasi dan kampanye, serta *award* sebagai strategi dalam meningkatkan pengguna QRIS di tahun 2022.

5.5. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Kegiatan Penukaran Valuta Asing merupakan kegiatan jual beli uang kertas asing serta pembelian cek pelawat (*Traveller's Cheque*). Kegiatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh Perbankan maupun badan usaha bukan bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, atau biasa disebut dengan *money changer*. Guna mendukung terciptanya perdagangan valuta asing yang sehat dan aman bagi masyarakat, Bank Indonesia telah mengatur tata cara perizinan dan pengawasan Kegiatan Penukaran Valuta Asing yang dilakukan oleh Bukan Bank (KUPVA BB). Ketentuan tersebut tertuang pada Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/42/DKSP tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Selanjutnya, pada triwulan I 2022 transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp212,17 miliar. Nominal transaksi tersebut tercatat terkontraksi sebesar -2,25% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 58,55% (yoy) **(Grafik 5.27)**. Meningkatnya transaksi penukaran valuta asing tersebut ditengarai sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat pada triwulan I. Mobilitas masyarakat dari dan ke Indonesia cenderung semakin membaik di tengah upaya Pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran varian Omicron Covid-19.

Berdasarkan jenis transaksinya, pangsa transaksi jual (dilihat dari sisi KUPVA BB) pada periode laporan tercatat sebesar 49,6%, sedangkan transaksi beli sebesar 50,4%. Kecenderungan lebih banyaknya masyarakat yang melakukan pembelian valuta asing dibandingkan dengan yang jual terpantau sejalan dengan faktor cenderung terdepresiasinya nilai tukar Rupiah pada periode laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rata-rata kurs tengah pada triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp14.345, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang sebesar Rp14.267 **(Grafik 5.28)**.

Sementara itu, berdasarkan komposisi mata uangnya, dapat dilihat bahwa pangsa mata uang SGD dan USD masih mendominasi transaksi penukaran KUPVA BB di Provinsi Lampung, masing-masing sebesar 40,07% dan 27,28% **(Grafik 5.29)**. Adapun kondisi ini berbeda jika dibandingkan triwulan sebelumnya, dimana pangsa transaksi untuk mata uang SGD kini kembali memiliki pangsa terbesar, setelah sebelumnya didominasi oleh USD. Pangsa transaksi untuk mata uang USD terpantau kembali melambat dibandingkan triwulan lalu, yakni sebesar 27,28%. Adapun kondisi tersebut terpantau sejalan dengan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD yang saat ini sudah jauh lebih stabil bila dibandingkan dengan fluktuasi di tahun 2020. Hal ini tentunya didorong oleh kondisi perekonomian yang juga lebih terkendali dan terus menunjukkan perbaikan.

Grafik 5.28 Transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung

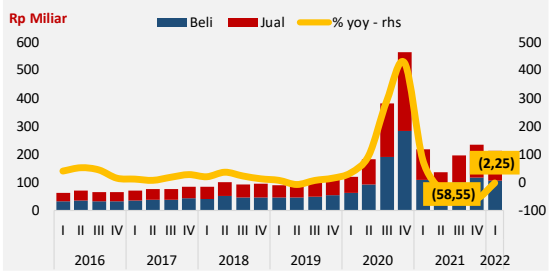

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.29 Transaksi KUPVA BB Per Jenis Mata Uang

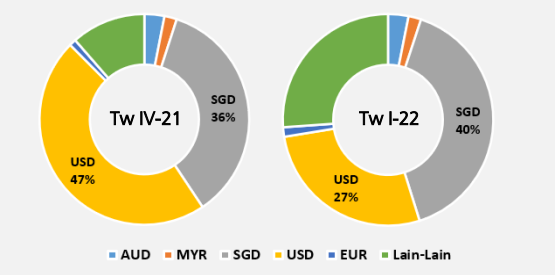

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.30 Pergerakan Kurs Nilai Tukar USD-IDR

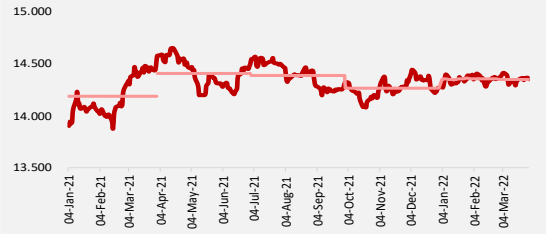

Sumber : Bank Indonesia

BAB 6. KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

- *Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2022 secara umum cenderung mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercermin dari kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,78% per Februari 2022. Kenaikan ini terutama didukung oleh bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,76 juta pekerja (7,87%), mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 0,96% (qtq) dibanding triwulan IV 2021 dan meningkat 2,96% dibanding triwulan I 2021 (yoy). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Februari 2022 tercatat terkontraksi sebesar 0,23% menjadi 4,31%. Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT nasional pada Februari 2022 yang sebesar 5,83%.*
- *Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan I 2022 mencapai 28,19. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 42,54%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 19,21%. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga triwulan I 2022 memiliki dampak langsung terhadap ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, dimana terdapat 340,6 ribu orang penduduk yang terdampak. Jika dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya (Agustus 2021), terdapat penurunan tenaga kerja yang terdampak sebesar 99,9 ribu orang atau sebesar 22,68%.*
- *Sementara itu, kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian relatif membaik. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 107,77; mengalami kenaikan dibanding triwulan IV 2021 (2,28).*
- *Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (11,67%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,71%, dan berada pada posisi tertinggi ke-4 di Sumatera. Secara nominal, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 1,01 juta jiwa pada September 2021.*

6.1 Ketenagakerjaan

Pada Februari 2020 dan Februari 2021 penghitungan indikator ketenagakerjaan masih menggunakan penimbang hasil proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS 2015). Sementara untuk Februari 2022 penghitungan indikator ketenagakerjaan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk interim yang merupakan proyeksi sementara hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Penimbang adalah faktor pengali sampel survei untuk menghasilkan estimasi populasi penduduk. Data yang disajikan saat ini adalah tiga titik periode semesteran yaitu Februari 2021, Agustus 2021, dan Februari 2022. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan perubahan dari dampak pandemi COVID-19 pada ketenagakerjaan.

Berdasarkan data terkini kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2022 secara umum membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini tercermin dari peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 0,78% poin dari 71,73% pada Februari 2021 menjadi 72,51% per Februari 2022 dan naik sebesar 3,16% poin dibandingkan Agustus 2021.

Kenaikan ini terutama didukung oleh bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,76 juta pekerja (7,87%). Hal tersebut mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 0,96% (qtq) dibanding triwulan IV 2021, dan meningkat 2,96% jika dibandingkan dengan triwulan I 2021 (yoy).

Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, peningkatan angkatan kerja pada Februari 2022 terlihat pada sektor perdagangan dengan penambahan persentase angkatan kerja sebesar 0,80% dan sektor penyediaan akomodasi dan makan/minum sebesar 0,80%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Agustus 2021, peningkatan angkatan kerja terbesar berada pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (0,74%); transportasi, informasi dan komunikasi (0,66%); serta jasa pendidikan (0,45%).

Aspek lain terkait TPAK adalah disparitas gender di pasar tenaga kerja. Apabila dibandingkan dengan Februari 2021, TPAK pria mengalami kenaikan sebesar 0,76% (dari 86,55% pada Februari 2021 menjadi 87,31% pada Februari 2022) dan TPAK Perempuan juga mengalami kenaikan sebesar 0,82% (dari 56,17% per Februari 2021 menjadi 56,99% per Februari 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat sedikit peningkatan disparitas gender di pasar tenaga kerja Provinsi Lampung.

Namun, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Februari 2022 tercatat terkontraksi sebesar -0,23% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu dari 4,54% pada Februari 2021 menjadi 4,31% pada periode laporan. Terkontraksinya angka TPT merupakan salah satu tolak ukur berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan akibat mulai dibukanya kembali kondisi perekonomian yang tidak stabil, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT nasional pada Februari 2022 yang sebesar 5,83%. Secara jumlah, angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung mencapai 214,3 ribu orang per Februari 2022, tercatat terkontraksi sebesar 0,23% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Patut dicermati bahwa angka pengangguran terbuka relatif lebih tinggi di kawasan perkotaan (6,57%) dibandingkan kawasan pedesaan (3,28%). Jika dibandingkan dengan Februari 2020, TPT perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,81% sedangkan TPT perdesaan turun sebesar 0,29%. Hal ini terjadi sebagai dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung di triwulan I 2022, yang telah menurunkan aktivitas industri dan menimbulkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, mulai maraknya alternatif berjualan secara *online* dan pembelajaran secara daring mampu menyerap tenaga kerja dari sektor perdagangan dan pendidikan serta

komunikasi dan informasi di pedesaan sehingga menyebabkan angka pengangguran terbuka di wilayah perdesaan mengalami penurunan.

Selain dilihat dari sisi faktor penawaran yang mengalami perbaikan, kondisi pasar tenaga kerja Provinsi Lampung juga perlu dilihat dari sisi perkembangan tingkat upah tenaga kerja. Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2022 tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp8.484,61 (0,35%) menjadi Rp2.440.486,18 dari tahun 2021 yang semula sebesra Rp2.432.002,00. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan tingkat UMP pada tahun 2022 sebesar 1,11% menjadi Rp2.770.794,00 dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.653.983,00 **(Grafik 6.1).**

Tabel 6. 1 Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung

Indikator	2018		2019		2020		2021		2022
	Feb	Aug	Feb	Aug	Feb	Aug	Feb	Aug	Feb
Penduduk Usia Kerja (15+) (ribu)	6,035.3	6,074.7	6,114.4	6,150.1	6,189.4	6,399.5	6,440.1	6,481.2	6,855.6
Angkatan Kerja (ribu)	4,395.9	4,232.1	4,408.1	4,249.4	4,433.6	4,489.7	4,619.7	4,495.0	4,971.1
Bekerja	4,205.5	4,060.4	4,233.6	4,077.9	4,243.8	4,280.1	4,409.8	4,284.3	4,756.8
Pengangguran	190.4	171.7	174.5	171.5	189.7	209.6	209.9	210.6	214.3
Bukan Angkatan Kerja (ribu)	1,639.4	1,842.6	1,706.4	1,900.7	1,755.8	1,909.9	1,820.5	1,986.2	1,884.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	72.84	69.67	72.09	69.09	71.6	70.16	71.73	69.35	72.51
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	4.33	4.06	3.96	4.03	4.3	4.67	4.54	4.7	4.31
Pekerja Tidak Penuh (ribu)	1,683.8	1,517.6	1,636.0	1,626.7	1,605.4	1,917.6	1,890.7	1,792.5	1,953.8
Setengah Penganggur	386.3	379.3	309.4	354.8	378.1	564.3	422.9	442.4	390.9
Pekerja Paruh Waktu	1,297.5	1,102.5	1,326.7	1,271.9	1,227.3	1,353.3	1,467.8	1,350.1	1,562.9

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.1 Perkembangan Upah Minimum Lampung

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja di periode laporan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 relatif mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah *full time worker* (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 3,17% (yoy) dibanding Februari 2021 atau tercatat sebesar 2.803,1 ribu orang (58,93%). Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja paruh waktu dan tidak memerlukan tambahan pekerjaan mengalami kontraksi sebesar -1,3% (yoy) atau tercatat sebesar 1.562,9 ribu orang (32,86%) dari total penduduk bekerja. Adapun pada kategori pekerja setengah penganggur dalam arti bekerja kurang dari 35 jam dan masih mengharapkan tambahan pekerjaan dan jam kerja, tercatat mengalami kontraksi sebesar -14,29% (yoy) atau sebesar 390,9 ribu orang (8,22%).

Berdasarkan status pekerjaan utama, belum terjadi perubahan yang signifikan pada kondisi tenaga kerja di Provinsi Lampung pada Februari 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dimana sektor informal terpantau masih mendominasi penyerapan

tenaga kerja dengan pangsa 71,24% (Grafik 6.2) jauh lebih tinggi dibanding sektor formal yang hanya mencapai 28,76% dari keseluruhan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Dibandingkan posisi Februari 2021 yang merupakan kondisi sebelum terjadi pandemi COVID-19, jumlah pekerja informal mengalami kontraksi yakni sebesar -0,72% (yoy) **(Grafik 6.2)**. Di sisi lain, pada sektor pekerja formal tercatat meningkat sebesar 0,72% (yoy), hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan lapangan kerja di sektor formal mulai berangsur membaik seiring dengan mulai membaiknya ekonomi di tengah berangsur meredanya pandemi COVID-19.

Grafik 6.2 Porsi Penduduk Bekerja

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6. 3 TPAK Menurut Tingkat Pendidikan

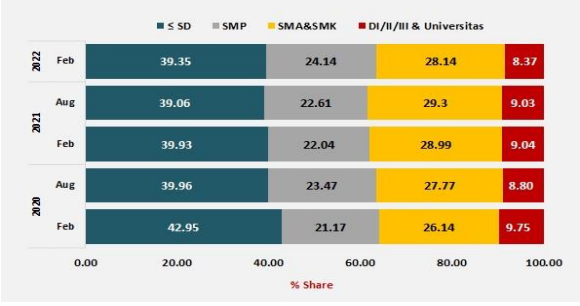

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Selaras dengan status pekerjaan utama tenaga kerja di Provinsi Lampung pada periode Februari 2021 yang masih didominasi oleh pekerjaan informal, ditinjau dari tingkat pendidikan tercatat bahwa sebagian besar pekerja berada pada kategori pendidikan rendah. Sebesar 1.760,7 ribu orang (39,35%) merupakan tamatan SD ke bawah dan 972,0 ribu orang (24,14%) merupakan tamatan SMP. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah atau tamatan SMA umum maupun SMK Kejuruan, tercatat masing-masing sebesar 866,7 ribu orang (18,22%) dan 471,9 ribu orang (9,92%). Adapun untuk level pendidikan tinggi atau DI/II/III dan Universitas tercatat sebesar 398,2 ribu orang (8,37%) **(Grafik 6.3)**.

Perlu menjadi perhatian bahwa pada periode laporan, TPT terbesar disumbang oleh kategori tamatan SMA Umum yang lebih tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,15%, sedangkan TPT yang paling rendah adalah tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah sebesar 2,19%. Hal ini seiring perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi COVID-19 sehingga faktor ekonomi keluarga menyebabkan seorang anak putus sekolah atau tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggiPemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi kerja dan kemandirian dalam membuka lapangan kerja, khususnya pada masa pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Program tersebut ditujukan untuk para pencari kerja, buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi dalam pengembangan perekonomian dalam skala mikro dan kecil.

Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan I 2022 mencapai 27,07%, sektor industri pengolahan dengan pangsa 17,95% dan sektor perdagangan dengan pangsa mencapai 13,47%. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 45,54% penduduk bekerja, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 19,21% **(Grafik 6.4).** Adapun sektor industri pengolahan berhasil menyerap 9,55% dari total penduduk bekerja.

Grafik 6.4 Share Tenaga Kerja

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.5 Hasil SKDU Realisasi Kegiatan Usaha Berdasarkan Sektor

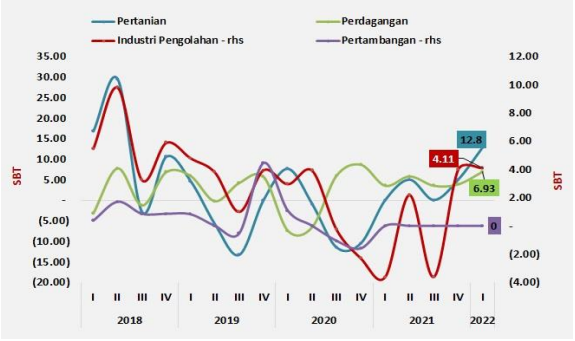

Sumber: SKDU KPw BI Prov. Lampung, diolah

Di sisi lain, berdasarkan data realisasi kegiatan usaha hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Provinsi Lampung triwulan II 2022 secara keseluruhan tercatat mengalami kenaikan, dari -2,45% SBT pada triwulan I 2021 menjadi 34,89% SBT pada triwulan I 2022. Secara sektoral, akselerasi pencapaian program vaksinasi turut mendukung kegiatan ekonomi LU Industri Pengolahan, terutama industri perdagangan dan pengolahan makanan sejalan dengan perkiraan berlanjutnya pemulihan sektor Hotel, Restoran, dan katering di samping perbaikan kegiatan ekonomi LU pertanian yang terus berlanjut. Hal ini tercermin pada realisasi kegiatan usaha seperti pada sektor Pertanian (12,8 SBT), Perdagangan Hotel dan Restoran (6,93% SBT); Industri Pengolahan (4,11% SBT), Administrasi Pemerintahan (3,26% SBT), Transportasi dan Pergudangan (2,81% SBT), Konstruksi (2,57% SBT), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1,16% SBT), dan Real Estate (0,69% SBT) **(Grafik 6.5).**

Tabel 6. 2 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung

No.	Lap. Pekerjaan Utama	2020				2021				2022		yoy (%)
		Feb-20 (ribuan orang)	Porsi	Ags-20 (ribuan orang)	Porsi	Feb-21 (ribuan orang)	Porsi	Ags-21 (ribuan orang)	Porsi	Feb-22 (ribuan orang)	Porsi	
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, & Perikanan; dan Penggalian	2,048.9	47.00	1,915.8	44.76	2,019.90	45.81	1,843.5	43.27	2,010.79	42.54	(0.45)
2	Pertambangan dan Industri Pengolahan	401.9	9.22	392.6	9.17	390.20	8.85	397.9	9.34	454.28	9.55	16.42
3	Pengadaan Listrik, Gas, & Air Minum, Pengelolaan Sampah	22.7	0.52	14.2	0.33	21.50	0.49	17.3	0.41	19.03	0.40	(11.50)
4	Konstruksi	195.9	4.49	241.0	5.63	216.90	4.92	251.0	5.89	207.40	4.36	(4.38)
5	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	800.8	18.37	807.3	18.86	811.80	18.41	829.3	19.47	913.79	19.21	12.56
6	Transportasi, Pergudangan, & Komunikasi	147.3	3.38	161.8	3.78	165.80	3.76	165.5	3.88	215.01	4.52	29.68
7	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	163.9	3.84	168.8	3.94	198.00	4.49	194.8	4.57	251.64	5.29	27.09
8	Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate; Jasa Perusahaan	57.6	1.36	61.5	1.44	47.30	1.07	50.5	1.19	65.17	1.37	37.78
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	144.6	3.41	123.4	2.88	133.10	3.02	132.3	3.11	151.27	3.18	13.65
10	Jasa Pendidikan	181.6	4.27	180.6	4.22	188.00	4.26	185.3	4.35	227.38	4.78	20.94
11	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51.6	1.22	45.5	1.06	58.70	1.33	61.5	1.44	62.79	1.32	6.97
12	Jasa Lainnya	124.4	2.92	145.1	3.39	158.50	3.59	131.3	3.08	166.49	3.50	5.04

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Berdasarkan sektor lapangan pekerjaan, persentase penduduk bekerja di Lapangan Usaha (LU) Jasa Keuangan, Asuransi Real Estate dan Jasa Perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 37,78% dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya (47,30%). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pada LU tersebut yang mengalami kenaikan sebesar 18,93% (yoy). Industri Transportasi dan Pergudangan juga mencatatkan pertumbuhan positif baik dari segi tenaga kerja (29,68%) maupun dari pertumbuhan pada LU Transportasi (17,03%). Di sisi lain, jumlah penduduk bekerja di LU Konstruksi mengalami penurunan sebesar -4,38% (yoy), seiring dengan tren pertumbuhan pada LU tersebut yang juga mengalami kontraksi (-5,04%; yoy) di triwulan I 2021. Adapun LU lain yang juga mencatatkan penurunan serapan pekerja adalah LU pengadaan listrik dan gas (-11,50%); serta LU Pertanian (-0,45%) **(Tabel 6.2).**

Pandemi COVID-19 dengan varian baru Omicron masih berlangsung di triwulan I 2022 memiliki dampak langsung terhadap ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, dimana terdapat 340,6 ribu orang penduduk yang terdampak. Jika dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya (Agustus 2021), terdapat penurunan tenaga kerja yang terdampak sebesar 99,9 ribu orang atau sebesar 22,68%. Dari keseluruhan tenaga kerja yang terdampak, terdapat 4,97% (340,6 ribu orang) Penduduk Usia Kerja (PUK) yang terdampak langsung akibat pandemi COVID-19. Selain itu, dari total PUK yang terdampak COVID-19, dimana sebesar 23,9 ribu orang menjadi pengangguran pada triwulan I 2022 dan sebesar 263,6 ribu orang (77,4%) mengalami pengurangan jam kerja. Meskipun begitu, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan atau di-PHK mengalami penurunan signifikan (-40,10%) jika dibandingkan dengan kondisi pada periode Agustus 2021. Tercatat jumlah pengangguran menurun menjadi sebesar 16,0 ribu orang di triwulan I 2022 dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang sebesar 39,9 ribu orang. Hal ini sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KPw BI Provinsi Lampung dimana realisasi penggunaan tenaga kerja tercatat mengalami perbaikan pada periode triwulan I 2022 yakni sebesar 4,63% Saldo Bersih Tertimbang (SBT), dibanding triwulan IV 2021 yang sebesar 1,96% SBT.

Tabel 6. 3 Penduduk yang terdampak COVID-19 di Provinsi Lampung Triwulan I - 2022

Komponen	Feb-21	Aug-21	Feb-22	Δ Feb 2021 - Feb 2022		Δ Aug 2021 - Feb 2022	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	%	ribu orang	%
Pengangguran Karena Covid-19	21.40	39.90	23.90	2.50	11.68	(16.00)	(40.10)
Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	11.10	15.70	18.90	7.80	70.27	3.20	20.38
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	27.50	33.40	34.10	6.60	24.00	0.70	2.10
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	280.30	351.50	263.60	(16.70)	(5.96)	(87.90)	(25.01)
Total	340.30	440.50	340.60	0.30	0.09	(99.90)	(22.68)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	6,440.10	6,481.20	6,855.56	415.46	6.45	374.36	5.78
Persentase terhadap PUK	5.28	6.80	4.97	(0.32)	(5.98)	(1.83)	(26.90)

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung untuk menekan **laju jumlah tenaga kerja menganggur sebagai dampak dari pandemi COVID-19 selama triwulan I 2022, antara lain melalui penyelenggaraan berbagai program** salah satunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas calon tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja, bursa tenaga kerja yang ada di perguruan tinggi dan SMK di Provinsi Lampung serta kegiatan magang dalam negeri untuk peningkatan pelayanan dan keterampilan calon pekerja migran. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan stakeholder seperti Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), APINDO, serta perguruan tinggi di Provinsi Lampung.

6.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 107,77; mengalami kenaikan dibanding triwulan IV 2021 yang sebesar 105,36. Hal ini didorong oleh adanya peningkatan pada indeks yang diterima petani (It) sebesar 2,59% (qtq) dan indeks yang dibayar petani (Ib) sebesar 1,69% (qtq) **(Grafik 6.6).** Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan NTP pada triwulan I 2022 dibanding triwulan sebelumnya, maka tingkat kemampuan/ daya beli petani di Provinsi Lampung semakin kuat; sehingga dinilai kesejahteraan petani secara umum pada triwulan I 2022 mengalami perbaikan.

Kemudian secara sektoral, seluruh sektor mengalami peningkatan NTP pada triwulan I 2022, adapun yang tertinggi terjadi pada sektor perkebunan rakyat sebesar 19,70% (qtq) dari 95,02 pada triwulan IV 2021 menjadi 96,79 pada periode laporan **(Grafik 6.7).** Secara lebih rinci, indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) di Provinsi Lampung pada triwulan laporan tercatat mengalami peningkatan

menjadi sebesar 118,74 dari 114,16 pada triwulan sebelumnya **(Grafik 6.8).** Sementara itu, pada triwulan I 2022 indeks harga yang diterima petani (It) di Provinsi Lampung juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 1,69% (qtq) menjadi sebesar 110,17 dari 108,34 pada triwulan sebelumnya. **(Grafik 6.9)**

Grafik 6.6 NTP Provinsi Lampung dan Komponen Penyusunnya

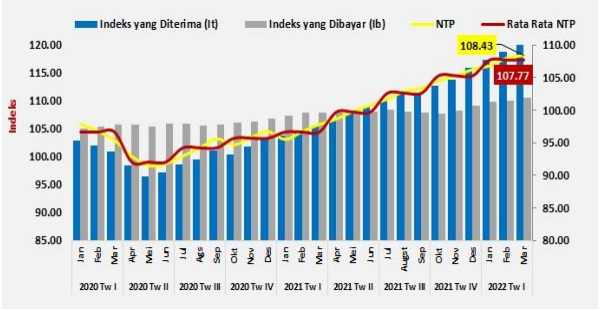

Grafik 6.7 NTP Per Sub Sektor

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.8 Indeks yang Dibayar per Sub Sektor

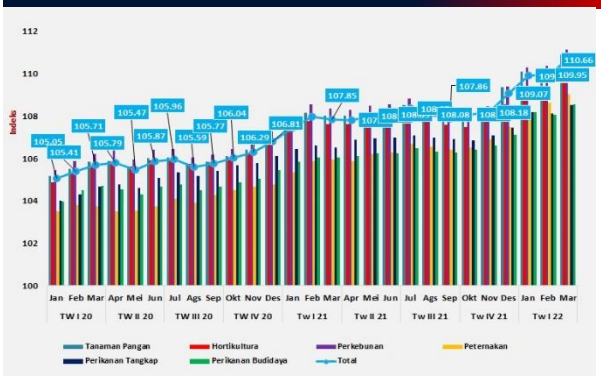

Grafik 6.9 Indeks yang Diterima per Sub Sektor

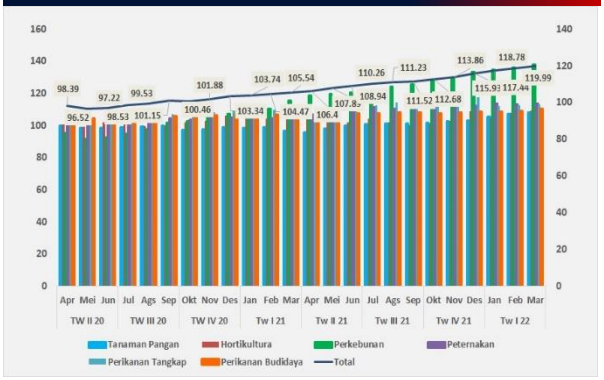

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.10 NTP Kota-Kota di Sumatera

Grafik 6.11 Pertumbuhan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) per Subsektor

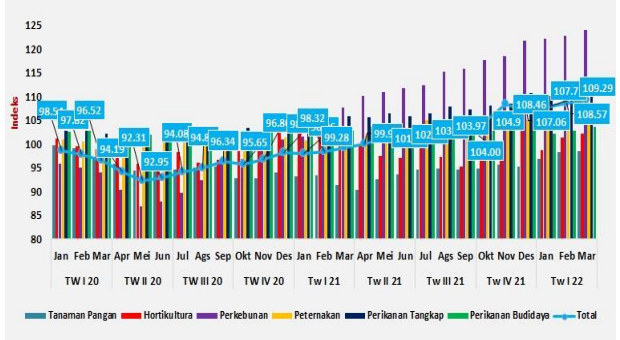

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Sejalan dengan hal tersebut, bila dibandingkan dengan petani provinsi lain di Sumatera, NTP Provinsi Lampung yang sebesar 108,43 menempati posisi 3 terbawah dari 10 Provinsi dan berada di bawah Nasional yang sebesar 109,29 (Grafik 6.10). Sementara dilihat dari NTUP yang mencerminkan pengeluaran riil petani untuk usaha taninya, tercatat NTUP Provinsi Lampung

mengalami peningkatan sebesar 0,97% (mtm), dengan peningkatan terbesar terjadi pada sektor tanaman pangan dan perkebunan rakyat masing-masing sebesar 1,11% (mtm) dan 0,65% (mtm) **(Grafik 6.11).**

6.3 Kemiskinan

Terdapat penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 7,53% (yoy), dari 1,08 juta jiwa pada periode Maret 2021 menjadi 1,01 juta jiwa pada September 2021. Dari sisi komposisinya, hingga September 2021 penduduk miskin di Provinsi Lampung utamanya berada di daerah pedesaan dimana sebagian besar berprofesi sebagai petani. Penduduk miskin yang terkonsentrasi di wilayah pedesaan tercatat sebesar 76,52%, sedangkan sisanya sebesar 23,48% berada di daerah perkotaan. **Dibandingkan dengan Nasional (9,71%), persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi yakni sebesar 11,67% (Grafik 6.12).** Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 jika dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Sumatera, di bawah Provinsi Aceh (15,33%), Provinsi Bengkulu (14,43%) dan Provinsi Sumatera Selatan (12,79%).

Grafik 6.12 Persentase Penduduk Miskin di Sumatera dibandingkan Nasional

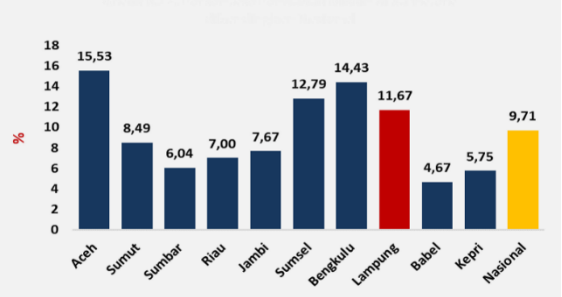

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.13 Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Pedesaan di Lampung

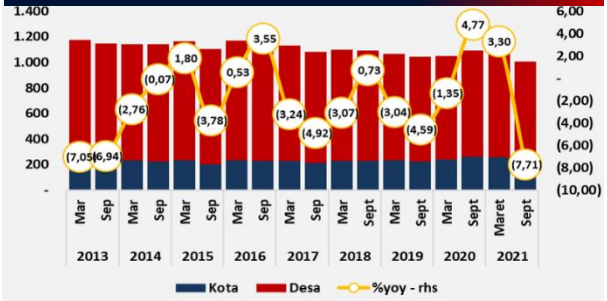

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Jumlah penduduk miskin perkotaan di Provinsi Lampung pada September 2021 mencapai 236,48 ribu jiwa, atau mengalami penurunan sebesar 8,79% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (259,28 ribu jiwa). Di wilayah pedesaan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 tercatat sebanyak 770,54 ribu jiwa atau menurun sebesar 7,37 (yoy) dibandingkan posisi data September 2020 yang mencapai 831,86 ribu jiwa **(Grafik 6.13).**

Selain dilihat dari faktor penghasilan, tingkat kemiskinan juga ditentukan oleh angka garis kemiskinan (GK). **Dilihat dari pergerakan Garis Kemiskinan pada periode September 2020 sampai dengan September 2021, GK Provinsi Lampung tercatat meningkat 7,68% (yoy) menjadi sebesar Rp469.629,- per kapita/bulan pada September 2021 dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar Rp457.495,- per kapita/bulan.** Angka GK dipengaruhi oleh komponennya yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Pergerakan harga kelompok makanan sebagai komponen utama GKM (75,29%) dengan beras dan rokok kretek filter sebagai komoditas kelompok makanan yang memiliki sumbangan terbesar terhadap GK di kota maupun desa. Hal ini berarti bahwa kenaikan harga bahan makanan menjadi salah satu penyebab kenaikan garis kemiskinan di Provinsi Lampung.

Di perkotaan dan di pedesaan, beras memberikan sumbangan terbesar terhadap GKM, yaitu 19,24% di perkotaan dan 28,45% di pedesaan. Selain kelompok makanan, komoditi non-makanan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap GKM adalah perumahan, bensin dan listrik, sehingga perkembangan harga komoditas-komoditas tersebut juga perlu terus dicermati **(Tabel 6.4).**

Tabel 6. 4 Daftar Komoditi yang Memberi Pengaruh pada GK September 2021

Sep-21	Kota	Komoditi	Desa
	% thd. GKM		% thd. GKM
Makanan	**72,22**	**Makanan**	**76,48**
Beras	19,24	Beras	28,45
Rokok Kretek Filter	11,21	Rokok Kretek Filter	10,83
Telur Ayam Ras	4,75	Telur Ayam Ras	4.53
Tempe	2,70	Gula Pasir	2,99
Gula Pasir	2,36	Tempe	2,52
Mie Instan	2,33	Mie Instan	2,31
Bawang Merah	2,22	Bawang Merah	2,24
Kopi Bubuk & Kopi Instan (sachet)	2,21	Cabe Rawit	2,16
Susu Kental Manis	2,18	Roti	2,15
Roti	1,75	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,07
Bukan Makanan	**27,78**	**Bukan Makanan**	**23,52**
Perumahan	8,67	Perumahan	6,71
Bensin	3,54	Bensin	4,50
Listrik	3,39	Listrik	2,24
Pendidikan	1,87	Pendidikan	1,33
Perlengkapan Mandi	1,54	Perlengkapan Mandi	0,93
Perawatan Kulit, Muka, Kuku, Rambut	0,99	Pakaian jadi anak-anak	0,88

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Permasalahan kemiskinan juga dapat diukur dari seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan serta keragaman tingkat pengeluaran penduduk miskin. Indikator untuk pengukuran keduanya disebut dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). **Nilai P1 Provinsi Lampung dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan hingga -0,26 poin, yakni dari 2,11 pada September 2020 menjadi 1,85 pada September 2021 (Grafik 6.14). Sementara itu, nilai P2 Provinsi Lampung dalam satu tahun terakhir juga turut mengalami penurunan sebesar 0,19 poin, yakni dari 0,57 pada September 2020 menjadi 0,38 pada September 2021 (Grafik 6.15).**

Grafik 6.14 Indeks Kedalaman Kemiskinan

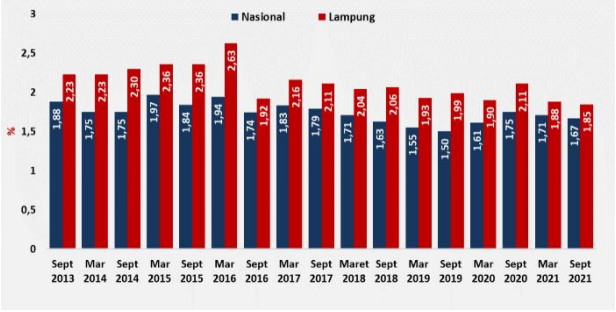

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.15 Indeks Keparahan Kemiskinan

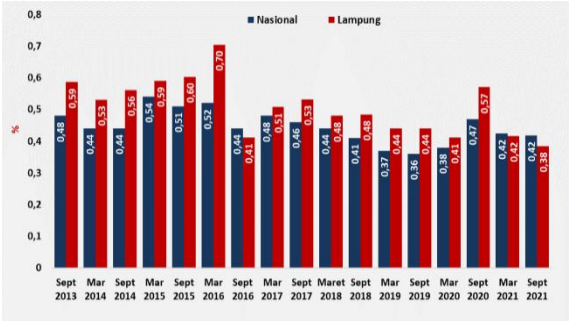

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.16 Koefisien Gini Lampung dan Nasional

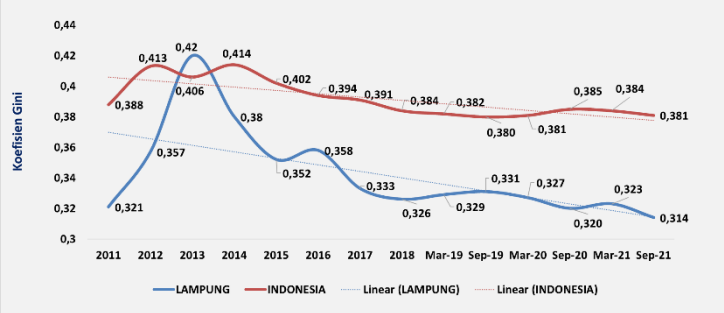

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Sementara itu, Koefisien Gini tercatat menurun sebesar 0,006 poin, dari indeks 0,320 pada September 2020 menjadi sebesar 0,314 pada September 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan ketimpangan pendapatan pada masyarakat Provinsi Lampung. Hal ini selaras dengan Koefisien Gini Nasional yang tercatat mengalami penurunan sebesar 0,004 poin pada September 2021 (0,381) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (0,385) **(Grafik 6.16).**

Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan program Desa Berjaya yang merupakan program bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi, Kabupaten, Desa di Lingkungan Provinsi Lampung dan sumber lainnya. Program Desa Berjaya sebagai upaya untuk mengentaskan desa-desa tertinggal dengan menitikberatkan pada penanganan masalah-masalah kemiskinan, ketertinggalan dan potensi yang ada melalui peran aktif seluruh *stakeholder* provinsi dan kabupaten menuju desa-desa Lampung yang Berjaya. Pada akhir 2019, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan 19 desa sangat tertinggal sebagai *locus* pengentasan kemiskinan Program Desa Berjaya Tahun 2019. Provinsi Lampung memiliki 2.435 desa yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), terdapat 19 Desa yang masih dalam kategori sangat tertinggal. Setiap desa yang telah ditetapkan sebagai *locus* Program Desa Berjaya akan ditangani secara spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan rekomendasi dari tim yang telah melakukan observasi di lapangan. Akan dilakukan pemetaan permasalahan menjadi dasar bagi masing-masing OPD untuk berkoordinasi menangani permasalahan sesuai dengan kekhususan setiap OPD yang disesuaikan dengan kebutuhan desa. Masing-masing OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan melakukan penanganan mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial kemasyarakatan hingga pengembangan SDM. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperhatikan pengembangan kawasan pedesaan dan melakukan inovasi-inovasi yang dibutuhkan, demi tercapainya percepatan pembangunan wilayah pedesaan untuk pengentasan kemiskinan.

Di tahun 2021, Pemerintah Provinsi Lampung juga meluncurkan program *Smart Village* yang merupakan tindak lanjut dalam perwujudan Desa Berjaya Lampung. Dengan mengusung konsep digitalisasi pedesaan yang terintegrasi pada semua lini, diharapkan program ini dapat memberikan kemudahan dan integrasi data yang sehari-hari dilakukan masyarakat desa, seperti layanan administrasi, pajak, transaksi perbankan, Program Kartu Petani Berjaya melalui integrasi data KPB, dan lain sebagainya. Program *Smart Village* akan membuka peluang kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam berbagai hal. Terdapat empat desa yang dijadikan sebagai desa percontohan (*prototype*) yakni Desa Hanura (Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran), Desa Podomoro (Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu), Desa Sribhawono (Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur), dan Desa Cintamulya (Kec. Candipura, Kab. Lampung Selatan). Program ini juga termasuk upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemanfaatan teknologi, khususnya untuk penanganan desa *blank spot* jaringan dan infrastruktur internet serta mendorong perkembangan BUMDes dan UMKM di pedesaan.

Dana bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Pusat berupa Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2022 masih terus berlanjut di Provinsi Lampung. Untuk periode triwulan I 2022, di Provinsi Lampung telah dilakukan realisasi penyaluran bansos PKH kepada 427.150 keluarga penerima manfaat (KPM) atau secara total nominal sebesar Rp307,9 miliar, dan telah terserap sebesar 99,99% dari total penyaluran. Bantuan tersebut telah disalurkan kepada 15 Kabupaten/Kota secara bertahap, dengan persentase penyaluran rata-rata untuk Provinsi Lampung sebesar 100% dan persentase penyerapan sebesar 94,97% **(Tabel 6.5).** PKH merupakan salah satu program untuk menurunkan angka kemiskinan, khususnya di masa pandemi Covid-19, yang diberikan kepada keluarga kurang mampu. Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk keluarga kurang mampu, dengan besaran Rp900 ribu hingga Rp3 juta per tahun.

Tabel 6.5 Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I 2022

PROVINSI - KOTA/KAB	Penyaluran (Jml KPM)	Penyaluran Jan-Mar 2022 (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)
LAMPUNG	**427,150**	**Rp 307,905,650,000**	**99.999%**	**99.999%**	**405,671**	94.97%
KOTA BANDAR LAMPUNG	33,800	Rp 25,261,350,000	100.00%	100.00%	31,532	93.29%
KOTA METRO	5,032	Rp 3,540,450,000	100.00%	100.00%	4,927	97.91%
LAMPUNG BARAT	16,059	Rp 11,754,150,000	100.00%	100.00%	15,344	95.55%
LAMPUNG SELATAN	52,790	Rp 37,223,650,000	99.998%	99.998%	50,786	96.20%
LAMPUNG TENGAH	63,168	Rp 43,244,650,000	99.997%	99.996%	60,214	95.32%
LAMPUNG TIMUR	53,869	Rp 36,927,750,000	100.00%	100.00%	52,589	97.62%
LAMPUNG UTARA	42,124	Rp 31,588,775,000	100.00%	100.00%	41,173	97.74%
MESUJI	11,266	Rp 7,688,450,000	100.00%	100.00%	10,251	90.99%
PESAWARAN	28,505	Rp 21,047,850,000	100.00%	100.00%	26,203	91.92%
PESISIR BARAT	11,294	Rp 9,140,875,000	100.00%	100.00%	10,949	96.95%
PRINGSEWU	20,557	Rp 14,583,925,000	100.00%	100.00%	19,173	93.27%
TANGGAMUS	37,285	Rp 28,665,875,000	100.00%	100.00%	35,788	95.98%
TULANG BAWANG BARAT	11,451	Rp 8,004,200,000	100.00%	100.00%	9,582	83.68%
TULANGBAWANG	14,977	Rp 10,422,800,000	100.00%	100.00%	13,938	93.06%
WAY KANAN	24,973	Rp 18,810,900,000	100.00%	100.00%	23,222	92.99%

Sumber: HIMBARA, diolah

Selama masa pandemi juga terdapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) reguler bagi keluarga yang belum menerima PKH, bantuan sembako, dan Kartu Prakerja sebesar Rp600 ribu/bulan selama 3 bulan yang bersumber dari Dana Desa, serta BLT dana desa bagi keluarga yang belum menerima PKH, bantuan sembako, dan Kartu Prakerja. Bantuan khusus dari alokasi Dana Desa ini ditujukan kepada keluarga miskin/prasejahtera, belum terdata di program-program bantuan sosial pemerintah dan memiliki anggota keluarga yang rentan sakit atau memiliki penyakit kronis.

Selanjutnya, pemerintah memiliki program bantuan sosial Sembako, yang realisasinya per Maret 2022 mencapai 691.955 KPM atau 98,04% dengan total nominal sebesar Rp138,39 miliar (Tabel 6.6). Bantuan periode Januari sampai dengan Maret 2022 disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan dilakukan sekaligus pada bulan Maret 2022. Adapun untuk kategori penyerapan, rata-rata telah diserap sebesar 100% oleh KPM penerima bantuan **(Tabel 6.7)**.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa di triwulan I 2022, bantuan program Sembako telah disalurkan kepada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan rata-rata sebesar 98,04%, dengan kabupaten penerima bansos terbanyak adalah Kabupaten Pesawaran yang tercatat memiliki 46.201 KPM, Kabupaten Tanggamus sebanyak 66.093 KPM, Kabupaten Pringsewu sebanyak 32.485 KPM, dan Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 93.406 KPM. Berdasarkan data per Maret 2022, total nominal yang telah diserap oleh penerima bantuan adalah sebesar Rp10,84 miliar atau sebesar 98,27%.

Tabel 6.6 Penyaluran Program Sembako Posisi Triwulan I 2022

Wilayah	Bank Penyalur	SP2D Kemensos						Penyaluran											
		Tahap Januari 2022		Tahap Februari 2022		Tahap Maret 2022		Tahap Januari 2022				Tahap Februari 2022				Tahap Maret 2022			
		Jumlah KPM	Nominal Rp	Jumlah KPM	Nominal Rp	Jumlah KPM	Nominal Rp	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LAMPUNG	PT Pos	705,807	141,161,400,000	705,807	141,161,400,000	705,807	141,161,400,000	691,955	98.04%	138,391,000,000	98.04%	691,955	98.0%	138,391,000,000	98.04%	691,955	98.04%	138,391,000,000	98.04%
KOTA BANDAR LAMPUNG	PT Pos	55,172	11,034,400,000	55,172	11,034,400,000	55,172	11,034,400,000	54,220	98.27%	10,844,000,000	98.27%	54,220	98.3%	10,844,000,000	98.27%	54,220	98.27%	10,844,000,000	98.27%
KOTA METRO	PT Pos	8,417	1,683,400,000	8,417	1,683,400,000	8,417	1,683,400,000	8,109	96.34%	1,621,800,000	96.34%	8,109	96.3%	1,621,800,000	96.34%	8,109	96.34%	1,621,800,000	96.34%
LAMPUNG BARAT	PT Pos	26,578	5,315,600,000	26,578	5,315,600,000	26,578	5,315,600,000	25,954	97.65%	5,190,800,000	97.65%	25,954	97.7%	5,190,800,000	97.65%	25,954	97.65%	5,190,800,000	97.65%
LAMPUNG SELATAN	PT Pos	94,813	18,962,600,000	94,813	18,962,600,000	94,813	18,962,600,000	93,406	98.52%	18,681,200,000	98.52%	93,406	98.5%	18,681,200,000	98.52%	93,406	98.52%	18,681,200,000	98.52%
LAMPUNG TENGAH	PT Pos	92,510	18,502,000,000	92,510	18,502,000,000	92,510	18,502,000,000	90,098	97.39%	18,019,600,000	97.39%	90,098	97.4%	18,019,600,000	97.39%	90,098	97.39%	18,019,600,000	97.39%
LAMPUNG TIMUR	PT Pos	85,446	17,089,200,000	85,446	17,089,200,000	85,446	17,089,200,000	83,845	98.13%	16,769,000,000	98.13%	83,845	98.1%	16,769,000,000	98.13%	83,845	98.13%	16,769,000,000	98.13%
LAMPUNG UTARA	PT Pos	65,558	13,111,600,000	65,558	13,111,600,000	65,558	13,111,600,000	64,091	97.76%	12,818,200,000	97.76%	64,091	97.8%	12,818,200,000	97.76%	64,091	97.76%	12,818,200,000	97.76%
MESUJI	PT Pos	19,666	3,933,200,000	19,666	3,933,200,000	19,666	3,933,200,000	19,276	98.02%	3,855,200,000	98.02%	19,276	98.0%	3,855,200,000	98.02%	19,276	98.02%	3,855,200,000	98.02%
PESAWARAN	PT Pos	46,674	9,334,800,000	46,674	9,334,800,000	46,674	9,334,800,000	46,201	98.99%	9,240,200,000	98.99%	46,201	99.0%	9,240,200,000	98.99%	46,201	98.99%	9,240,200,000	98.99%
PESISIR BARAT	PT Pos	17,621	3,524,200,000	17,621	3,524,200,000	17,621	3,524,200,000	17,215	97.70%	3,443,000,000	97.70%	17,215	97.7%	3,443,000,000	97.70%	17,215	97.70%	3,443,000,000	97.70%
PRINGSEWU	PT Pos	32,944	6,588,800,000	32,944	6,588,800,000	32,944	6,588,800,000	32,485	98.61%	6,497,000,000	98.61%	32,485	98.6%	6,497,000,000	98.61%	32,485	98.61%	6,497,000,000	98.61%
TANGGAMUS	PT Pos	67,013	13,402,600,000	67,013	13,402,600,000	67,013	13,402,600,000	66,093	98.63%	13,218,600,000	98.63%	66,093	98.6%	13,218,600,000	98.63%	66,093	98.63%	13,218,600,000	98.63%
TULANG BAWANG	PT Pos	28,905	5,781,000,000	28,905	5,781,000,000	28,905	5,781,000,000	27,809	96.21%	5,561,800,000	96.21%	27,809	96.2%	5,561,800,000	96.21%	27,809	96.21%	5,561,800,000	96.21%
TULANG BAWANG BARAT	PT Pos	19,544	3,908,800,000	19,544	3,908,800,000	19,544	3,908,800,000	18,915	96.78%	3,783,000,000	96.78%	18,915	96.8%	3,783,000,000	96.78%	18,915	96.78%	3,783,000,000	96.78%
WAY KANAN	PT Pos	44,946	8,989,200,000	44,946	8,989,200,000	44,946	8,989,200,000	44,238	98.42%	8,847,600,000	98.42%	44,238	98.4%	8,847,600,000	98.42%	44,238	98.42%	8,847,600,000	98.42%

Sumber: HIMBARA, diolah

Tabel 6.7 Penyerapan Program Sembako Posisi Triwulan I 2022

Wilayah	Bank Penyalur	Penyerapan											
		Tahap Januari 2022				Tahap Februari 2022				Tahap Maret 2022			
		Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
LAMPUNG	PT Pos	**691,955**	**100.0%**	**138,391,000,000**	**100.0%**	**691,955**	**100.0%**	**138,391,000,000**	**100.0%**	**691,955**	**100.0%**	**138,391,000,000**	**100.0%**
KOTA BANDAR LAMPUNG	PT Pos	54,220	100.0%	10,844,000,000	100.0%	54,220	100.0%	10,844,000,000	100.0%	54,220	100.0%	10,844,000,000	100.0%
KOTA METRO	PT Pos	8,109	100.0%	1,621,800,000	100.0%	8,109	100.0%	1,621,800,000	100.0%	8,109	100.0%	1,621,800,000	100.0%
LAMPUNG BARAT	PT Pos	25,954	100.0%	5,190,800,000	100.0%	25,954	100.0%	5,190,800,000	100.0%	25,954	100.0%	5,190,800,000	100.0%
LAMPUNG SELATAN	PT Pos	93,406	100.0%	18,681,200,000	100.0%	93,406	100.0%	18,681,200,000	100.0%	93,406	100.0%	18,681,200,000	100.0%
LAMPUNG TENGAH	PT Pos	90,098	100.0%	18,019,600,000	100.0%	90,098	100.0%	18,019,600,000	100.0%	90,098	100.0%	18,019,600,000	100.0%
LAMPUNG TIMUR	PT Pos	83,845	100.0%	16,769,000,000	100.0%	83,845	100.0%	16,769,000,000	100.0%	83,845	100.0%	16,769,000,000	100.0%
LAMPUNG UTARA	PT Pos	64,091	100.0%	12,818,200,000	100.0%	64,091	100.0%	12,818,200,000	100.0%	64,091	100.0%	12,818,200,000	100.0%
MESUJI	PT Pos	19,276	100.0%	3,855,200,000	100.0%	19,276	100.0%	3,855,200,000	100.0%	19,276	100.0%	3,855,200,000	100.0%
PESAWARAN	PT Pos	46,201	100.0%	9,240,200,000	100.0%	46,201	100.0%	9,240,200,000	100.0%	46,201	100.0%	9,240,200,000	100.0%
PESISIR BARAT	PT Pos	17,215	100.0%	3,443,000,000	100.0%	17,215	100.0%	3,443,000,000	100.0%	17,215	100.0%	3,443,000,000	100.0%
PRINGSEWU	PT Pos	32,485	100.0%	6,497,000,000	100.0%	32,485	100.0%	6,497,000,000	100.0%	32,485	100.0%	6,497,000,000	100.0%
TANGGAMUS	PT Pos	66,093	100.0%	13,218,600,000	100.0%	66,093	100.0%	13,218,600,000	100.0%	66,093	100.0%	13,218,600,000	100.0%
TULANG BAWANG	PT Pos	27,809	100.0%	5,561,800,000	100.0%	27,809	100.0%	5,561,800,000	100.0%	27,809	100.0%	5,561,800,000	100.0%
TULANG BAWANG BARAT	PT Pos	18,915	100.0%	3,783,000,000	100.0%	18,915	100.0%	3,783,000,000	100.0%	18,915	100.0%	3,783,000,000	100.0%
WAY KANAN	PT Pos	44,238	100.0%	8,847,600,000	100.0%	44,238	100.0%	8,847,600,000	100.0%	44,238	100.0%	8,847,600,000	100.0%

Sumber: HIMBARA, diolah

BAB 7. PROSPEK PEREKONOMIAN

- *Pada tahun 2022, pemulihan ekonomi Provinsi Lampung diperkirakan terus berlanjut, yakni pada kisaran 4,0%–4,8%, meski lebih rendah jika dibandingkan prakiraan sebelumnya (4,5%–5,3%). Kinerja perekonomian ke depan akan didorong oleh daya beli masyarakat yang terus mengalami perbaikan dan mendorong peningkatan komponen permintaan domestik seiring dengan terkendalinya penyebaran COVID-19 varian Omicron. Hal tersebut didukung oleh akselerasi program vaksinasi yang terus berlanjut, tercermin dari capaian target Provinsi Lampung untuk vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan booster dosis 3 yang masing-masing tercatat telah mencapai 90,58%, 72,26%, dan 12,12% pada 27 Mei 2022, dengan realisasi penerima tertinggi pada kelompok produktif, yaitu SDM kesehatan, Petugas Publik, dan Masyarakat Umum. Meski demikian, revisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2022 disebabkan oleh pertumbuhan produksi Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Industri Pengolahan yang diperkirakan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.*
- *Prospek inflasi pada tahun 2022 diperkirakan tetap terjaga pada kisaran target 3,0%±1% (yoy), meski dengan tendensi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 sebagai dampak dari peningkatan eskalasi tensi geopolitik Rusia dan Ukraina. Pendorong tekanan inflasi di tahun 2022 diantaranya bersumber dari kelompok Volatile Food, yaitu tren harga pupuk, gandum, kedelai, dan jagung dunia diperkirakan akan pada level yang tinggi, sehingga berpotensi mendorong tekanan inflasi dari sisi supply. Kelompok Administered Prices diprakirakan akan turut meningkat dibandingkan 2021 didorong oleh kenaikan tarif cukai rokok serta peningkatan harga BBM dan LPG seiring dengan kenaikan harga energi dunia. Peningkatan permintaan yang berasal dari perbaikan demand masyarakat seiring dengan optimisme menurunnya penyebaran COVID-19 di 2022 diperkirakan juga menjadi salah satu pendorong inflasi 2022 terutama jika tidak diimbangi dengan kecepatan sisi supply dalam merespon kenaikan demand.*

7.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perbaikan ekonomi global pada tahun 2022 diperkirakan terus berlanjut meskipun eskalasi tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina memperburuk jalur pemulihan. Perekonomian global pada tahun 2022 berisiko tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) periode April 2022, *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan perekonomian dunia pada tahun 2022 akan tumbuh 3,6% **(Tabel 7.1)**, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya (4,4%; WEO Januari 2022). Revisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan India yang berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Perkembangan ini terutama disebabkan oleh peningkatan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, implementasi kebijakan *zero* COVID-19 di Tiongkok, dan percepatan kebijakan moneter di berbagai negara yang menyebabkan volume perdagangan dunia berpotensi tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Peningkatan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang terjadi sejak Februari 2022 menyebabkan tertahannya pemulihan rantai pasokan global dan kenaikan harga komoditas energi, pangan, dan logam dunia, sehingga berdampak terhadap peningkatan tekanan inflasi yang lebih kuat di negara maju dan negara berkembang. Tekanan inflasi yang meningkat lebih tinggi berpotensi menahan pemulihan daya beli masyarakat, di mana hal tersebut mendorong bank sentral di dunia untuk mempercepat normalisasi kebijakan moneternya. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global yang mendorong terbatasnya aliran modal luar negeri dan menekan nilai tukar diberbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tabel 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia

	WEO IMF (% yoy)			
	2020	2021	2022	2023
Dunia	-3,1	6,1	3,6	3,6
Negara Maju	-4,5	5,2	3,3	2,4
AS	-3,4	5,7	3,7	2,3
Eropa	-6,3	5,3	2,8	2,3
Jepang	-4,6	1,6	2,4	2,3
Negara Berkembang	-2,1	6,8	3,8	4,4
Tiongkok	2,3	8,1	4,4	5,1
India	-7,3	8,9	8,2	6,9
World Trade Volume	-8,2	10,1	5,0	4,4
Oil (USD/barel)	-32,7	67,3	54,7	-13,3

Sumber: IMF, *WEO April 2022*

Sejalan dengan proyeksi IMF, proses pemulihan ekonomi nasional pada 2022 diprakirakan berlanjut meski lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2022 tetap kuat, yakni 5,01% (yoy), melanjutkan momentum pemulihan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,02% (yoy). Perkembangan ini terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi bangunan, dan tetap terjaganya kinerja ekspor seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Pada triwulan II 2022, berbagai indikator dini menunjukkan aktivitas perekonomian Indonesia terus mengalami perbaikan, yang tercermin pada pertumbuhan positif penjualan eceran, ekspansi *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur, serta realisasi ekspor dan impor yang tetap tinggi, yang didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan pembiayaan dari perbankan. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian domestik tahun 2022 tetap tumbuh dengan kuat, yakni pada kisaran 4,5–5,3%, meski lebih rendah jika dibandingkan perkiraan sebelumnya (4,7–5,5%), didukung oleh prospek konsumsi yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya seiring dengan menguatnya pendanaan, sebagaimana terindikasi dari kenaikan Indeks Penghasilan, kredit konsumsi, kenaikan penyaluran bantuan sosial, sertaadanya efek tunda dari

pendapatan ekspor. Ke depan, potensi kenaikan inflasi dan perlambatan ekspor perlu diwaspadai. Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait yang terus diperkuat, termasuk kebijakan reformasi struktural yang berlanjut akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2022, pemulihan ekonomi Provinsi Lampung diperkirakan terus berlanjut, yakni pada kisaran 4,0%–4,8%, meski lebih rendah jika dibandingkan prakiraan sebelumnya (4,5%–5,3%). Kinerja perekonomian ke depan akan didorong oleh daya beli masyarakat yang terus mengalami perbaikan dan mendorong peningkatan komponen permintaan domestik seiring dengan terkendalinya penyebaran COVID-19 varian Omicron. Hal tersebut didukung oleh akselerasi program vaksinasi yang terus berlanjut, tercermin dari capaian target Provinsi Lampung untuk vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan *booster* dosis 3 yang masing-masing tercatat telah mencapai 90,58%, 72,26%, dan 12,12% pada 27 Mei 2022, dengan realisasi penerima tertinggi pada kelompok produktif, yaitu SDM kesehatan, Petugas Publik, dan Masyarakat Umum (Grafik 7.1). Capaian tersebut mendukung peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerja sejalan dengan semakin berkurangnya dampak penyebaran COVID-19 terhadap pasar tenaga kerja di Provinsi Lampung. Meski demikian, revisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2022 disebabkan oleh pertumbuhan produksi Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Industri Pengolahan pada tahun 2022 diperkirakan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Prospek pertumbuhan bias bawah LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan disebabkan oleh dampak kegiatan konstruksi revitalisasi saluran irigasi pertanian pada tahun 2021 kepada produksi tanaman pangan yang terus berlanjut hingga April 2022. Selanjutnya, perkiraan tertahannya pertumbuhan produksi LU Industri Pengolahan sejalan dengan terbatasnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit pada triwulan I 2022 serta berlanjutnya kebijakan pengetatan ekspor CPO dan turunannya pada triwulan II 2022.

Grafik 7.1 Perkembangan Vaksinasi di Provinsi Lampung

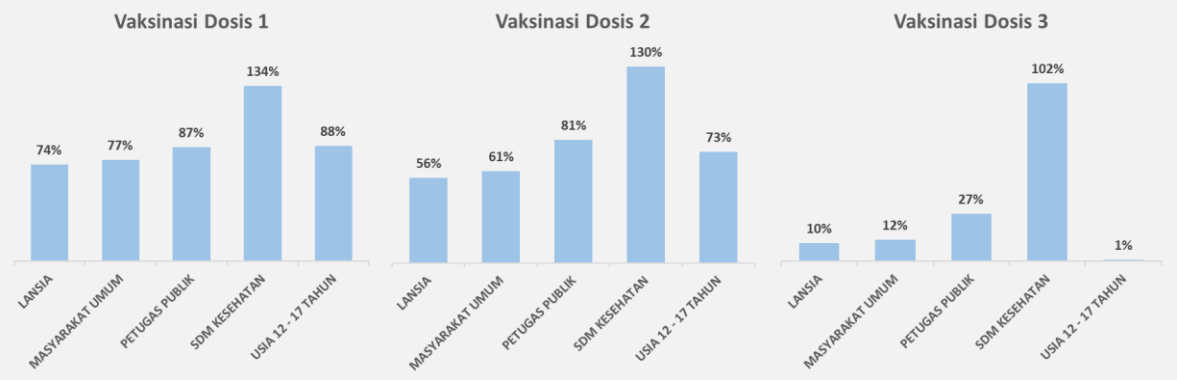

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, data s.d. 27 Mei 2022

Pada tahun 2022, akselerasi pemulihan ekonomi akan didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Akselerasi pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh mobilitas masyarakat pada HBKN Idul Fitri dan Nataru pada tahun 2022 yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, sejalan dengan tercapainya angka vaksinasi penduduk yang lebih tinggi. Perkiraan tersebut sejalan dengan hasil *liaison* KPw BI Provinsi Lampung yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap peningkatan penjualan, tingkat upah, jumlah tenaga kerja, harga jual, dan investasi pada tahun 2022. Dari sisi pendapatan masyarakat, *disposable income* pada tahun 2022 diperkirakan meningkat sejalan dengan perkiraan peningkatan serapan tenaga kerja, adanya peningkatan upah minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2022 sebesar 0,35% jika dibandingkan tahun 2021, serta berlanjutnya peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi perekonomian (Grafik 7.2) dan ekspektasi pelaku usaha terhadap kenaikan harga jual (Grafik 7.3) seiring dengan terkendalinya penyebaran

COVID-19. Namun demikian, risiko tertahannya pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga perlu diwaspadai, sebagaimana terdapat beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penghambat pertumbuhan, diantaranya kenaikan tekanan inflasi sejak triwulan I 2022, tertahannya pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor pada triwulan III dan IV 2022 seiring dengan berlanjutnya penyesuaian diskon Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) terhadap mobil berjenis *low-cost green car* (LCGC) dan mobil dengan rentang harga Rp200 juta s.d. Rp500 juta pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan terkontraksi jika dibandingkan

Grafik 7.2 Perkembangan Ekspektasi Konsumen

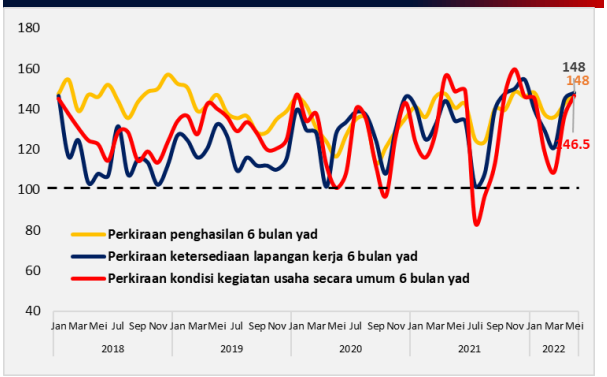

Sumber: SK, Bank Indonesia

Grafik 7.3 Perkembangan Ekspektasi Pelaku Usaha terhadap Harga Jual Produk Utama

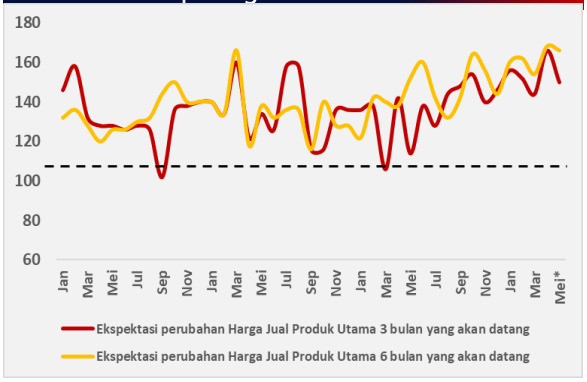

Sumber: SPE, Bank Indonesia

tahun sebelumnya. Pertumbuhan negatif komponen konsumsi pemerintah terutama disebabkan oleh komponen pendapatan dan belanja RAPBD Provinsi Lampung tahun 2022 yang lebih rendah dibandingkan RAPBD tahun 2021 akibat penurunan signifkan pada komponen belanja hibah. Komponen pendapatan dan belanja terpantau mengalami penurunan alokasi anggaran masing-masing sebesar -13,00% (yoy) -7,22% (yoy). Selain itu, terdapat penurunan alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada tahun 2022 sebesar -12,28% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2021. Namun demikian, kontraksi yang lebih dalam diperkirakan tertahan oleh perkiraan peningkatan kapasitas Pemda dalam merealisasikan anggaran belanjanya (*frontloading*), sejalan dengan realisasi pendapatan daerah yang diperkirakan meningkat dengan upaya perluasan elektronifikasi transaksi Pemda dan berlanjutnya pemulihan ekonomi dan akselerasi program vaksinasi.

Selanjutnya, terjaganya stabilitas makroekonomi dan berlanjutnya pemulihan ekonomi akan mendukung kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2022. Kinerja PMTB yang diperkirakan tetap tumbuh positif pada tahun 2022 terutama didorong oleh berlangsungnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Lampung, yaitu logistik kereta api Lahat – Muara Enim – Prabumulih Tarahan pada keseluruhan tahun 2022 serta *Krakatau Park*, masjid raya, *creative hub*, UMKM *center* dan taman budaya di Bakauheni *Harbour City* (BHC) sejak triwulan II 2022. Dari sisi belanja pemerintah daerah, terdapat peningkatan alokasi anggaran komponen belanja modal sebesar 61,39%, terutama untuk perbaikan jalan, pada RAPBD Provinsi Lampung tahun 2022. Namun demikian, telah berakhirnya pembangunan beberapa PSN seperti Bendungan Maratiga dan Bendungan Way Sekampung pada triwulan IV 2021 diperkirakan menahan geliat pertumbuhan PMTB yang lebih tinggi.

Dari sisi eksternal, ekspor Provinsi Lampung tahun 2022 diperkirakan tetap tumbuh positif meski termoderasi. Perkiraan melambatnya pertumbuhan ekspor sejalan dengan perekonomian global dan *World Trade Volume* yang tumbuh lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi permintaan, kebutuhan negara mitra untuk komoditas ekspor utama Provinsi Lampung, yaitu CPO dan batu bara, diperkirakan tetap tinggi meski produksi domestik negara mitra dagang relatif lebih terjaga dibandingkan tahun sebelumnya. Permintaan ekspor CPO dari mitra dagang pada tahun 2022

akan ditopang oleh pulihnya sektor Horeca serta adanya penurunan *import duties* di India. Untuk komoditas batu bara, volume ekspor batubara ke Tiongkok pada triwulan I 2022 terpantau tetap tumbuh kuat, meskipun perlambatan pertumbuhan ekspor diperkirakan akan terjadi pada triwulan II 2022 seiring dengan terjadinya lonjakan kasus baru COVID-19 di Tiongkok. Selain itu, *power rationing* di beberapa provinsi di Tiongkok yang telah dihentikan pada November 2021 dan adanya pembatasan yang diberlakukan Tiongkok terhadap impor batu bara dari Australia juga turut menjaga permintaan impor batu bara Tiongkok ke Indonesia, terutama pasca usainya implementasi kebijakan pengetatan mobilitas di Tiongkok pada triwulan II 2022. Namun demikian, dinamika implementasi kebijakan pengetatan ekspor CPO dan turunannya pada triwulan I dan II 2022 di tengah terbatasnya bahan baku (TBS Kelapa Sawit) terpantau menghambat pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi. Selain itu, peningkatan tensi geopolitik antara Rusia-Ukraina yang menghambat pemulihan rantai pasokan menyebabkan tetap tingginya *tarif container* sampai dengan semester I 2022.

Sejalan dengan pertumbuhan ekspor, untuk keseluruhan tahun 2022, impor Provinsi Lampung juga diperkirakan termoderasi. Perlambatan tersebut sejalan dengan perkiraan pertumbuhan *world trade volume* yang lebih lambat, tercermin dari ekspor Provinsi Lampung yang juga mengalami perlambatan. Meskipun tumbuh melambat, impor tetap diperkirakan tumbuh positif seiring berlanjutnya peningkatan impor barang konsumsi dan bahan baku penolong industri akibat akselerasi program vaksinasi yang mendukung kegiatan ekonomi LU Industri Pengolahan, terutama industri pengolahan makanan. Peningkatan alokasi impor gula nasional dalam Perizinan Impor (PI) Gula Rafinasi 2022 menjadi 3,4 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kuota tahun sebelumnya yang sebesar 3,1 juta ton, dan perkiraan berlanjutnya pemulihan sektor Hotel, Restoran, dan katering juga turut mendorong kinerja impor. Selain itu, berlangsungnya pembangunan proyek logistik kereta api untuk rute Lahat – Muara Enim – Prabumulih Tarahan/Lampung diperkirakan mendorong berlanjutnya peningkatan impor barang modal. Meski demikian, kenaikan harga komoditas energi dan bahan pangan dunia akibat peningkatan tensi geopolitik terpantau telah menghambat pertumbuhan impor pada triwulan I 2022, dan diperkirakan terus berlajut sampai dengan semester II 2022, terutama untuk komoditas pupuk, gula, dan bungkil kedelai.

Perkembangan kinerja perekonomian Provinsi Lampung tahun 2022 dari sisi permintaan akan tercermin pada kinerja lapangan usaha (LU) utama Lampung, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; dan Konstruksi. Peningkatan kinerja komponen permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga, akan tercermin pada akselerasi pertumbuhan yang terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran. Termoderasinya kinerja komponen eksternal akan tercermin pada tertahannya pertumbuhan LU Industri Pengolahan dan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selanjutnya, perlambatan kinerja PMTB diperkirakan sejalan dengan perkembangan LU Konstruksi.

Setelah terkontraksi pada tahun 2021, produksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2022 diperkirakan mengalami perbaikan meski lebih lambat. Tertahannya perbaikan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan disebabkan oleh terhambatnya produksi tanaman pangan pada semester I 2022 seiring dengan kenaikan harga pupuk dunia dan berkurangnya lahan tanam padi sampai dengan Februari 2022 karena adanya revitalisasi saluran irigasi. Selanjutnya, pertumbuhan positif LU Pertanian pada tahun 2022 diperkirakan didorong oleh peningkatan produktivitas kegiatan pertanian pada semester II 2022, didukung oleh proses pengairan yang lebih optimal sejalan dengan telah selesainya proyek rehabilitasi saluran irigasi sentra pertanian periode tahun 2021 pada Februari 2022. Selain itu, terdapat perkiraan peningkatan produksi kelapa sawit akibat pengelolaan perkebunan yang lebih baik seiring semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung.Adapun peningkatan permintaan kelapa sawit yang lebih tinggi didukung oleh meningkatnya permintaan *oleofood* dan kebutuhan CPO untuk biodiesel di dalam negeri. Potensi peningkatan *output* yang lebih tinggi juga didukung oleh berbagai program Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tanaman pangan melalui penyaluran sarana pasca panen sejumlah 70 unit, pengembangan kawasan ubi kayu seluas 1.200 Ha, pengembangan kawasan padi seluas 4.000 Ha,

pengembangan kawasan padi biofortifikasi seluas 900 Ha, serta bantuan benih padi inbrida (25kg/Ha) pada lahan seluas 35.000 Ha. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang dapat menghambat potensi pertumbuhan produksi LU pertanian, diantaranya adalah rendahnya produksi tanaman pangan pada Januari s.d. April 2022 sebagai dampak dari revitalisasi saluran irigasi periode tahun 2021, adanya fenomena La Nina dengan intensitas rendah sampai dengan sedang sejak triwulan IV 2021 s.d. triwulan I 2022, El Nino pada paruh kedua tahun 2022, serta harga pupuk dan pestisida yang diperkirakan tetap tinggi pada paruh pertama tahun 2022 sebagai dampak dari adanya gangguan rantai pasokan, permintaan yang lebih tinggi, serta kenaikan biaya pengiriman dan input.

Sejalan dengan perbaikan kinerja LU Pertanian, pemulihan kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan berlanjut pada keseluruhan tahun 2022 meski tertahan pada triwulan I 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh perkiraan peningkatan produksi *crude palm oil* (CPO) karena pengelolaan perkebunan yang lebih baik dan optimalnya operasional pabrik didukung oleh dampak La Nina yang relatif terkendali jika dibandingkan dengan kondisi di Malaysia. Selain itu, permintaan CPO juga diperkirakan mengalami peningkatan seiring berlanjutnya pemulihan sektor Horeca dan adanya peningkatan alokasi kuota biodiesel B30 menjadi 10 juta kiloliter pada tahun 2022. Adapun produksi gula kristal dan rafinasi juga diperkirakan mengalami peningkatan, sejalan dengan kuota perizinan impor (PI) gula rafinasi untuk tahun 2022 yang tercatat sebesar 3,4 juta ton, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuota tahun 2021 (3,1 juta ton). Selain itu, hasil *liaison* KPw BI Provinsi Lampung juga mendukung perkiraan peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan dimana responden (korporasi) *liaison* menyatakan optimismenya atas peningkatan utilisasi faktor produksi dan permintaan domestik yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan *output* yang lebih tinggi diperkirakan tertahan oleh risiko terhambatnya aktivitas produksi di tengah adanya kebijakan *domestic market obligation* (DMO) dan *domestic price obligation* (DPO) untuk CPO yang diterapkan pada sejak Januari 2022, yang diikuti dengan pelarangan ekspor CPO dan turunannya pada 28 April s.d. 20 Mei 2022 seiring dengan masih tingginya tekanan inflasi karena terbatasnya bahan baku untuk produksi CPO dan turunannya. Kebijakan pengetatan ekspor dimaksud berpotensi menghambat pertumbuhan produksi industri pengolahan CPO, terutama bagi pelaku usaha yang hanya menjual produknya ke pasar domestik dan tidak memiliki perkebunan sawit terintegrasi.

Selanjutnya, pemulihan kinerja LU Perdagangan pada tahun 2022 diperkirakan berlanjut dan juga berpotensi tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumya. Pertumbuhan yang lebih tinggi tersebut didorong oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik sejalan dengan terkendalinya penyebaran COVID-19 varian Omicron dan meningkatnya optimisme konsumen dan pelaku usaha terhadap perekonomian ke depan, didukung oleh akselerasi program vaksinasi dan *booster* vaksin COVID-19. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang turut mendukung peningkatan volume perdagangan diantaranya penerapan standar emisi Euro 4 pada kendaraan diesel dan meredanya krisis *chip* semikonduktor global yang mendorong peningkatan produksi kendaraan bermotor dan alat-alat elektronik. Peningkatan ekspektasi dan volume perdangan tersebut juga akan tercermin dari mobilitas masyarakat tahun 2022 (s.d. Mei 2022) yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021, terutama pada momen Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1443 H. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2022 berpotensi tertahan akibat meningkatnya tekanan inflasi seiring dengan kenaikan harga komoditas energi, pangan, dan metal dunia. Selain itu, berlanjutnya penyesuaian diskon Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) terhadap mobil berjenis *low-cost green car* (LCGC) dan mobil dengan rentang harga Rp200 juta s.d. Rp500 juta pada tahun 2022.

Melanjutkan perbaikan kinerja perekonomian pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2023 diperkirakan terakselerasi utamanya didorong oleh peningkatan kinerja komponen permintaan domestik dan kembali terakselerasinya komponen eksternal, yang akan tercermin pada peningkatan kinerja LU utama Provinsi

Lampung. Peningkatan komponen permintaan domestik terutama didorong oleh daya beli masyarakat yang semakin tinggi di tengah semakin rendahnya dampak COVID-19 terhadap kondisi sosial-ekonomi Provinsi Lampung, perkiraan peningkatan intermediasi perbankan sejalan dengan kondisi likuiditas perbankan yang masih *ample* pada tahun 2021 dan 2022, dan masih berlangsungnya pembangunan PSN di Provinsi Lampung. Selain itu, perbaikan pada sisi eksternal akan didorong oleh perkiraan meningkatnya permintaan batu bara dan CPO yang didukung oleh prospek ekspor batu bara yang masih baik dipengaruhi oleh permintaannya yang meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi domestik dan mitra dagang, serta pemulihan sektor Horeca yang mendorong peningkatan produksi industri makanan dan minuman domestik maupun global.

7.2 Inflasi

Prospek inflasi pada tahun 2022 diperkirakan tetap terjaga pada kisaran target 3,0%±1% (yoy), meski dengan tendensi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 sebagai dampak dari peningkatan eskalasi tensi geopolitik Rusia dan Ukraina. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong tekanan inflasi di tahun 2022 diantaranya bersumber dari kelompok *Volatile Food* khususnya pada periode sebelum panen serta periode *seasonal* lebaran dan akhir tahun seiring dengan hambatan kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antar daerah dan antar waktu yang umumnya terjadi. Selain itu, pada 2022, tren harga pupuk, gandum, kedelai, dan jagung dunia diperkirakan akan pada level yang tinggi, sehingga berpotensi mendorong tekanan inflasi dari sisi *supply*. Di sisi lain, kelompok *Administered Prices* diprakirakan akan turut meningkat dibandingkan 2021 didorong oleh kenaikan tarif cukai rokok serta peningkatan harga BBM dan LPG seiring dengan kenaikan harga energi dunia. Lebih lanjut, pada tahun 2022 seiring dengan membaiknya mobilitas masyarakat akan turut meningkatkan permintaan angkutan udara sehingga mendorong kenaikan tarif angkutan udara. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan permintaan yang berasal dari perbaikan *demand* masyarakat seiring dengan optimisme menurunnya penyebaran COVID-19 di 2022 diperkirakan juga menjadi salah satu pendorong inflasi 2022 terutama jika tidak diimbangi dengan kecepatan sisi *supply* dalam merespon kenaikan *demand*. Apabila *booster* vaksinasi berhasil memulihkan pandemi di tahun 2022, kemungkinan adanya *pricing behavior* (produsen meningkatkan harga sebagai kompensasi kerugian di tahun sebelumnya) pasca COVID-19 dapat terjadi.

Prospek inflasi pada tahun 2023 diperkirakan masih tetap terjaga pada kisaran target 3,0%±1% (yoy). Meski demikian, masih terdapat beberapa hal yang dapat menjadi risiko peningkatan tekanan inflasi, diantaranya bersumber dari kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau mengingat sifatnya yang rentan terhadap ketersediaan pasokan, khususnya komoditas hortikultura. Adapun tekanan inflasi di kelompok pangan ini diprediksikan masih dapat terjangkau sejalan dengan koordinasi aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan. Inovasi produksi komoditas pangan, termasuk penerapan digitalisasi, dan implementasi Program KPB perlu terus didukung dengan sinergi yang baik seluruh pihak. Di samping itu, sejalan dengan perkiraan pulihnya pandemi secara total di tahun 2023, inflasi dapat bersumber dari kelompok transportasi seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat secara total. Pada kelompok inflasi inti, pada tahun 2023 diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ditopang oleh pemulihan ekonomi global serta nasional yang turut mendorong peningkatan optimisme masyarakat pasca vaksin dan *booster*. Selain itu, berakhirnya pandemi dan ditetapkannya menjadi endemi turut meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendorong peningkatan harga.

Tabel 7. 2 Tendensi Arah Inflasi dan Faktor

Inflasi	Faktor Risiko 2022
Volatile Food	▪ Terbatasnya pasokan pada periode sebelum panen serta meningkatnya permintaan pada periode *seasonal* lebaran dan akhir tahun seiring dengan hambatan kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antar daerah dan antar waktu yang umumnya terjadi. (*Upside risk*) ▪ Tekanan kenaikan harga gandum, kedelai, dan jagung dunia seiring dengan peningkatan tensi geopolitik Rusia-Ukraina. (*Upside risk*) ▪ Tren harga pupuk dan CPO dunia akan tetap pada level yang mulai terkoreksi pada paruh kedua tahun 2022 meski masih terbatas. (*Downside risk*)
Administered Prices	▪ Potensi kenaikan harga eceran rokok merespons kenaikan tarif cukai rokok (*Upside risk*) ▪ Peningkatan harga tiket angkutan udara akibat peningkatan mobilitas dan kenaikan harga energi. (*Upside risk*) ▪ Adanya peningkatan harga LPG dan Bensin pada tahun 2022 seiring dengan kenaikan harga energi dunia.. (*Upside risk*)
Core	▪ Pemulihan ekonomi pasca pandemi yang dapat meningkatkan kembali aktivitas usaha dan permintaan masyarakat *(Upside risk)* ▪ Berakhirnya PPnBM DTP 100% pada Desember 2021 akan meningkatkan harga mobil, terutama untuk kategori selain *low-cost green car* (LCGC) (*Upside risk*) ▪ *Pricing behavior* pasca COVID-19 dimana produsen meningkatkan harga sebagai kompensasi kerugian di tahun sebelumnya. (*Upside risk*) ▪ Dampak lanjutan dari peningkatan tekanan inflasi kelompok *Volatile Food* dan *Administered Prices,* terutama yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan dan energi dunia. (*Upside risk*)

7.3 Rekomendasi

Berdasarkan asesmen kinerja ekonomi Provinsi Lampung, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal serta menjaga stabilitas makroekonomi di tengah adanya *scarring effect* akibat penyebaran COVID-19 dan meningkatnya risiko inflasi akibat tekanan eksternal dan domestik, diperlukan upaya bersama seluruh pihak. Beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:

1. **Penguatan kolaborasi penanganan** COVID-19 untuk peningkatan percepatan vaksinasi dan *booster*, serta jumlah *testing* dan *tracing,* untuk menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi daerah;
2. Meningkatkan produktivitas Lapangan Usaha Pertanian, terutama subsektor tanaman pangan, melalui peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) dan benih berkualitas, penguatan askes pembiayaan *procyclical* bagi Petani, serta memastikan ketersediaan pupuk berkualitas di Provinsi Lampung di tengah tereskalasinya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina;
3. **Mendorong sinergi pemulihan dan penguatan struktur industri pengolahan**, terutama terkait ketersediaan bahan baku berkualitas, *debottlenecking* permasalahan logistik, dan percepatan pemulihan stabilitas finansial guna menopang pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, dan berkelanjutan;
4. **Mendorong berlanjutnya peningkatan konsumsi rumah tangga** dengan menjaga pemulihan daya beli masyarakat yang dapat dilakukan dengan optimalisasi peran TPID dalam rangka pengendalian inflasi, percepatan pemanfaatan dana desa, realisasi bantuan sosial/subsidi dan program perbaikan kesejahteraan terutama yang menyasar pada UMKM dan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), termasuk akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi serta percepatan ekonomi dan

keuangan yang inklusif dan efisien melalui perluasan penggunaan QRIS dan intensifikasi program elektronifikasi.;

5. **Mendorong pertumbuhan investasi dengan menjaga persepsi positif investor swasta**. Hal tersebut dapat dilakukan melalui:
   - Perbaikan iklim kemudahan berusaha termasuk aspek informasi (transparansi, kemudahan akses, kelengkapan, kekinian dan akurasi);
   - Aspek regulasi (kepastian, kejelasan, keselarasan, sederhana dan insentif investasi) termasuk diantaranya percepatan **penyempurnaan OSS-RBA;**
   - **Mengoptimalkan peran Forum Investasi Lampung (FOILA) sebagai salah satu media untuk mempromosikan potensi investasi Lampung;**
   - **Mengidentifikasi dan mendaftar proyek yang *clean and clear* yang siap dipromosikan di *event* promosi investasi luar negeri melalui GIRU-IRU-RIRU;**
6. **Menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor Lampung** dengan (1) hilirisasi produk untuk penciptaan nilai tambah; (2) meningkatkan kelembagaan dan kapasitas serta digitaliasai untuk mendukung UMKM *Go Export*; (3) Perluasan ekspor ke pasar non tradisional, promosi, dan penguatan kerjasama perdagangan; (4) memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai; serta (5) pemberian dukungan untuk efisiensi biaya logistik;
7. **Identifikasi potensi sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi antara lain melalui optimalisasi *local value chain* (LVC) sebagai strategi dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah**, dan tidak terbatas pada sektor pertanian pangan, namun termasuk sektor lainnya memuat komoditas/produk/jasa usaha (KPJU) unggulan UMKM Provinsi Lampung yaitu industri pengolahan, perdagangan, perikanan, dan akomodasi, makan, dan minum. Penguatan LVC tersebut diantaranya dengan membentuk klaster-klaster ekonomi baru atau ekosistem dimana korporasi dapat berperan sebagai aggregator dan *offtaker*;
8. **Memperkuat dan memperluas digitalisasi** untuk mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, termasuk inklusivitas keuangan;
9. **Pemantauan indikator terkini ekonomi daerah (*Early Warning System*) yang akurat dan terkini** untuk memantau denyut perekonomian daerah.
10. **Memastikan keterjangkauan harga** dengan cara menjaga daya beli masyarakat (Bansos, Subsidi, BLT, dll), percepatan realisasi dan *refocusing* APBN dan APBD, penguatan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium serta melakukan kerja sama dengan produsen untuk pelaksanaan pasar murah
11. **Memastikan ketersediaan pasokan** salah satunya melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD), pembangunan lumbung pangan (*food estate*) melalui peningkatan produksi pangan hortikultura, perluasan adopsi teknologi (IoT) dalam budidaya pertanian juga perlu terus didorong untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian di samping implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB).
12. **Memastikan kelancaran distribusi** melalui TPID dan Satgas Pangan dengan terus memastikan adanya kecukupan pasokan dan kelancaran akses distribusi bahan pokok di Provinsi Lampung di tengah meningkatnya harga komoditas bahan pangan dunia, inovasi dan pembangunan sistem logistik daerah (sesuai dengan Tugas TPID yang termuat dalam Keputusan Presiden No. 23 tahun 2017), optimalisasi penggunaan digitalisasi UMKM pangan sisi hilir seperti fasilitasi UMKM pangan binaan dengan *e-commerce* atau *marketplace* lokal, serta terus mendorong penggunaan transaksi nontunai.
13. **Meningkatkan komunikasi efektif** melalui diseminasi informasi harga dan iklan layanan masyarakat untuk mengimbau masyarakat agar bijak berkonsumsi dan mengurangi *asymmetric information* untuk menjaga ekspektasi inflasi, peningkatan koordinasi TPIP-TPID, perluasan pemanfaatan PIHPS dan sistem harga lainnya sebagai landasan kebijakan TPID.